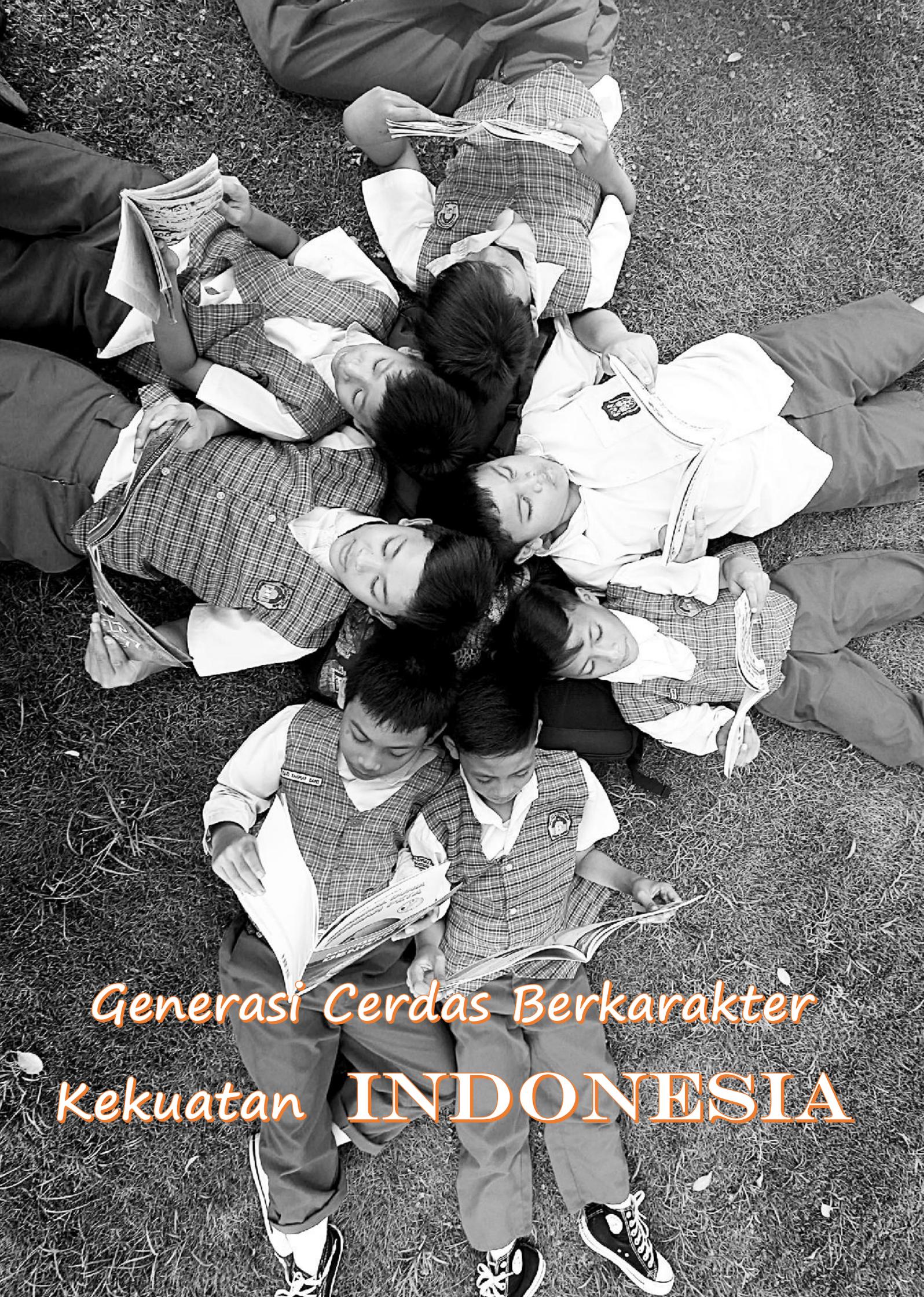




LAPORAN KINERJA 2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERIODE AKHIR RENSTRA 2015 - 2019





Generasi Cerdas Berkarakter
Kekuatan **INDONESIA**



Kata Pengantar

MENDIKBUD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun kelima atau tahun terakhir dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2015--2019. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Kemendikbud Tahun 2019 yang merujuk organisasi Kemendikbud sesuai Perpres Nomor 101 Tahun 2018.

Kemendikbud pada tahun 2019 menetapkan 15 sasaran strategis dan 45 indikator kinerja. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan delapan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Secara umum Kemendikbud telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, masih terdapat permasalahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya adalah penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu pendidikan vokasi, peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas sistem pembelajaran,

peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pemerataan dan pemenuhan guru khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar, peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar, peningkatan keterlibatan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan, pelestarian bahasa dan budaya Indonesia, serta peningkatan tata kelola (*good governance*). Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Kemendikbud selama tahun 2019 dan capaian Renstra 2015--2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan pada tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbud Tahun 2019.

Jakarta, Februari 2020
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Nadiem Amrullah Makarim, B.A., M.B.A. 



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....ii
Daftar Isi.....iii
Daftar Singkatan.....iv
Ikhtisar Eksekutif.....v

1

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan informasi umum dan permasalahan terkait dengan Kemendikbud, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum dan permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

5

Menyajikan ringkasan perencanaan kinerja, seperti visi, misi, tujuan dan ringkasan Perjanjian Kinerja Kemendikbud

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

9 A. Capaian Kinerja Kemendikbud

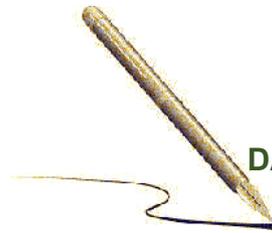
103 B. Realisasi Keuangan

104 C. Capaian Program Prioritas

BAB IV PENUTUP

113

Lampiran 115



DAFTAR SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terluar, Terdepan
APE	Alat Peraga Edukatif
APK	Angka Parsitipasi Kasar
APM	Angka Parsitipasi Murni
APS	Angka Putus Sekolah
BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
BAN-SM	Badan Akreditasi Nasional - Sekolah dan Madrasah
BAN-PNF	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BINDIKLAT	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
BIPA	Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing
BMN	Barang Milik Negara
BOMM	Bantuan Operasional Murid Miskin
BOP	Badan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSSM	Bantuan Operasional Sekolah Siswa Miskin
BPCB	Balai Pelestarian Cagar Budaya
BPNB	Balai Pelestarian Nilai Budaya
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPAUD dan DIKMAS	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan
DAK	Dana Alokasi Khusus
DARING	Dalam Jaringan
DIKDASMEN	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DITJEN	Direktorat Jenderal
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EFA	<i>Education For All</i>
EFSD	<i>Education For Sustainable Development</i>
GGD	Guru Garis Depan
GIMM	Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan
HaKI	Hak Kekayaan Intelektual
IAO	<i>International Astronomy Olympiad</i>
IBO	<i>International Biology Olympiad</i>
ICDE	<i>International Council Of Distance Education</i>
IchO	<i>International Chemistry Olympiad</i>
ICPC	<i>International Collegiate Programming Contest</i>
ICT	<i>Information And Communication Technology</i>
IIUN	Indeks Integritas Ujian Nasional
IJSO	<i>International Junior Science Olympiad</i>
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IMO	<i>International Mathematics Olympiad</i>
IMSO	<i>International Mathematics And Science Olympiad</i>
INAP	<i>Indonesia National Assessment Program</i>
INEPO	<i>International Environmental Project Olympiad</i>
IOI	<i>International Olympiad In Informatics</i>

IphO	<i>International Physics Olympiad</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IKPN	Indeks Kebudayaan Pembangunan Nasional
ISO	<i>International Standard Organization</i>
ITJEN	Inspektorat Jenderal
KB	Kelompok Bermain
KBK	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KBU	Kelompok Belajar Usaha
KEPRES	Keputusan Presiden
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKPS	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
KKP	Kawah Kepemimpinan Pelajar
KLK	Kelas Layanan Khusus
KNIU	Komite Nasional Indonesia Untuk Unesco
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKBH	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
MGMP	Musyawahar Guru Mata Pelajaran
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	Musyawahar Kerja Kepala Sekolah
MKPS	Musyawahar Kerja Pengawas Sekolah
MDGs	Millenium Development Goals
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
NIGN	Nomor Induk Guru Nasional
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional
NILEM	Nomor Induk Lembaga
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
OSN	Olimpiade Sains Nasional
O2SN	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
PPPAUD dan Dikmas	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
PPPPTK	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
PMU	Pendidikan Menengah Universal
PISA	<i>Programmer for Intenational Student Assessment</i>
PIP	Program Indonesia Pintar
PKB	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PKBG	Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKG	Penilaian Kinerja Guru

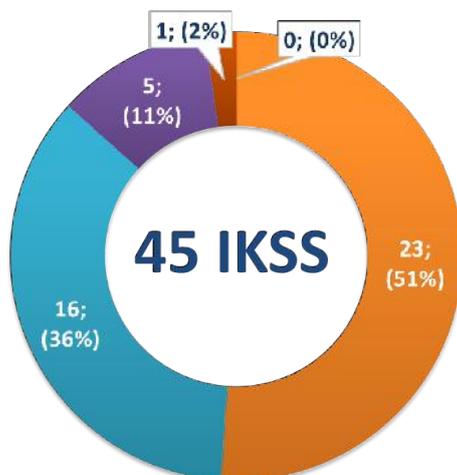
PKH	Pendidikan Kecakapan Hidup
PLB	Pendidikan Luar Biasa
PLK	Pendidikan Layanan Khusus
PLPG	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PLS	Pendidikan Luar Sekolah
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PSBG	Pendidikan Sekolah Berwawasan Gender
PSPSL	Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PUG	Pengarusutamaan Gender
RA	Raudhatul Athfal
RENSTRA	Rencana Strategis
RBI	Reformasi Birokrasi Internal
RKB	Ruang Kelas Baru
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPPNJP	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
S-1	Strata 1/Sarjana
S-2	Strata 2/Pascasarjana
S-3	Strata 3/Pascasarjana
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SEA SPF	<i>South East Asia School Principal Forum</i>
SEAMEO	<i>South East Asia Ministers Of Education Organization</i>
SEAMOLEC	<i>Southeast Asian Ministers Of Education Organization For Regional Open Learning Center</i>
SILN	Sekolah Indonesia Luar Negeri
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	Sekolah Luar Biasa
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMP-LB	Sekolah Menengah Pertama - Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPS	Satuan PAUD Sejenis
SUKMA	Surat Keterangan Melek Aksara
TBM	Taman Bacaan Masyarakat
TENDIK	Tenaga Kependidikan
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	<i>Trends In International Mathematics And Science Study</i>
TK	Taman Kanak-Kanak
TLD	Tenaga Lapangan Dikmas (Pendidikan Masyarakat)
TPA	Tempat Penitipan Anak

TPSDP	<i>Technological And Professional Development Project</i>
TUK	Tempat Uji Kompetensi
TUKBI	Tempat Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
TVE	Televisi Edukasi
UKBI	Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
UKG	Uji Kompetensi Guru
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
ULT	Unit Layanan Terpadu
UN	Ujian Nasional
UPT	Unit Pelaksana Teknis
USB	Unit Sekolah Baru
UUD	Undang-Undang Dasar
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WCF	<i>World Culture Forum</i>
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Ikhtisar Eksekutif

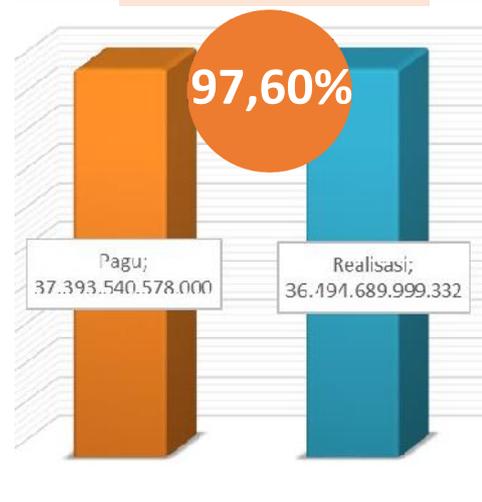
Laporan Kinerja Kemendikbud memberikan informasi tingkat pencapaian 15 sasaran strategis dengan 45 indikator kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan capaian program prioritas Kemendikbud tahun 2019. Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ringkasan Capaian IKSS



■ Capaian \geq 100% = 23 IKSS ■ 85% \leq Capaian < 100% = 16 IKSS
■ 70% \leq Capaian < 85% = 5 IKSS ■ 55% \leq Capaian < 70% = 1 IKSS
■ Capaian < 55% = 0 IKSS

Kinerja Keuangan



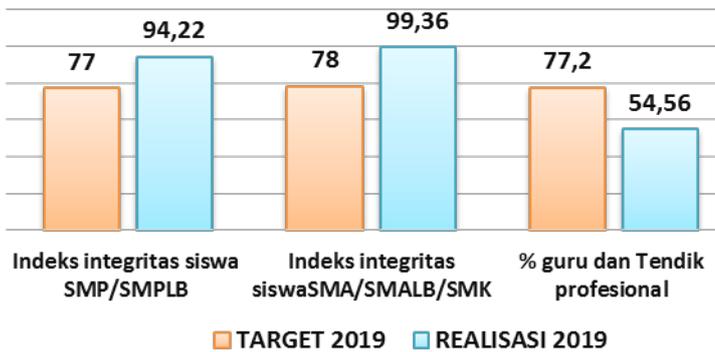
Permasalahan/Kendala		Upaya Penyelesaian	
1	Ketercapaian beberapa indikator merupakan tanggungjawab dan kewenangan Pemda seperti pemenuhan SPM;	1.	mendorong pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan untuk memenuhi SPM pendidikan;
2	Beberapa daerah daya dukung infrastruktur yang mendorong akses pendidikan masih rendah;	2.	mengoptimalkan fasilitasi dan supervisi pemenuhan SNP;
3	Pemenuhan guru di daerah yang belum merata tetapi Kemendikbud tidak mempunyai kewenangan untuk memindahkan guru;	1.	memberikan rekomendasi formasi kebutuhan guru kepada pemda sesuai dengan data Dapodik;
		2.	peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
4	Jumlah dan mutu SDM kebudayaan yang berperan aktif dalam pelestarian keragaman budaya dan memperdalam karakter serta jatidiri bangsa masih minim;		peningkatan jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan
5	Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik		pembinaan terhadap penutur bahasa Indonesia dan pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik

Capaian IKSS Kemendikbud 2019

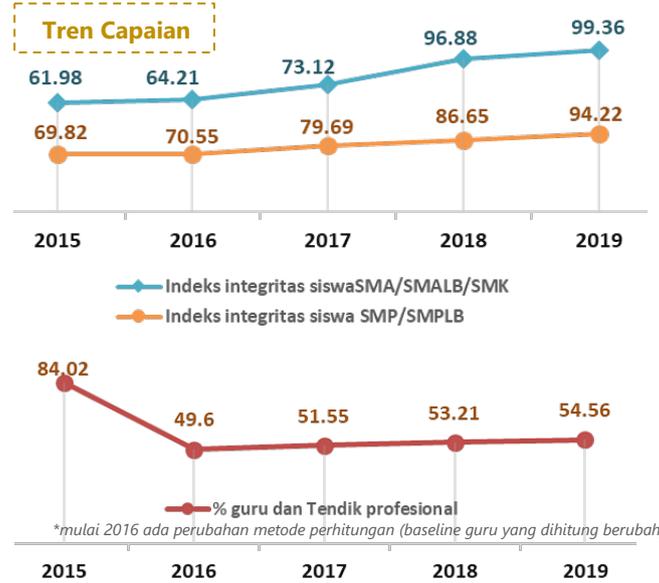
Tujuan Strategis #1



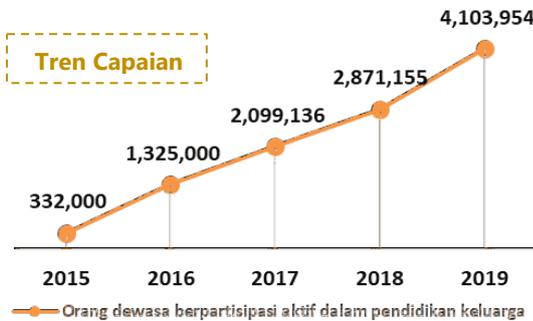
Penguatan Peran Siswa, Guru, Tendik, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan



Sumber data: Balitbang, Ditjen Dikdasmen, Ditjen GTK



Sumber data: PAUD dan Dikmas



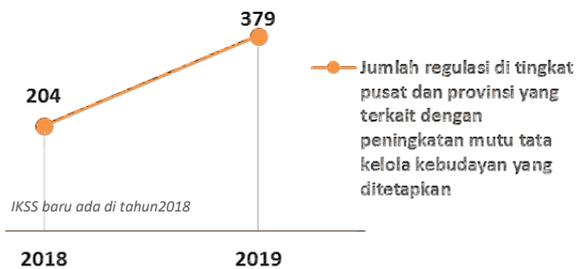
Rata-rata nilai sikap siswa PAUD = **BAIK**

Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM = **BAIK**

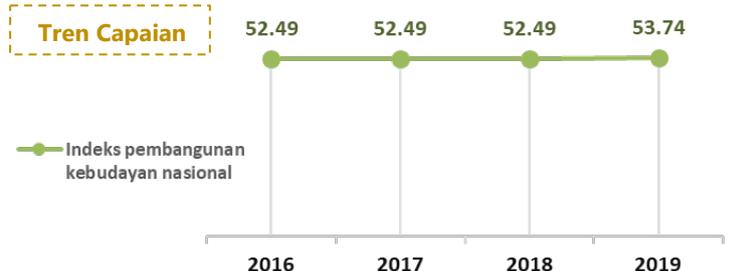


Tujuan Strategis #2

Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan



IKPN diukur 3 tahun sekali. Capaian merupakan pengukuran tahun 2019
Sumber data: Ditjen Kebudayaan bersama BPS

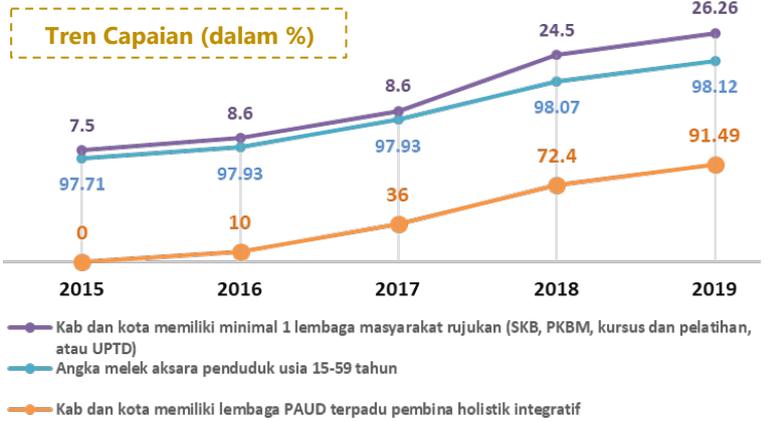




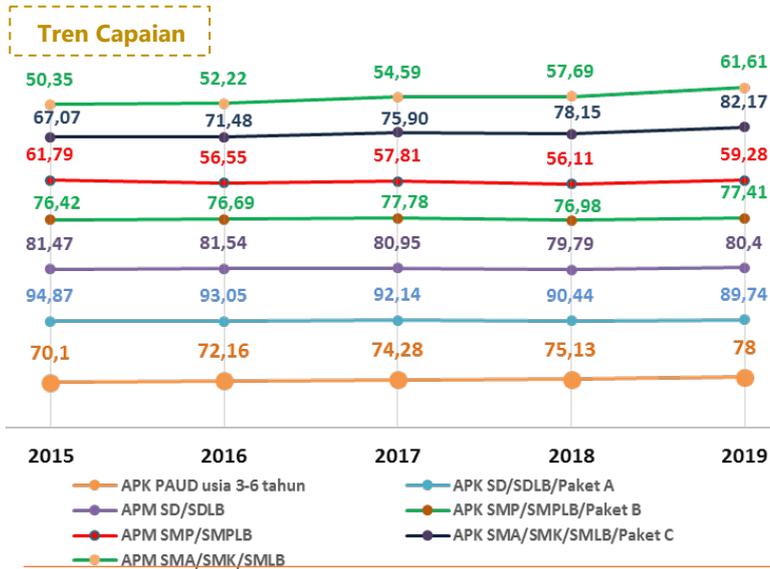
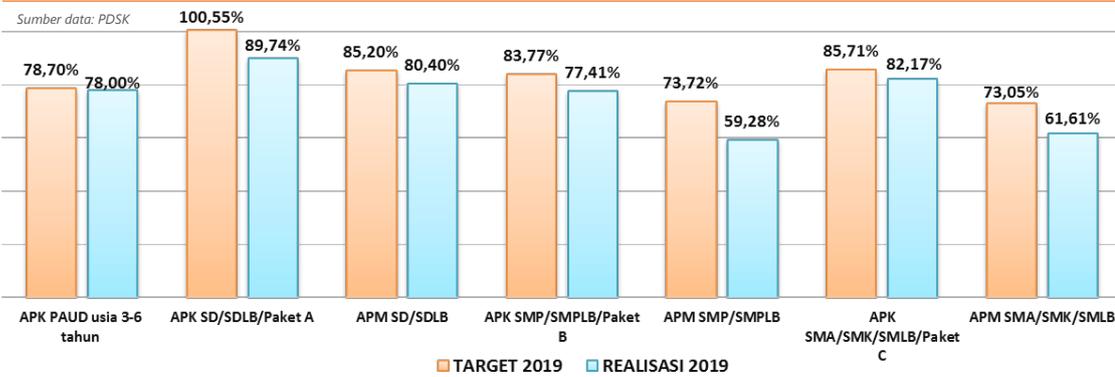
Tujuan Strategis #3

Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

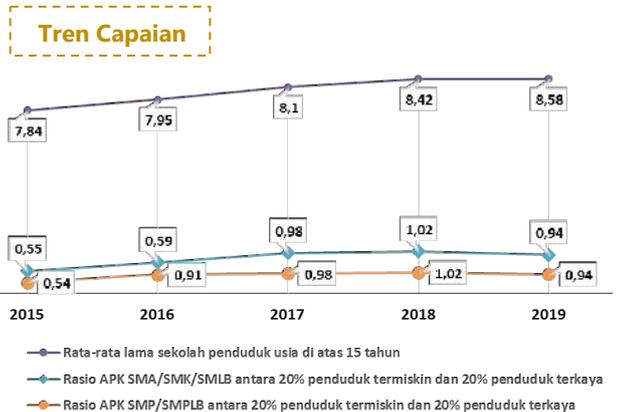
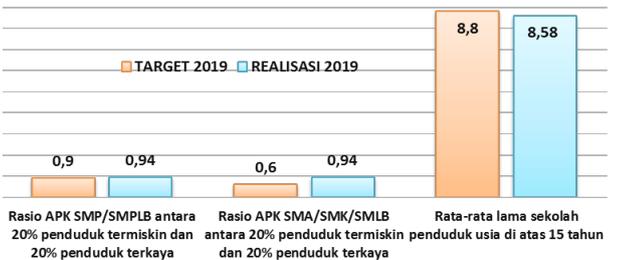
Sumber data: Ditjen GTK, Ditjen PAUD dan Dikmas



Sumber data: PDSK



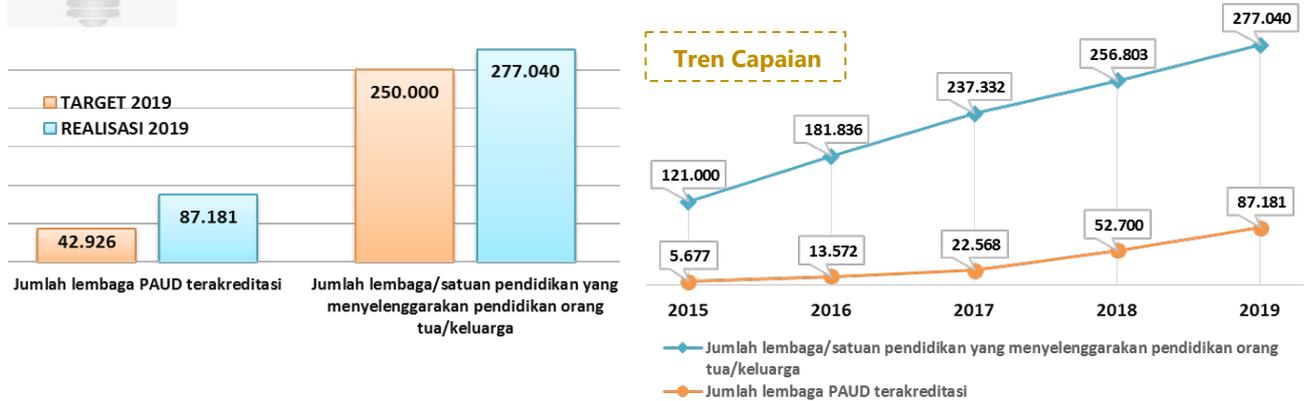
Sumber data: Ditjen PAUD Dikmas, Ditjen Dikdasmen



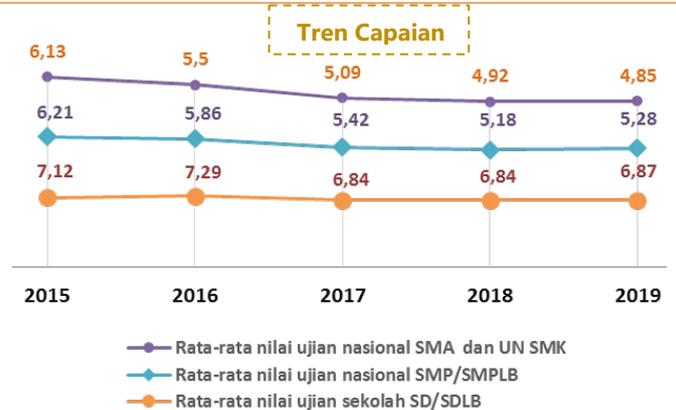
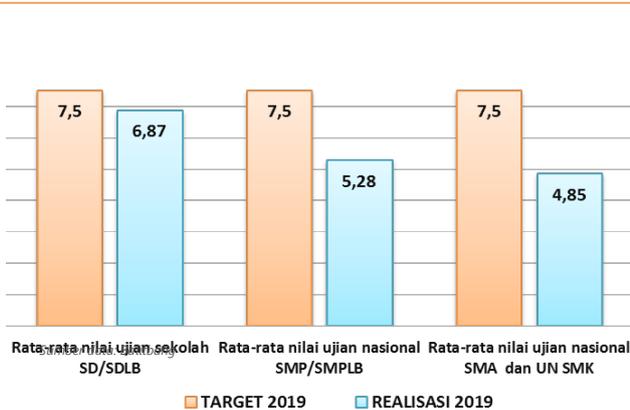
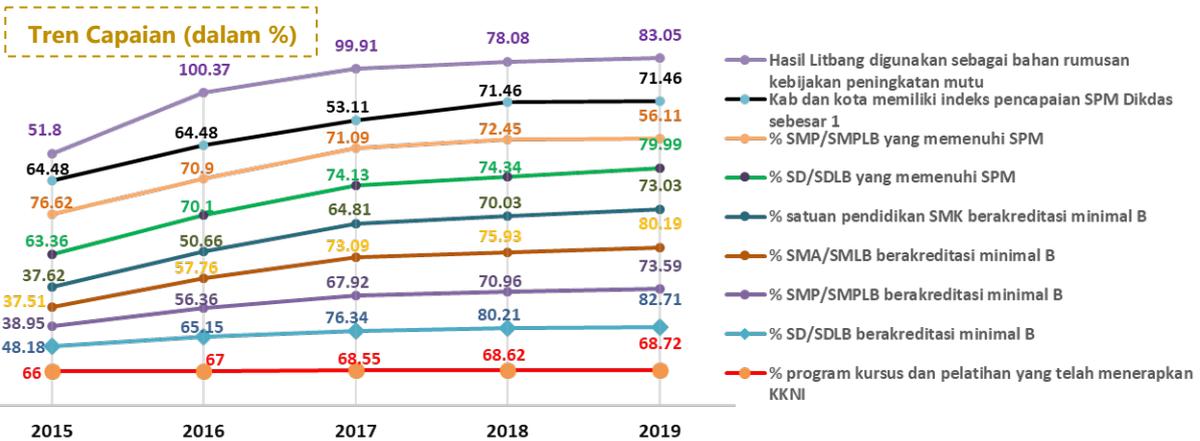
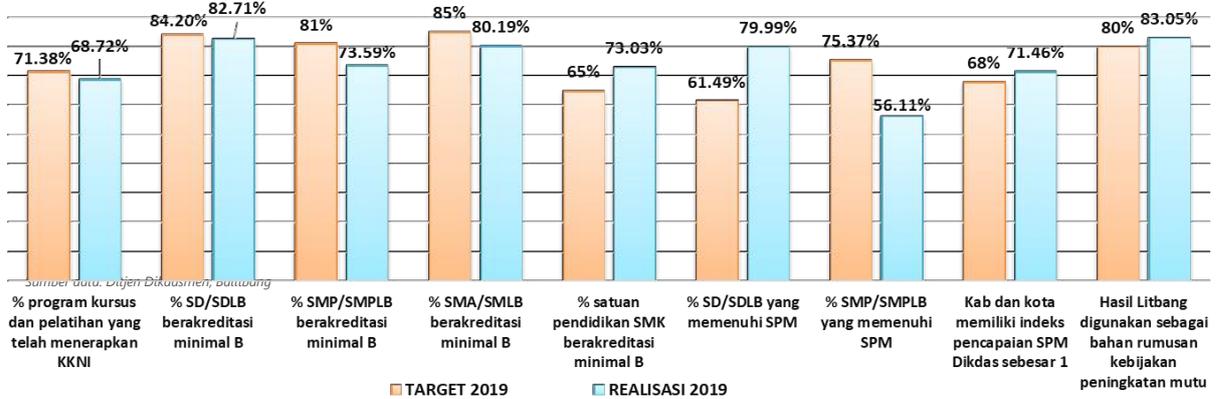


Tujuan Strategis #4

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran Yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter



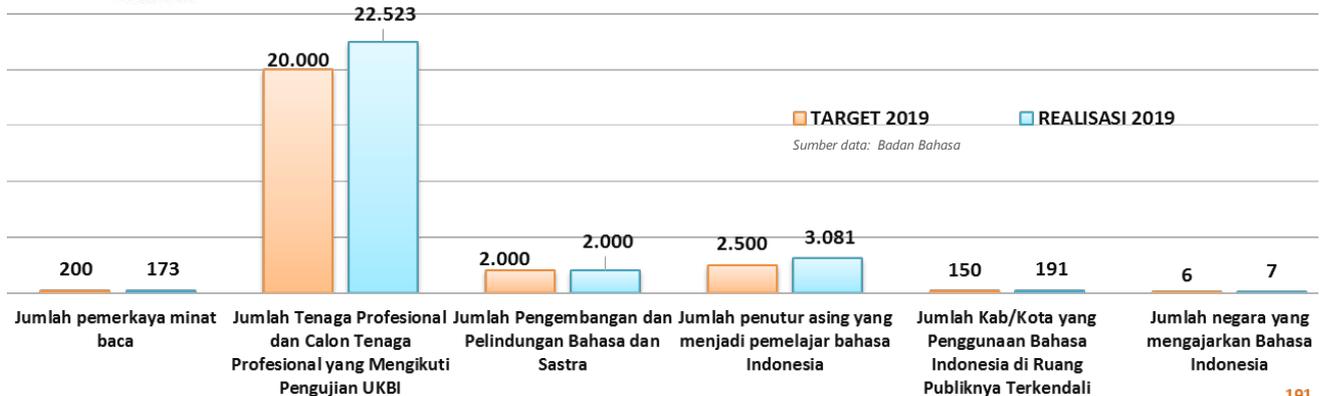
Sumber data: Ditjen PAUD dan Dikmas, Ditjen Dikdamen, Balitbang





Tujuan Strategis #5

Peningkatan Jati Diri Bangsa Melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa Sebagai Pengantar Pendidikan



Tren Capaian



Tujuan Strategis #6

Peningkatan Sistem Tata Kelola Yang Transparan dan Akuntabel Dengan Melibatkan Publik

Sumber data: KemenPAN dan RB, BKLM



Tren Capaian



Laporan Keuangan Kemendikbud = WTP

6X WTP (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)



BAB I **PENDAHULUAN**

Muhadjir Effendi
27 Juli 2016 –
23 Oktober 2019



Nadiem Anwar Makarim
23 Oktober 2019 –
Sekarang



Dasar Pembentukan Kemendikbud Terbaru:- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja Kemendikbud 2019 masih mengacu pada Perpres Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres No 14 Tahun 2015 tentang Kemendikbud, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:-

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas serta pengelolaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas serta pengelolaan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta Tendik;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbud;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemendikbud;
- g. pelaksanaan bimtek dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemendikbud di daerah;
- h. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- h1. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- i. pelaksanaan litbang di bidang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas, serta kebudayaan;
- j. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbud.



**Pegawai Kemendikbud
Per 31 Desember 2019**
15.741 orang (belum
termasuk pegawai fungsi Dikti)



**4 Staf
Ahli**



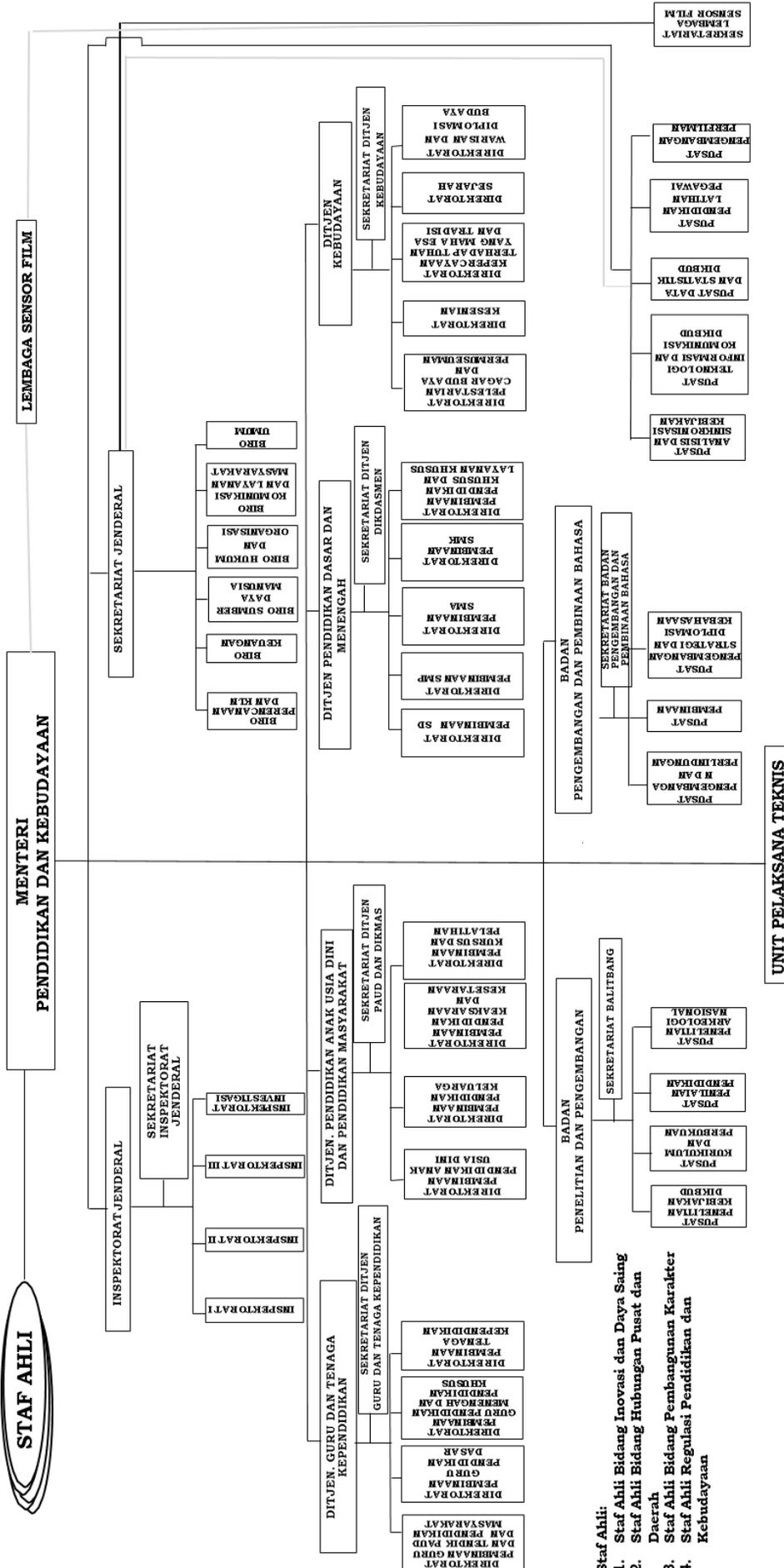
**8 Unit
Utama**

47 Unit kerja
Eselon II

155 UPT

STRUKTUR ORGANISASI

(Permendikbud No. 11 Tahun 2018)



- Staf Ahli:**
1. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing
 2. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter
 4. Staf Ahli Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan

Catatan: Sejak Oktober 2019 Organisasi Kemendikbud mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kemendikbud

1. peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal
2. peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan;
3. belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas;
4. pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal;
5. peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal;
6. jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik;
7. kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan;
8. kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas
9. peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (dikmas) belum maksimal;
10. pengentasan keniraksaraan belum merata
11. peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan;
12. rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah;
13. gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa;
14. minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
15. pelestarian warisan budaya belum efektif;
16. belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya;
17. pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal;
18. belum optimalnya tata kelola organisasi;



BAB II

**PERENCANAAN
KINERJA**



VISI Kemendikbud 2015-2019

“Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”



Tujuan Strategis

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan
2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan
3. Peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus
4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter
5. Peningkatan jati diri bangsa melalui pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan
6. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Pagu Anggaran 2019

Rp35.993.087.934.000 (awal PK)

RP37.393.540.578.000(pagu revisi akhir)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	77 dan 78
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik
2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	4.425.000
3	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	77,20%
4	Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan	1. Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan	159
		2. Indeks pembangunan kebudayaan nasional	54,6
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	78,70%
		2. Kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	70%
		3. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi)	7.871
		4. Angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun	97,51%
		5. Kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	15,60%
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	100,55%
		2. APM SD/SDLB	85,20%
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	83,77%
		4. APM SMP/SMPLB	73,72%
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	85,71%
		6. APM SMA/SMK/SMLB	73,05%
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60
		9. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 tahun
7	Meningkatnya distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum	58,40%
8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	42.926
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKN	71,38%
9	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	84,20%
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	81%
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	85%
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	65%
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,49%
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,37%
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	68%

	8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	7,5	
	9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	7,5	
	10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	7,5	
	11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	80%	
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga 250.000	
11	Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Jumlah pemer kaya minat baca	200
		2. Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian UKBI	20.000
		3. Jumlah pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra	2.000
		4. Jumlah kabupaten/kota yang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publiknya terkendali	150
12	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	6
		2. Jumlah penutur asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia	2.500
13	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP	81
14	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud wajar tanpa pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud	WTP
15	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	77



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



CAPAIAN KINERJA KEMENDIKBUD

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan lima belas sasaran strategis dengan 45 indikator kinerja untuk dicapai. Tingkat ketercapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut.

SS1

Meningkatnya perilaku positif siswa

Perilaku positif siswa menunjukkan peningkatan perbaikan, peningkatan tersebut salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN).



IKSS1.1: Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD



Target 2019 = Baik

Realisasi = Baik

**Target Akhir Renstra
2019 = Baik**

Perilaku siswa PAUD rata-rata bernilai “Baik”. Penilaian tersebut terlihat dari pelaksanaan kurikulum 2013 PAUD sudah merata digunakan pada lembaga-lembaga PAUD. Sesuai dengan kurikulum 2013 PAUD, pembelajaran PAUD harus berpusat kepada anak dengan mengharuskan setiap pendidik untuk melakukan pembiasaan kepada siswa PAUD. Pembiasaan ini menjadi dasar pembentukan karakter budi pekerti yang dapat menjawab indikator kinerja rata-rata nilai perilaku siswa PAUD yang diharapkan baik.

Perilaku budi pekerti itu sendiri pada tahun 2017 diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sesuai Peraturan Presiden tersebut, penguatan pendidikan karakter dijabarkan dalam 18 karakter, yaitu *nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab*.



Sejumlah siswa PAUD sedang bermain di luar ruangan. Bermain sangat baik untuk menumbuhkan karakter yang kuat bagi anak.

Pada akhir tahun 2019, pedoman dan panduan praktis mengenai Penguatan Pendidikan Karakter telah disempurnakan dengan memuat penguatan karakter untuk usia dini yang berbasis kelas/area, berbasis budaya sekolah, dan berbasis keluarga serta masyarakat dengan cara diajarkan, dibiasakan, dan dilatih konsisten dengan harapan menjadi kebiasaan, karakter, dan budaya.

Capaian rata-rata nilai perilaku siswa PAUD pada tahun 2019 telah memenuhi target karena penanaman perilaku budi pekerti sangat mudah dilakukan pada usia dini. Hasilnya anak mampu menerima dan menerapkan contoh yang diberikan guru lebih cepat dari kelompok usia di atasnya. Dari jumlah total siswa PAUD sebanyak 6.574.228 anak (usia 3-6 tahun) secara umum telah mempunyai perilaku yang baik.

Penilaian perilaku siswa PAUD dilakukan melalui penilaian perkembangan anak itu sendiri. Penilaian pada siswa PAUD lebih sulit daripada penilaian pada orang dewasa. Penilaian perilaku siswa PAUD langsung dilakukan oleh guru melalui beberapa metode, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, dan portofolio. Hasil penilaian siswa PAUD tersebut dituangkan dalam rapor siswa yang diberikan pada setiap semester.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini diantaranya adalah belum adanya evaluasi siswa PAUD berdasarkan tingkat pencapaian perkembangan anak secara terstruktur sampai pada tingkat nasional sehingga cukup sulit untuk mendapatkan data kuantitatif yang dapat melihat atau menggambarkan rata-rata perilaku siswa PAUD.

Langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan PAUD adalah mengukur tingkat pencapaian secara *sampling* dan menyiapkan

Instrumen Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (ITPPA) dengan cara pendidik PAUD melakukan pengukuran secara daring dengan menggunakan format yang sama dengan cara manual sehingga perolehan datanya lebih mudah.

IKSS 1.2 : Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK

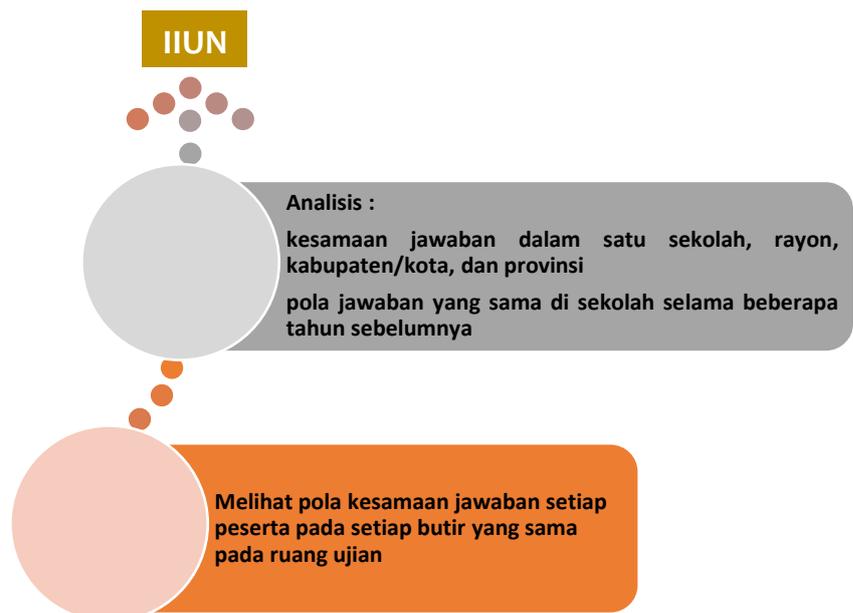
Tahun 2019					
SMP/SMPLB			SMA/SMALB/SMK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
77 (indeks)	94,22 (indeks)	122	78 (indeks)	99,36 (indeks)	127

SMP/SMPLB		
Target Akhir Renstra 2019	77 (indeks)	122%
Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2019	94.22 (indeks)	

SMA/SMALB/SMK		
Target Akhir Renstra 2019	78 (indeks)	127%
Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2019	99.36 (indeksi)	

Capaian Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tahun 2019 sebesar 94,22 (SMP/SMPLB) dan 99,36 (SMA/SMALB/SMK) menunjukkan semakin positifnya perilaku siswa dalam pelaksanaan UN dan menunjukkan kredibilitas pelaksanaan UN semakin baik dari tahun ke tahun. Tingginya capaian IIUN melebihi target Renstra disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/SMPLB serta SMA/SMALB dan SMK yang melaksanakan UNBK. Hal lain juga disebabkan dengan meningkatnya minat sekolah untuk melaksanakan ujian nasional yang lebih objektif dan efisien serta adanya dukungan kabupaten/kota dan provinsi untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100% di daerahnya masing-masing.

Integritas siswa diukur melalui pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Penentuan IIUN dilakukan melalui analisis terhadap pola kesamaan respon jawaban peserta UN yang menggunakan moda Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) sehingga diasumsikan sekolah yang melaksanakan UNBK nilai IIUN-nya adalah 100.

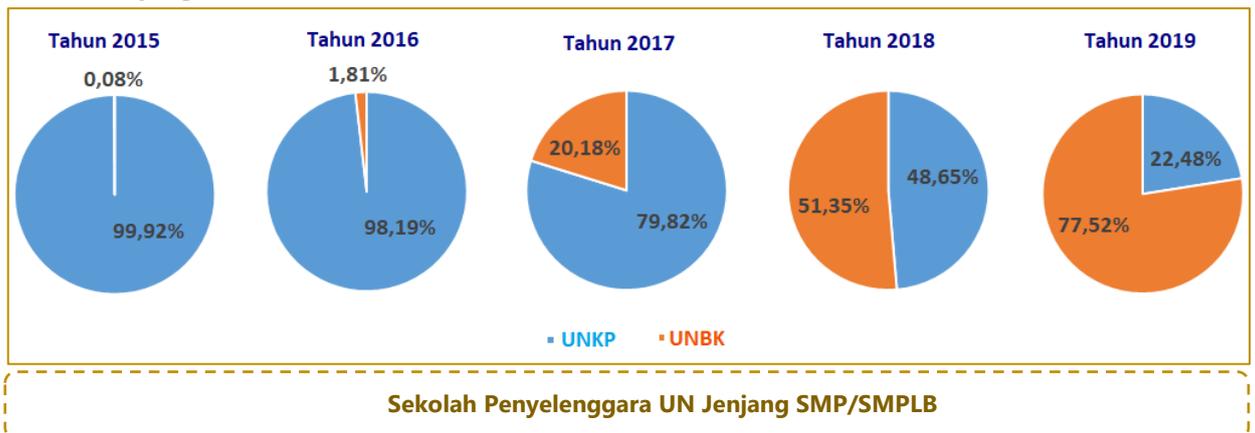


Upaya yang dilakukan

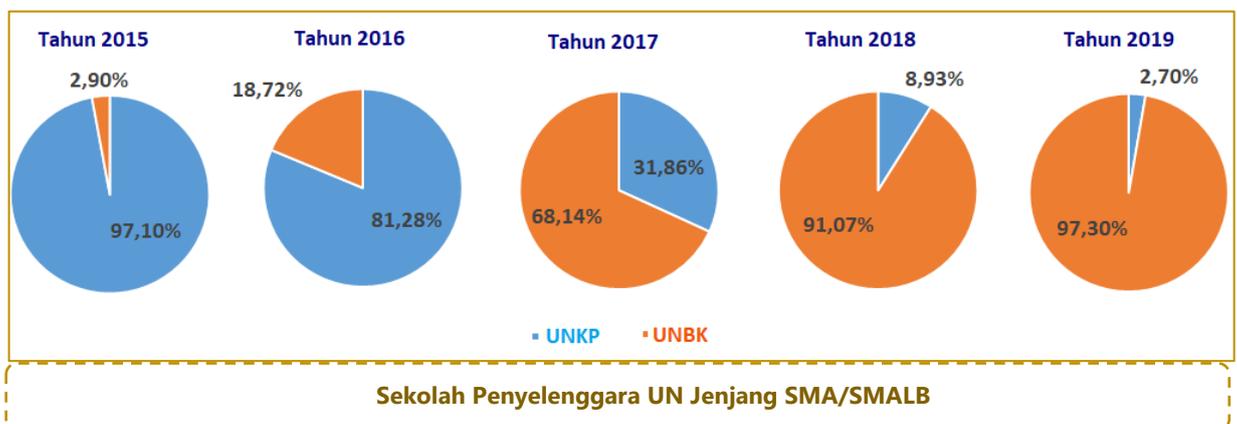
1. Pelaksanaan UNBK

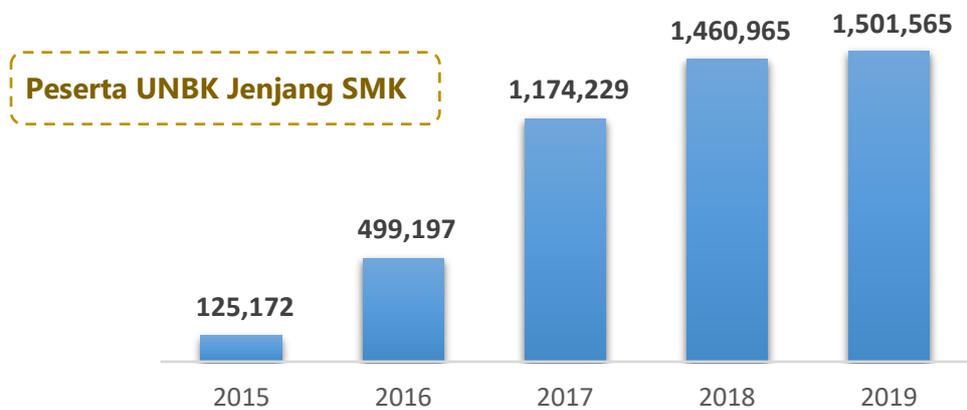
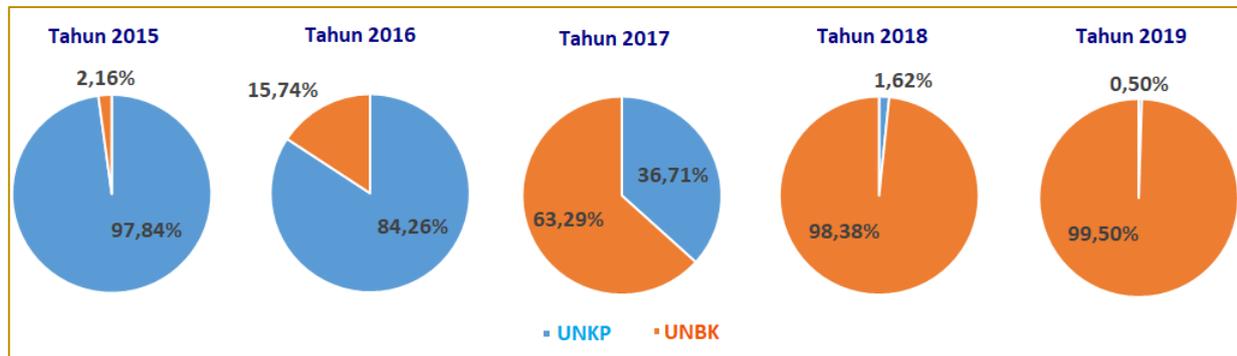
Pelaksanaan UNBK merupakan program prioritas dan sebagai moda utama dalam pelaksanaan UN tahun 2019. Perubahan paradigma pelaksanaan UN dari UN berbasis kertas dan pensil ke UN berbasis komputer adalah kunci utama keberhasilannya. Melalui penyelenggaraan UNBK, potensi kecurangan dapat dikurangi karena paket soal yang diberikan kepada setiap peserta ujian dibedakan secara acak sehingga kemungkinan terjadinya pola jawaban yang sama dapat dihindari. Pelaksanaan UNBK ini merupakan bentuk peningkatan integritas siswa yang mendorong terbentuknya perilaku positif siswa yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab.

a. Jenjang SMP/SMPLB



b. Jenjang SMA/SMALB/SMK





2. Gerakan Prestasi Penting, Jujur yang Utama

Kemendikbud secara konsisten mengampanyekan gerakan menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan ujian. Ujian Nasional tidak hanya mengukur prestasi, akan tetapi lebih mengutamakan kejujuran. Moto yang diusung dalam gerakan tersebut adalah "PRESTASI PENTING, JUJUR YANG UTAMA". Gerakan tersebut ditunjang oleh kebijakan pelaksanaan UNBK untuk semua sekolah dan peserta didik.

Hambatan/kendala yang dihadapi

1. Banyak sekolah di lokasi terpencil dengan kendala geografis memiliki keterbatasan infrastruktur penunjang seperti pasokan listrik dan jaringan internet untuk melaksanakan UNBK.
2. Sekolah di beberapa wilayah belum memiliki sarana yang cukup dan memadai seperti ketersediaan komputer untuk server dan klien sehingga menjadi kendala peralihan pelaksanaan UN dari UNKP ke UNBK.
3. Belum tersedianya sumber daya manusia yang siap menjadi proktor/teknisi UNBK di beberapa sekolah, terutama di sekolah terpencil dengan guru yang sangat terbatas.

Langkah antisipasi

Berdasarkan hambatan/kendala yang telah dipaparkan di atas, langkah antisipasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, penyedia daya dan jaringan internet untuk menunjang UNBK;
2. memanfaatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang memenuhi syarat UNBK agar dapat digunakan oleh sekolah lain dengan sistem berbagi sumber daya (*resource sharing*) yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah masing-masing;
3. penyusunan jadwal UNBK yang tidak bersamaan waktunya untuk masing-masing jenjang agar sistem *resource sharing* dapat berjalan; dan
4. menyelenggarakan pelatihan teknis bagi proktor/teknisi UNBK untuk sekolah yang akan melaksanakan UNBK, baik pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah.

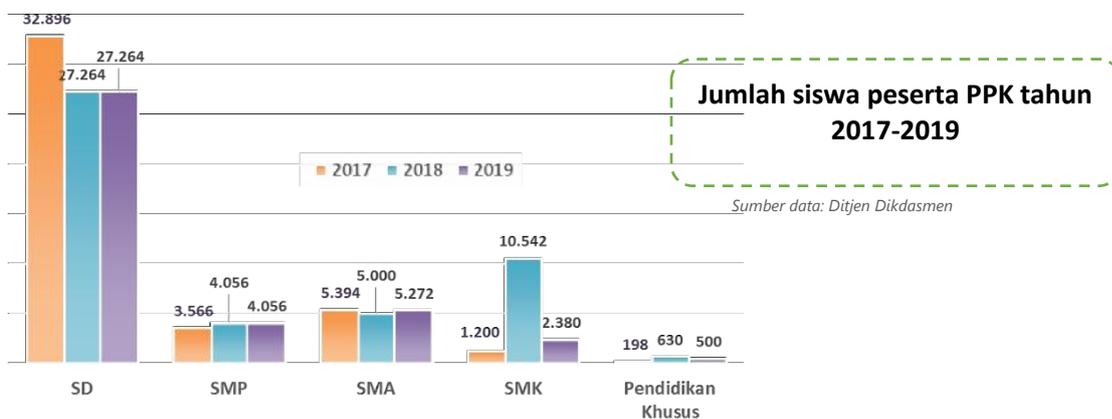


Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, untuk mendukung perbaikan sikap siswa SD/SMP/SM. Dengan peraturan tersebut setiap sekolah diharapkan menerapkan pola pembiasaan sikap positif kepada siswa. Dengan pembiasaan akan menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual, nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan, mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, merawat diri dan lingkungan, mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh.

Program Kemendikbud untuk penumbuhan sikap positif siswa antara lain:

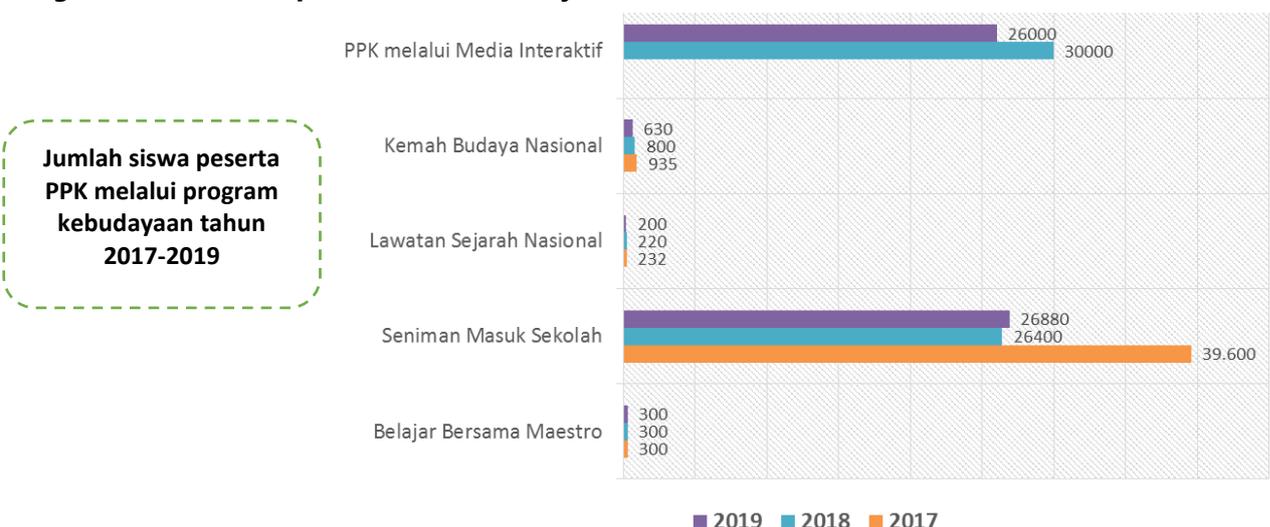
1. Program Penguatan Karakter (PPK)

PPK memfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. PPK bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga/satuan pendidikan. Targetnya dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh siswa. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA/SMK



Implementasi program PPK dilakukan melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan antara lain memulai hari dengan upacara bendera setiap senin, apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, dan daerah, berdoa bersama, membaca buku nonpelajaran, dan cerita rakyat selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran.

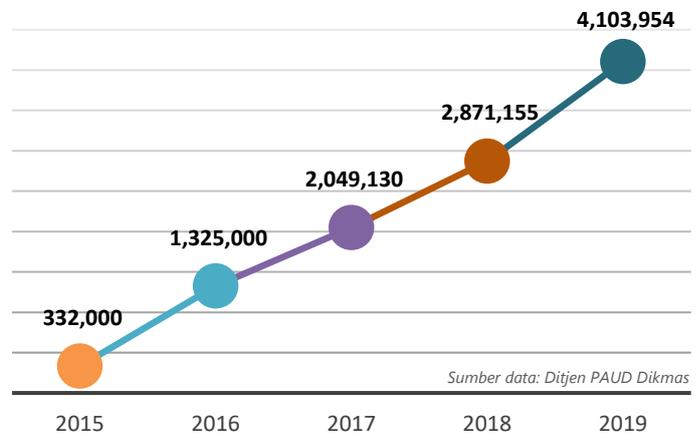
2. Program PPK melalui pendekatan Kebudayaan



SS2

Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan

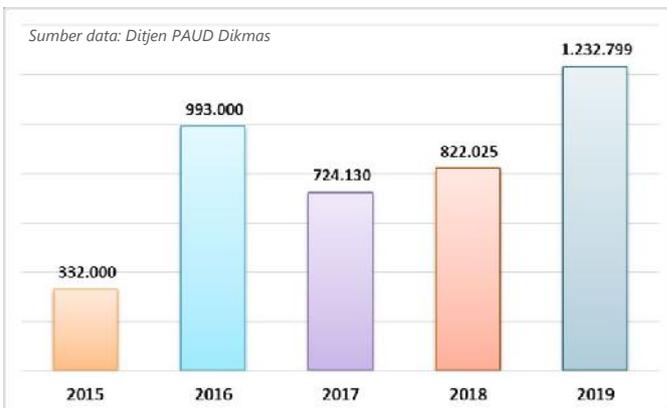
Partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2015-2019 tercatat **4.103.954** keluarga menerapkan pendidikan keluarga.



IKSS 2.1: Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga

Target 2019	= 4.425.000
Realisasi	= 4.103.954
% Capaian	= 92,74%

Target Akhir Renstra 2019 = 4.425.000
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 92,74%



Orang tua yang menerapkan pendidikan keluarga di rumah, satuan pendidikan, dan masyarakat (capaian tahunan)

Tren orang dewasa yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga mengalami peningkatan, walaupun jumlah tersebut belum sesuai target yang telah ditetapkan. Tren peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran orangtua dan masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mendidik anak sehingga antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan keluarga semakin tinggi.



Partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan keluarga

Tren peningkatan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pengunjung laman dan media sosial Sahabat Keluarga. Sehingga pada tahun 2019 laman dan media sosial Sahabat Keluarga memperoleh apresiasi peringkat ke-tiga untuk kategori Content Marketing di lingkungan pemerintah dari pegiat/ pemerhati laman dan medsos ICMA (*Indonesian Content Marketing Award*).



Direktur Pembinaan pendidikan Keluarga menerima penghargaan ICMA

Upaya/Program yang dijalankan:



Pertemuan orang tua dengan wali kelas



Kelas Orangtua



Gelar karya akhir tahun



Kelas Inspirasi

1. Bimbingan teknis pendidikan keluarga

- a. 70 kabupaten/kota, sebanyak 3.500 satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan PNF), terdiri dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas/penilik, komite sekolah dan mitra serta pegiat pendidikan keluarga;
- b. 19 Provinsi, sebanyak 1.490 satuan pendidikan (SMA, SMK, dan SLB), terdiri dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas/penilik, komite sekolah, dan mitra serta pegiat pendidikan.
- c. 70 kabupaten/kota, dengan sasaran tenaga pendidik dan kependidikan, mitra serta orangtua/wali memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga pada 15.214 satuan pendidikan;
- d. 20 lembaga, dengan sasaran tokoh masyarakat, tokoh agama, pegiat pendidikan, orang tua, anak dan remaja. Sehingga terdapat 1.000 keluarga memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga;
- e. 60 kabupaten/kota, sosialisasi dalam rangka penurunan angka *stunting* (tubuh pendek/kerdil), sasaran 11.220 desa dan kelurahan. Total peserta sebanyak 23.040 keluarga mampu menerapkan pendidikan keluarga.

2. Sosialisasi dan publikasi konten pendidikan keluarga melalui laman
(<https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/>)

- a. Sampai dengan Desember 2019, laman telah dikunjungi oleh 2.520.993 pengunjung;
- b. Sosialisasi dan publikasi konten pendidikan keluarga melalui media sosial:

- Instagram (jumlah pengikut 18.847 dan jumlah konten 1.051)
- Facebook (jumlah pengikut 14.057 dan jumlah konten 1.472)
- Twitter (jumlah pengikut 5.643 dan jumlah konten 3.550)
- Youtube (jumlah subscriber 5.216 dan jumlah konten 191)



3. Bimbingan Calon Fasilitator (BCF)

Pendidikan Keluarga secara daring dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang dari seluruh Indonesia.

4. Gerakan Nasional Orang tua Membacakan Buku (GerNas Baku)

Ditujukan untuk orangtua yang memiliki anak usia PAUD.

5. Apresiasi Pendidikan Keluarga

Apresiasi diberikan kepada Orang Tua Hebat, Sekolah Sahabat Keluarga, dan Pegiat Pendidikan Keluarga.

Rincian Capaian Orang Dewasa Berpartisipasi Aktif dalam Pendidikan Keluarga pada 2019

No.	Kegiatan/Intervensi	Total
1	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang PAUD	2.800
2	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang SD	436.800
3	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang SMP	218.400
4	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang SMA	44.700
5	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang SMK	44.700
6	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang PKBM	700
7	Bimtek Pendidikan Keluarga jenjang SLB	4.470
8	Penguatan pelaku	15.214
9	Bimtek Pendidikan Keluarga oleh ormit	1.000
10	Stunting 60 KK	22.440
11	Pendampingan 1000 HPK 100 KK	414.260

No.	Kegiatan/Intervensi	Total
12	<i>Pokja pendidikan keluarga</i>	14.504
13	<i>PTPPO</i>	2.000
14	<i>Pelatihan calon fasilitator Pendidikan keluarga</i>	210
15	<i>Bimtek Pendidikan keluarga untuk Ormit</i>	630
17	<i>Lembaga Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk Intervensi Permasalahan Keluarga Lainnya</i>	4.250
18	<i>Peningkatan kapasitas orang tua</i>	2.481
19	<i>Gernas Baku</i>	3.120
20	<i>Pelatihan calon fasilitator 1000 HPK</i>	120
	Jumlah	1.232.799

Tantangan/Permasalahan yang Dihadapi

1. Implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan pendidikan keluarga belum optimal pada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan di daerah.
2. Kebijakan pemangku kepentingan di daerah belum selaras dengan kebijakan pusat terkait penyelenggaraan pendidikan keluarga.
3. Sampai dengan tahun 2019 (tahun ke-5) belum seluruh kabupaten/kota yang terintervensi pendidikan keluarga. Sebanyak 134 kabupaten/kota atau 26% belum terintervensi dari total 514 kabupaten/kota.

Permasalahan yang dihadapi relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena program utama yang dilaksanakan sama dengan tahun sebelumnya, perbedaannya hanya pada daerah sasaran.

Tantangan ke depan adalah meyakinkan pemangku kepentingan (kementerian/lembaga terkait, dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, kelompok kerja (pokja) pendidikan keluarga untuk menerapkan manajemen terbaik serta orientasi kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsi pendampingan dan pembinaan agar mampu meningkatkan diri dalam penerapan pendidikan keluarga.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

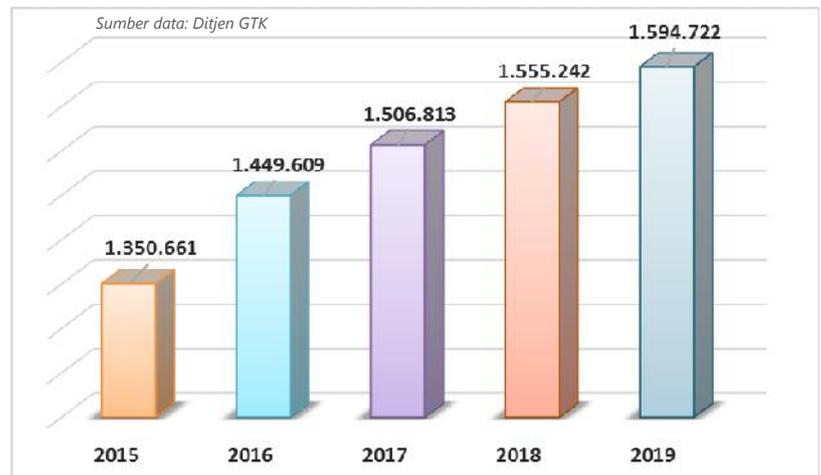
1. Sosialisasi implementasi NSPK melalui saluran komunikasi yang dimiliki dan telah disiapkan instrumen NSPK untuk satuan pendidikan.
2. Perluasan bentuk praktik baik pendidikan keluarga melalui laman dan media sosial "Sahabat Keluarga".
3. Perluasan akses layanan pendidikan keluarga secara bertahap pada 134 kabupaten/kota yang belum terintervensi.
4. Peningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan di daerah sehingga program/kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan keluarga tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

SS3

Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan

Jumlah guru bersertifikat pendidik 2015-2019

Capaian profesionalisme guru dibuktikan dengan meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat pendidik sebanyak 1.594.722 guru pada tahun 2019



IKSS 3.1 : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Target 2019 = 77,20%
Realisasi = 54,56%
% Capaian = 70,67%

Target Akhir Renstra 2019 = 77,20%
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 70,67%

*) terjadi perubahan cara perhitungan guru profesional dengan keluarnya Permendikbud No 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016

Guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang mengikuti, menuntaskan dan lulus Pelatihan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan perubahan pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 yang berbunyi "Bagi Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-I/D-IV tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru" dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.



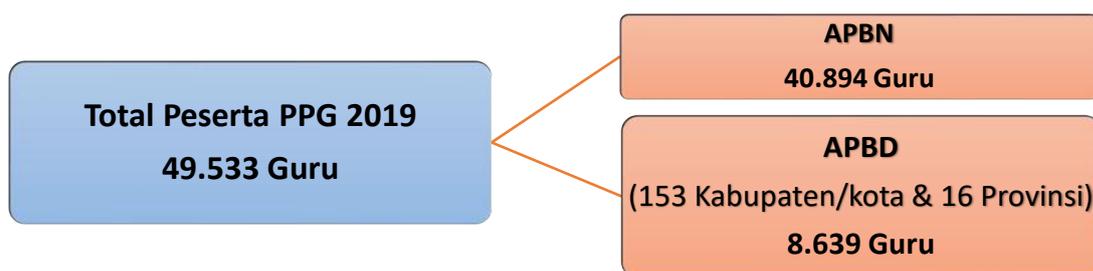
Peserta PPG tahun 2019 sebanyak 49.533 orang yang pelaksanaannya tersebar di 61 LPTK dengan perincian sebanyak 40.894 orang dibiayai oleh APBN dan sisanya dibiayai oleh APBD dan yang dinyatakan lulus pada akhir Desember 2019 sebanyak 39.480 orang.

Total guru yang lulus sertifikasi sampai dengan tahun 2019 adalah 1.594.722 orang atau mencapai 54,56% dari *baseline* jumlah guru pada Renstra 2015–2019 sebanyak 2.922.826 orang. Jika disandingkan dengan target akhir Renstra (2015-2019) sebesar 77,20%, capaian tersebut belum mencapai target karena baru mencapai 70,67%. Tidak tercapainya target Renstra tersebut antara lain disebabkan:

1. terjadinya perubahan pola sertifikasi menjadi PPG yang mengakibatkan unit *cost*-nya lebih besar dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya sehingga target sasaran peserta menurun sedangkan anggaran yang dialokasikan tetap;
2. adanya peningkatan kualitas penilaian dengan memasukkan penilaian atas uji kinerja melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sehingga tingkat kelulusan program sertifikasi menurun; dan
3. guru yang bisa mengikuti PPG adalah guru tetap yang berstatus kepegawaian PNS dan non-PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah serta guru tetap yayasan yang diangkat oleh yayasan. Hal ini menyebabkan masih banyak guru yang berstatus guru tidak tetap di sekolah negeri dan swasta yang tidak bisa mengikuti PPG.

Upaya yang dilakukan

1. Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) memperbesar daya tampung peserta PPG.
2. Kemendikbud melalui Ditjen GTK menaikkan dua kali lipat sasaran peserta PPG dibandingkan sasaran peserta PPG pada APBN tahun 2018. Selain dari Kemendikbud, pemerintah daerah juga menyambut baik dengan ikut melakukan pembiayaan pendidikan sertifikasi guru melalui dana APBD.



3. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru dengan mempertimbangan kondisi geografis dan social kultural di seluruh tanah air Indonesia melalui pola *blended learning/hybrid learning*, yaitu model pembelajaran yang menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur pendidikan jarak jauh yang menerapkan pembelajaran melalui jaringan (*online learning*) yang dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka.

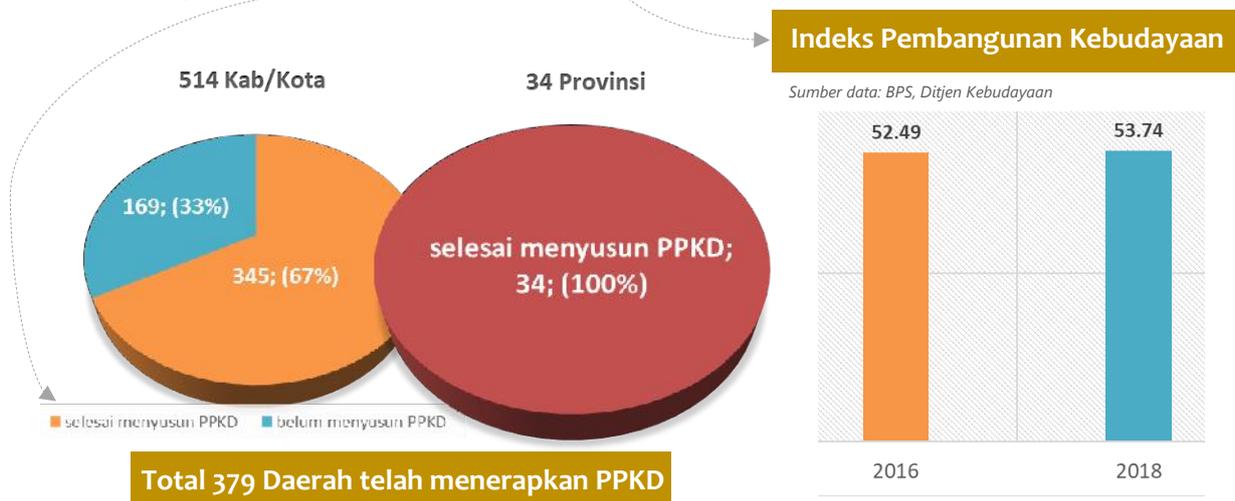
Bagi guru-guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus, layanan pendidikan profesi tidak mungkin menggunakan model *blended learning* dalam jaringan. Layanan

dilaksanakan dengan menggunakan model belajar mandiri dan tatap muka yang secara substansi setara dengan program dalam jaringan melalui Pembekalan Guru Daerah Khusus (PGDK).

SS4

Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan

Mutu tata kelola kebudayaan sampai dengan tahun 2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terlihat dari makin meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan makin banyaknya daerah yang berkomitmen dalam peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yaitu dengan menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).



IPK sebesar 53,74 menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target akhir Renstra 2019
			Target	Realisasi	%	
IKSS4.1 Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan	*	204	159	175	110%	159
IKSS4.2 Indeks pembangunan kebudayaan nasional	**	**	54,6	53,74	98%	54,6

*) Indikator baru ada di tahun 2018

**) Realisasi tidak diukur, karena perhitungan 3 tahun sekali.

IKSS 4.1 “Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan”

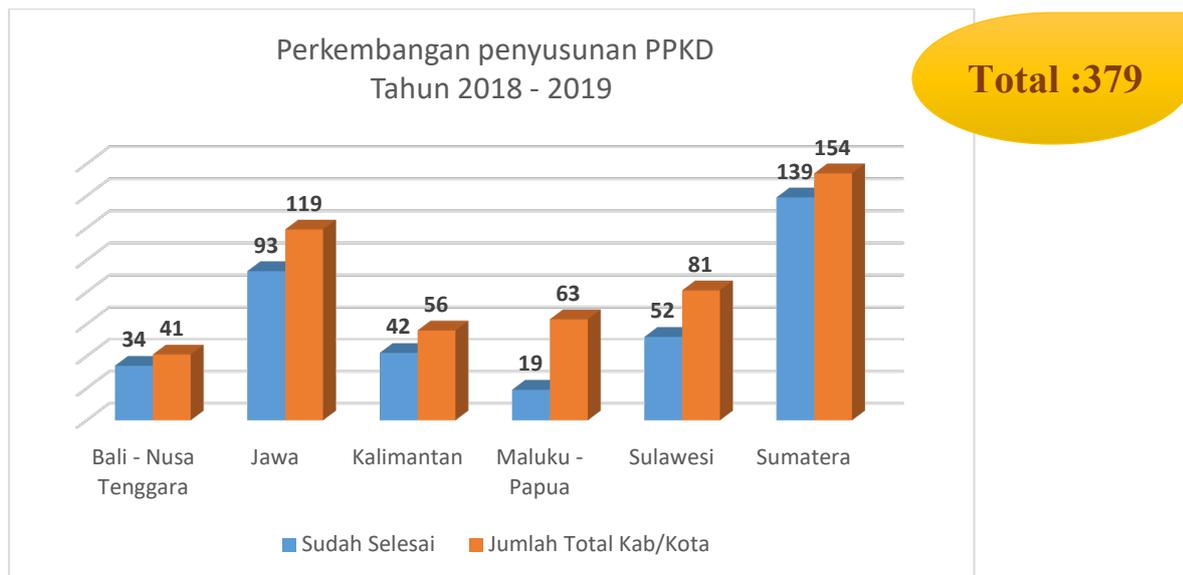
Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2018 seiring dengan perubahan Rencana Strategis Kemendikbud 2015-2019. Realisasi kinerja ini didukung dengan kegiatan strategis kebudayaan, yaitu penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah, dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Penyusun PPKD adalah Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli. Unsur-unsur PPKD adalah:

- identitas keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- identifikasi SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan.
- identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan
- identifikasi masalah Pemajuan Kebudayaan
- rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.

Sampai dengan tahun 2019, total sebanyak **379** pemerintah daerah yang telah selesai menyusun PPKD.

	Jumlah	2018	2019
Kabupaten/kota sudah selesai menyusun PPKD (Total 514 Kabupaten/kota)	345 (67%)	173	172
Provinsi sudah selesai menyusun PPKD (Total 34 Prov)	34 (100%)	31	3

Berikut progress penyusunan PPKD dari tiap regional Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Maluku-Papua, Sulawesi, dan Sumatera tahun 2018-2019. *(lihat grafik)*



Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah:

1. kurangnya SDM di daerah yang memahami teknis penyusunan PPKD dan
2. Kurangnya kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan komunitas budaya.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain peningkatan optimalisasi sosialisasi ke daerah tentang peraturan teknis penyusunan PPKD.

Dokumen PPKD merupakan dokumen yang penting di bidang kebudayaan khususnya dalam rangka perencanaan pembangunan kebudayaan di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat, PPKD merupakan dasar untuk menyusun rencana Induk Pembangunan Kebudayaan yang akan menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Di tingkat daerah, PPKD menjadi referensi bagi daerah untuk mengambil kebijakan bidang kebudayaan dengan mengacu pada kondisi objek pemajuan kebudayaan, SDM, sarana dan prasarana yang ada di daerah. Potensi maupun permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka pemajuan kebudayaan dan menjadi rekomendasi yang telah dituliskan dalam PPKD dapat masuk dalam dokumen perencanaan di daerah (RPJMD/RKPD).

IKSS 4.2 “Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional”

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja tata kelola dalam pemajuan kebudayaan. Penyusunan IPK juga menjadi salah satu bentuk gotong-royong dalam upaya pemajuan kebudayaan, karena dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Badan Pusat Statistik.

Sejarah penyusunan IPK sebenarnya telah diinisiasi sejak tahun 2013 dengan hasil perhitungan IPK tahun 2015 yang disusun pada tahun 2016, hingga akhirnya dimasukkan dalam salah satu IKSS. Namun dibandingkan dengan hasil perhitungan IPK tahun 2018 yang disusun pada tahun 2019, kedua indeks tersebut tidak dapat diperbandingkan setara (*apple-to-apple*) karena terdapat perbedaan mendasar dalam konsep penyusunannya.

Penyusunan IPK 2015 mengacu pada Pilar Pembangunan Kebudayaan yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan yang disusun pada tahun 2013. Saat itu, belum ada landasan hukum lebih tinggi yang secara spesifik membahas tentang kebudayaan. Itulah sebabnya konsep IPK 2015 yang tersusun atas 8 Dimensi dan 19 Indikator terlihat lebih fokus mengukur capaian dari kebudayaan itu sendiri. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, IPK diproyeksikan menjadi alat ukur untuk mendukung capaian pembangunan tata kelola kebudayaan di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, penyusunan IPK 2018 yang terdiri atas 8 Dimensi dan 31 Indikator terlihat lebih fokus mengukur usaha pemerintah dalam mengatur tata kelola kebudayaan, yang

terlihat dalam aktivitas masyarakat sehari-hari dalam menerapkan unsur pemajuan kebudayaan.

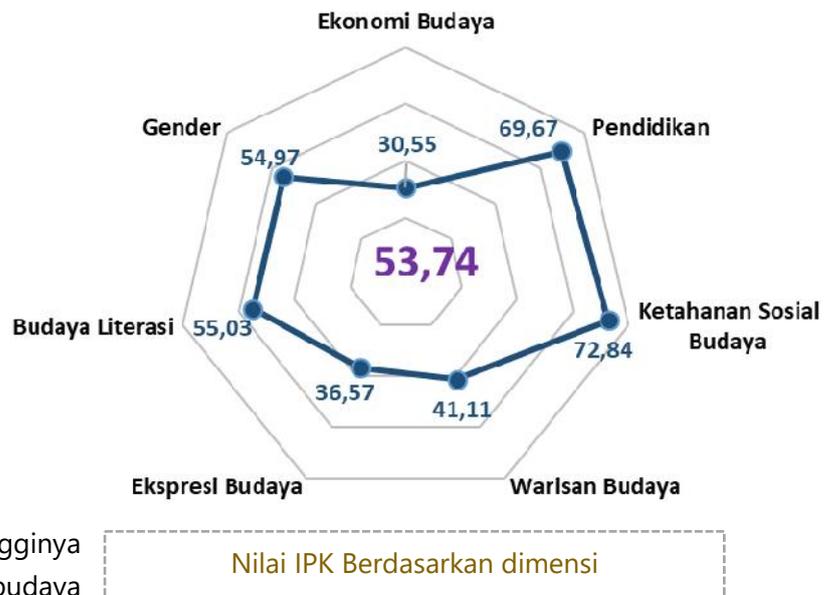
Adapun satu dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu dimensi Tata Kelola Budaya tidak dapat diukur karena belum adanya kepastian konsep dan indikator, maupun sumber data yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi tata kelola budaya. Hingga saat ini masih dilakukan pengembangan konsep dan indikator atas dimensi tersebut bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

Perbedaan mendasar lainnya dalam penyusunan IPK 2015 dan 2018 terletak pada interpretasi hasil IPK untuk tingkat provinsi. Pada IPK 2018, nilai dimensi dan indikator di tingkat provinsi tidak digunakan sebagai perbandingan capaian bidang kebudayaan antar provinsi. Seluruh nilai dimensi dan indikator masing-masing provinsi yang dibandingkan dengan nilai dimensi dan indikator tingkat nasional, sehingga apapun capaian nilai IPK 2018 di tingkat provinsi (beserta usaha perbaikannya) diarahkan agar setidaknya mendekati atau bahkan melebihi capaian tingkat nasional dalam penghitungan IPK yang akan datang.

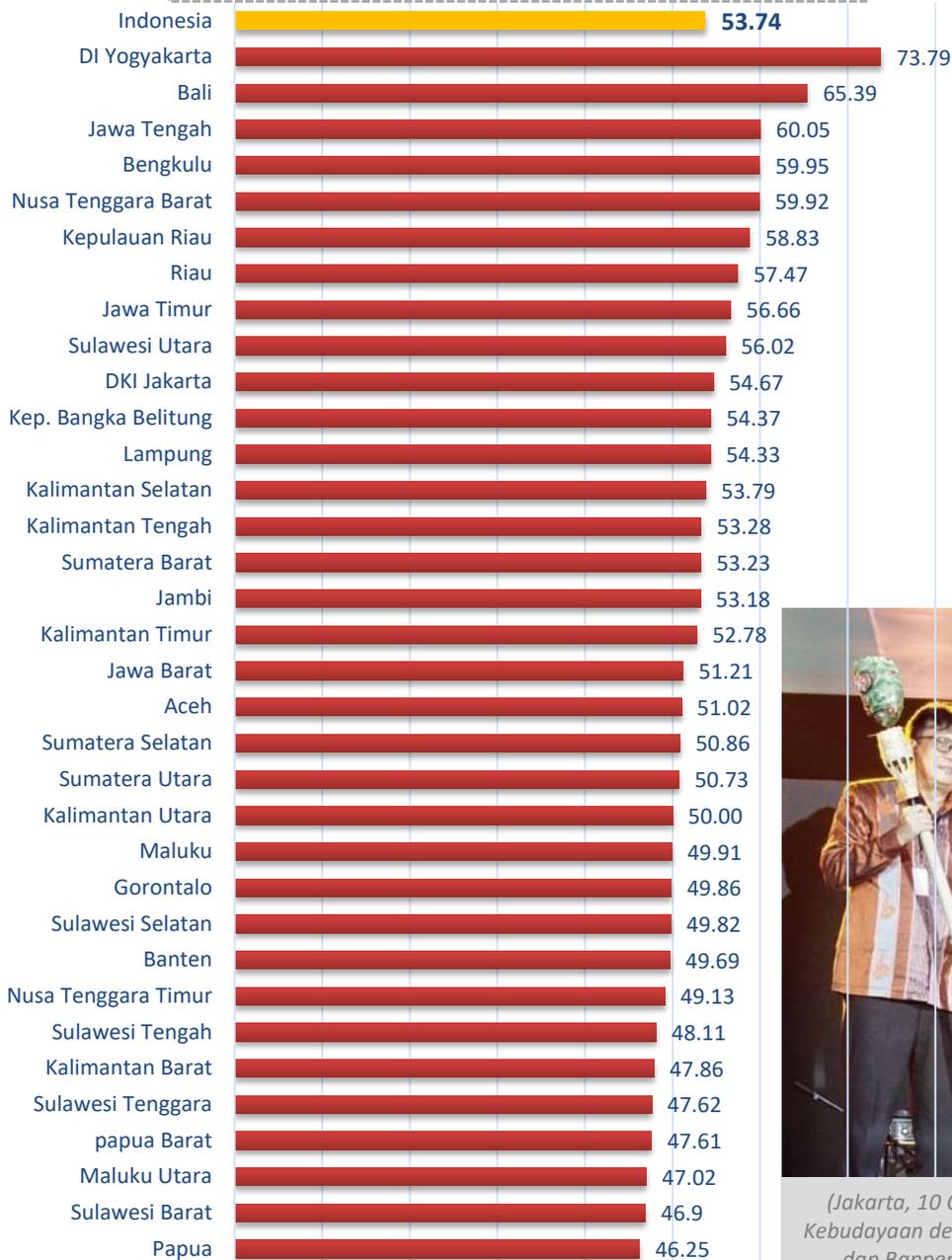
Berdasarkan penghitungan IPK 2018 yang disusun tahun 2019 sebagaimana yang tersaji pada grafik di samping, capaian IPK Indonesia berada pada nilai 53,74 dari rentang nilai 0 sampai 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan dimensi yang dihasilkan, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dimensi satu dengan lainnya. Dua dimensi dengan hasil tertinggi adalah dimensi ketahanan nasional (72,84) dan dimensi pendidikan (69,67). Tingginya nilai pada dimensi ketahanan sosial budaya menunjukkan cukup baiknya kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Sedangkan dimensi ekonomi budaya menghasilkan nilai indeks terendah (30,55) yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Untuk meningkatkan IPK nasional, salah satunya melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum dan Taman Budaya. Melalui DAK tersebut diharapkan kualitas keberadaan museum dan taman budaya semakin meningkat. Pada tahun 2019 DAK Museum dan Taman Budaya disalurkan kepada 111 Museum tingkat provinsi dan kabupaten dan 20 Taman Budaya. DAK tersebut merupakan DAK pertama kali.



Nilai IPK Berdasarkan Provinsi



(Jakarta, 10 Oktober.2019) Direktur Jenderal Kebudayaan dengan didampingi pejabat dari BPS dan Bappenas melakukan peluncuran IPK

Sementara itu, jika dilihat nilai IPK 2018 menurut provinsi sebagaimana yang tersaji pada grafik di atas, terdapat 13 provinsi yang menghasilkan nilai IPK di atas angka nasional, sedangkan sisanya berada di bawah angka nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPK tertinggi adalah DI Yogyakarta (73,79), Bali (65,39) dan Jawa Tengah (60,05). Sebaliknya, tiga provinsi dengan capaian IPK terendah adalah Papua (46,25), Sulawesi Barat (46,90), dan Maluku Utara (47,02).

Akan tetapi, jika diperhatikan lebih saksama, meskipun Bali maupun Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi dengan capaian IPK tertinggi, nyatanya kesenjangan antara

kedua provinsi ini terhadap D.I. Yogyakarta cukup tinggi. Berkaca dari kondisi ini, terlihat bahwa sentralisasi pembangunan kebudayaan masih terpusat di wilayah barat dan tengah Indonesia, sementara wilayah timur masih mengalami ketertinggalan dan membutuhkan akselerasi pembangunan kebudayaan yang berkesinambungan.

Untuk meningkatkan nilai IPK dari tahun 2016, program yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah pencatatan cagar budaya dan warisan budaya takbenda. Hal ini disebabkan kedua pencatatan tersebut akan berpengaruh pada salah satu dimensi dalam IPK yaitu dimensi Warisan Budaya yang memiliki bobot terbesar dalam IPK.



Beberapa catatan dan kendala yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk mencapai target IPK yang ditetapkan adalah kurangnya

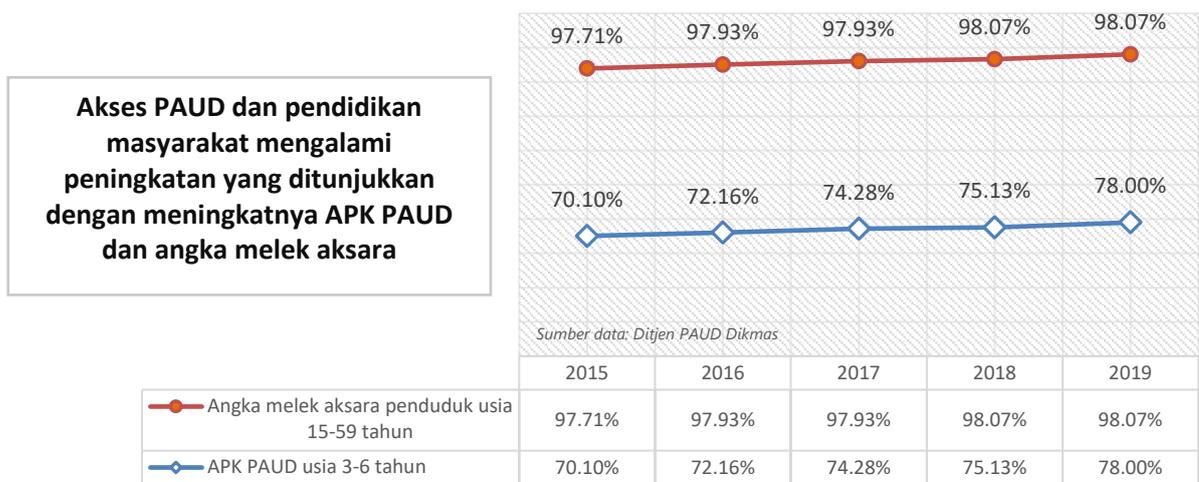
- kerja sama lintas sektor di tingkat pusat untuk meningkatkan capaian dimensi dan indikator IPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan;
- pemahaman serta kerja sama dengan pemerintah daerah agar turut serta meningkatkan capaian dimensi dan indikator IPK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing; dan
- penyempurnaan konsep dimensi dan indikator IPK, khususnya dalam Dimensi Tata Kelola Budaya sebagai satu-satunya dimensi yang tidak dapat dihitung dalam IPK 2018 serta Dimensi Ekonomi Budaya yang indikatornya masih kurang relevan secara substansial.

Untuk menghadapi kendala tersebut, rencana antisipasi yang telah dipersiapkan Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain sebagai berikut:

- memastikan pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) sebagai acuan pembagian tugas dan wewenang pemajuan kebudayaan lintas sektor. Sebagai catatan, RIPK telah selesai disusun sepanjang tahun 2019 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- melakukan sosialisasi hasil IPK 2018 kepada pemerintah daerah Provinsi di Indonesia, sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan kebudayaan berdasarkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi yang telah disusun untuk mendukung capaian IPK Provinsi.

- c. melakukan kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik untuk menyempurnakan konsep IPK agar semakin kuat dan relevan untuk mengukur tata kelola pemajuan kebudayaan.

SS5 Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota



IKSS 5.1 : APK PAUD usia 3-6 tahun

Target 2019 = 78,70%

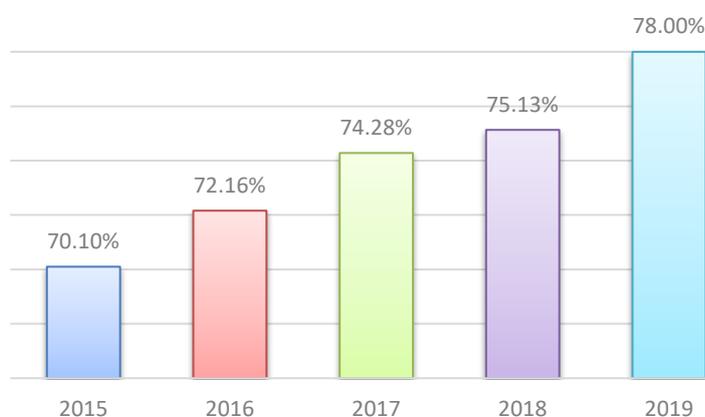
Realisasi = 78%

% Capaian = 99,11%

Target Akhir Renstra 2019 = 78,70%

% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 99,11%

TREN CAPAIAN APK PAUD 2015-2019



Upaya pemerintah untuk meningkatkan APK PAUD anak usia 3-6 tahun pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. pemberian BOP kepada 6.392.337 anak;
- b. pemberian BOP untuk anak berkebutuhan khusus kepada 6.500 anak;
- c. pemberian bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) kepada 200 lembaga; dan
- d. lembaga PAUD yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T kepada 625 lembaga

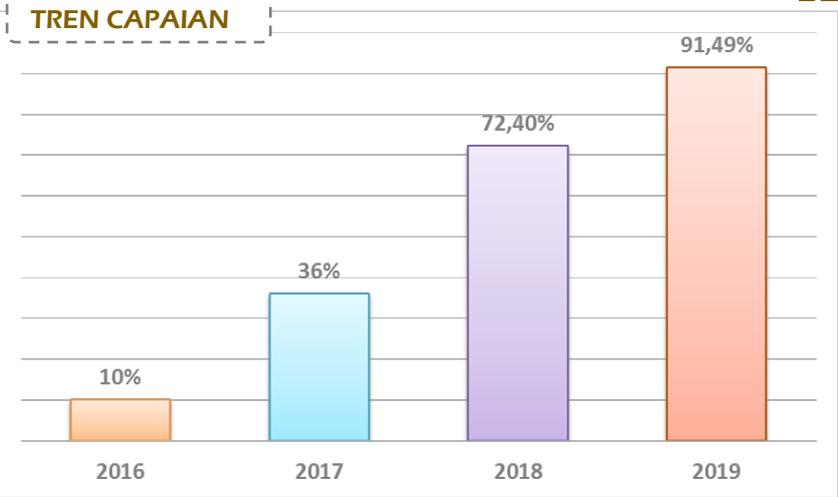
Kendala meningkatkan APK PAUD

1. Sebanyak 70% anak usia 6 tahun telah memasuki jenjang pendidikan dasar berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2015.
2. Data anak PAUD belum semuanya terjaring dalam DAPODIK PAUD dan Dikmas disebabkan kendala geografis dan akses internet belum sampai daerah-daerah terpencil, sementara banyak lembaga PAUD sudah ada pada tingkat kecamatan dan desa sebagai hasil dari program satu desa satu PAUD.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan akses layanan PAUD antara lain:

1. mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai PP No. 2 Tahun 2018 mengenai SPM pendidikan, dan
2. mendorong adanya satu data PAUD yang sudah dimulai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kemendikbud sendiri pada tahun ini dan sesuai dengan *road map* akan memulai satu data PAUD bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

IKSS 5.2 : Kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	Target 2019 = 70%	Target Akhir Renstra 2019 = 70% % Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 130,7%
	Realisasi = 91,49%	
	% Capaian = 130,7%	



Program PAUD terpadu pembina holistik integratif dimulai pada 2016. Sampai dengan tahun 2019 sebanyak 470 (91,4%) Kabupaten/kota telah memiliki PAUD terpadu pembina holistik integratif. Capaian tersebut meningkat dari

tahun sebelumnya yang baru mencapai 372 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota.

Pencapaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan 17% yang disebabkan pada tahun 2018 mulai kembali digalakkan tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2013. Sementara itu, masih terdapat 44 kabupaten dan kota yang belum memiliki lembaga PAUD terpadu Pembina holistic integratif. (lihat tabel)

44 Kab/Kota yang Belum Memiliki Lembaga PAUD Terpadu Pembina Holistik Integratif Tahun 2019		
No	Provinsi	Kab/Kota
1	Aceh	Kab. Nagan Raya, Kab. Simeulue
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah
3	Sumatera Barat	Kab. Solok
4	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara
5	Banten	Kab. Lebak
6	Jawa Barat	Kab. Pangandaran
7	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar, Kab. Toraja Utara
8	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara
9	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan, Kab. Wakatobi
10	Papua	Kab. Boven Digoel, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Jaya Wijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab Mappi, Kab. Membramo Raya, Kab. Membramo Tengah, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Nabire, Kab. Nduga, Kab. Paniai, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sarmi, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo
11	Papua Barat	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrau, Kab. Teluk Wondama, Kota Sorong

Pencapaian indikator ini didukung oleh program:

1. Pemberian bantuan inisiasi anak 0–3 tahun kepada 200 lembaga PAUD di tahun 2019

Bantuan difokuskan untuk pelayanan PAUD yang bekerja sama dengan Posyandu sehingga tidak hanya kebutuhan akan pendidikan, tetapi juga pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi.

2. Pemberian makanan sehat kepada 1000 lembaga PAUD

Program ini dilakukan di 160 kabupaten/kota yang merupakan daerah *stunting* ditambah 34 kabupaten/kota yang bukan daerah *stunting*. Pemberian bantuan ini diharapkan agar anak-anak yang berada di daerah *stunting* tidak kembali ke keadaan *stunting*.

Kendala dan permasalahan

1. Banyak kabupaten/kota belum mempunyai gugus tugas PAUD HI sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD HI.
2. Bentuk pelaksanaan PAUD HI di lapangan belum terstruktur dengan jelas karena melibatkan banyak unsur lain, seperti dinas kesehatan, dinas pencatatan penduduk sipil, dinas sosial, dinas BKKBN, dan yang lainnya. Hal itu yang menyebabkan hanya sedikit lembaga yang mempunyai program PAUD HI berada dalam satu tempat yang sama. Sementara itu, untuk lembaga-lembaga PAUD lainnya pelaksanaan PAUD HI telah diimplementasikan dalam program pembelajaran sehari-hari dalam hal perlindungan,

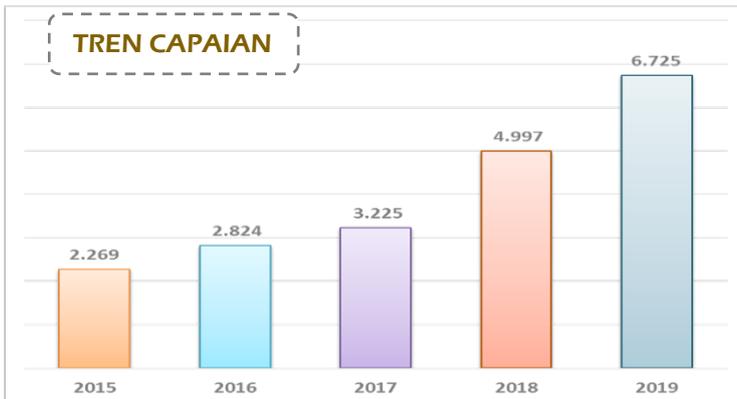
pengasuhan, dan kesehatan gizi. Mereka bekerjasama serta berkoordinasi dengan Puskesmas serta BKB (Bina Keluarga Balita).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI setelah lima tahun dikeluarkannya Perpres No. 60 tahun 2013 tentang PAUD HI. RAN disusun oleh BAPPENAS bekerja sama dengan kementerian terkait dan akan dilegalitaskan oleh Kemenko PMK sebagai ketua Pokja PAUD HI. Harapannya RAN akan mendorong pelaksanaan di lapangan menjadi lebih jelas dan terarah.

IKSS 5.3 : Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi)

Target 2019 = 7.871
Realisasi = 6.725
% Capaian = 85,44%

Target Akhir Renstra 2019 = 7.871
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 85,44%



Kemendikbud selama kurun waktu 2015-2019 telah menyiapkan 6.725 lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) atau 41% dari total LKP pada 34 provinsi di Indonesia. Untuk tahun 2019 sendiri Kemendikbud mempersiapkan 1.728 LKP yang telah siap di akreditasi.

Peningkatan LKP yang siap diakreditasi juga diiringi dengan peningkatan LKP yang telah terakreditasi. Rincian LKP yang telah terakreditasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tahun	LKP			Terakreditasi	Keterangan
	A	B	C		
2008	-	-	-	177	2008-2015 Sistem akreditasi LKP hanya mengenal dua predikat yaitu "terakreditasi" dan "tidak terakreditasi"
2009	-	-	-	198	
2010	-	-	-	147	
2011	-	-	-	287	
2012	-	-	-	189	
2013	-	-	-	286	
2014	-	-	-	191	
2015	66	241	318	71 (sistem lama) dan 625 (sistem baru)	Tahun 2015 merupakan masa transisi dari sistem lama ke sistem baru, sehingga pada tahun tersebut digunakan dua sistem secara bersamaan

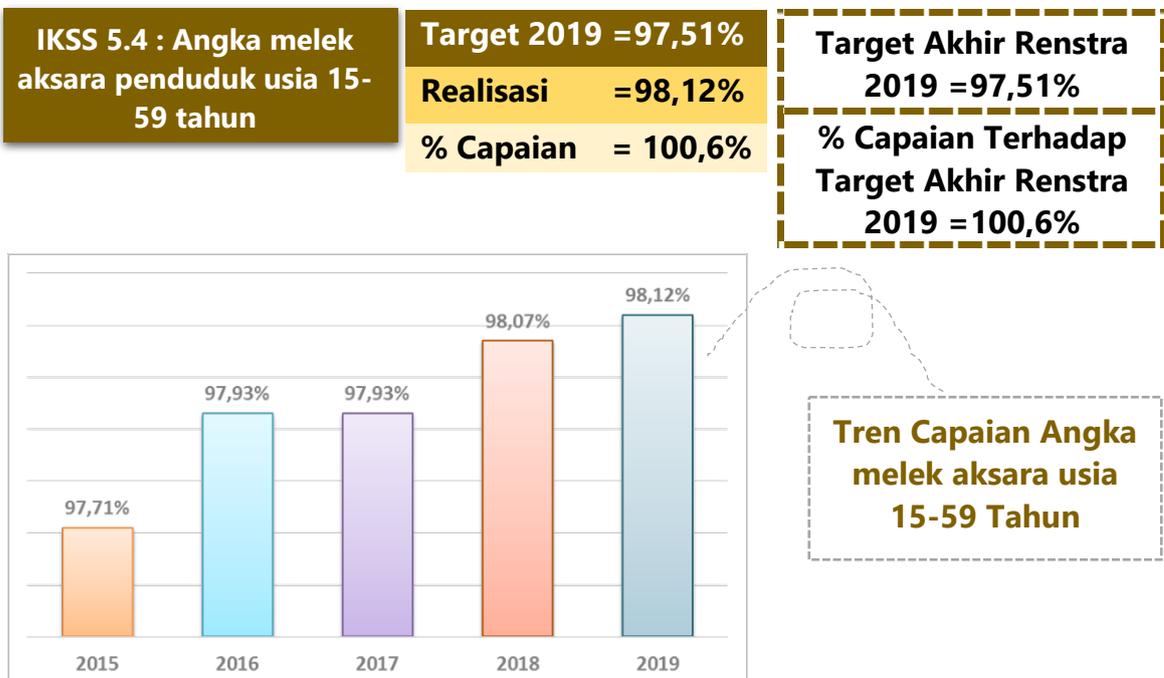
Tahun	LKP				Keterangan
	A	B	C	Terakreditasi	
2016	77	217	254	548	2015-2019 Sistem akreditasi LKP berubah dengan predikat akreditasi "A"; "B"; dan "C"
2017	38	183	228	449	
2018	100	271	227	598	
2019	57	427	416	900	
Total				4.666	

Sumber: BAN PNF

Program yang dilaksanakan meliputi

1. bantuan sarana praktik kepada **107** LKP,
2. pemberian penghargaan bagi **10** LKP berprestasi dan **60** peserta didik berprestasi,
3. validasi lembaga kursus dan pelatihan **1.808** LKP,
4. pembentukan **3** lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK),
5. pembentukan **65** Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan
6. bimbingan teknis peningkatan manajemen mitra kursus dan pelatihan **180** lembaga.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu masih sedikitnya lembaga kursus dan pelatihan yang mengisi atau memperbaharui data pada aplikasi Dapodik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah antisipasi yang diambil berupa sosialisasi akan pentingnya data pada aplikasi Dapodik serta pentingnya akreditasi melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada lembaga kursus dan pelatihan di wilayah kerja masing-masing.



Catatan : Data 2015-2018 diperoleh dari BPS, sedangkan data 2019 diperoleh dari perhitungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan karena data dari BPS belum rilis.



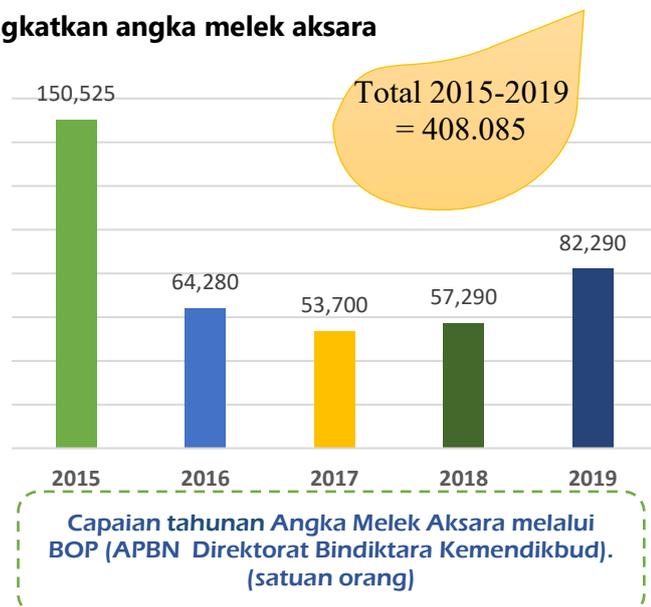
Sesuai dengan data BPS (per Agustus 2018), penduduk usia 15–59 tahun berjumlah 169.858.670 orang. Dengan perbandingan data tersebut berarti ada sebanyak 166.665.327 (98,12%) penduduk usia 15–59 tahun yang telah melek aksara dan masih terdapat 3.193.342 (1,88%) orang yang masih tuna aksara.

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 6 provinsi yang memiliki persentase buta aksara tertinggi (zona merah) di atas 4%, yaitu Papua sebesar 22,88% (484.592 orang), Nusa Tenggara Barat sebesar 7,51% (227.888 orang), Nusa Tenggara Timur sebesar 5,24% (173.466 orang), Sulawesi Barat sebesar 4,64% (39.098 orang), Sulawesi Selatan sebesar 4,63% (252.539 orang), dan persentase terendah adalah Kalimantan Barat sebesar 4,21% (133.988 orang).

Upaya/Program Pemerintah untuk meningkatkan angka melek aksara

1. Bantuan BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar

Pada tahun 2019 ini telah dibelajarkan sebanyak 82.290 orang untuk menjadi melek aksara yang berasal dari pendanaan APBN. Sementara itu dalam pelaksanaannya, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar juga



- didukung oleh anggaran dari APBD serta swadaya masyarakat.
2. **Gerakan Indonesia Membaca (GIM)** yang diikuti oleh kegiatan kampung literasi.
 3. peningkatan sarana bagi **Taman Bacaan Masyarakat (TBM)** untuk kegiatan literasi masyarakat.

Fokus indikator ini terletak pada peningkatan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan angka melek aksara antara lain sebagai berikut.

1. Adanya keterlambatan penginputan data peserta didik baik ke Dapodik PAUD dan Dikmas maupun ke SIBOPAKsara.
2. Adanya penyampaian usulan dari dinas kabupaten/kota yang sering terlambat, bahkan ada yang tidak mengajukan usulan.
3. Tidak semua data pendukung buta aksara yang diusulkan dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK).
4. Masih adanya kebiasaan/budaya di daerah terpencil yang suka berpindah-pindah tempat.

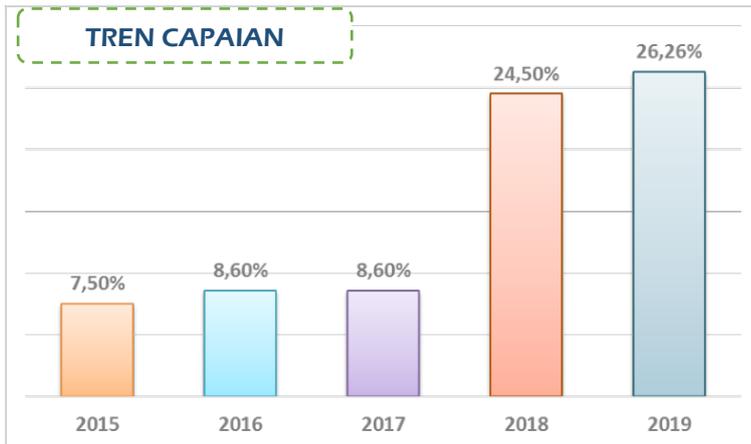
Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 tercapai secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. pendampingan operasionalisasi aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas dan SIBOPAKsara,
2. pembuatan tutorial mekanisme pengusulan aplikasi BOP keaksaraan,
3. koordinasi dan komunikasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota,
4. relokasi BOP ke daerah lain yang mengajukan usulan, dan
5. penggantian warga belajar (WB) yang tidak memiliki NIK dengan yang memiliki NIK (untuk daerah Papua NIK dapat diganti dengan surat keterangan dari distrik setempat),
6. koordinasi dengan kepala suku untuk menanyakan keberadaan dan kelanjutan pembelajaran.

IKSS 5.5 : Kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)''.

Target 2019	= 15,60%
Realisasi	= 26,26%
% Capaian	= 168,3%

Target Akhir Renstra 2019
= 15,60%
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 168,3%



Kabupaten/kota yang memiliki minimal satu lembaga masyarakat rujukan sampai tahun 2019 sebanyak 135 kabupaten/kota atau 26,26% dari total 514 kabupaten/kota. Dengan capaian tersebut maka target akhir Renstra yang sebesar 15,6% (81 kabupaten/kota) telah tercapai,

bahkan capaiannya melebihi target sebesar 9,5% (54 kabupaten/kota).

Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan

1. pemberian bantuan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh dan untuk masyarakat dengan prioritas bagi kabupaten/kota yang belum memiliki lembaga masyarakat rujukan, dan
2. bantuan sarana praktik kepada LKP dan SKB yang digunakan dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga membentuk LKP tersebut menjadi lembaga masyarakat rujukan.

Walaupun target kinerja telah tercapai, bahkan melebihi target, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut.

- a. Proposal yang diajukan oleh LKP terlambat sehingga pelaksanaan program mundur dari jadwal semula.
- b. LKP yang mengkases bantuan sarana praktik pembelajaran kursus dan pelatihan rata-rata hanya terakreditasi C.

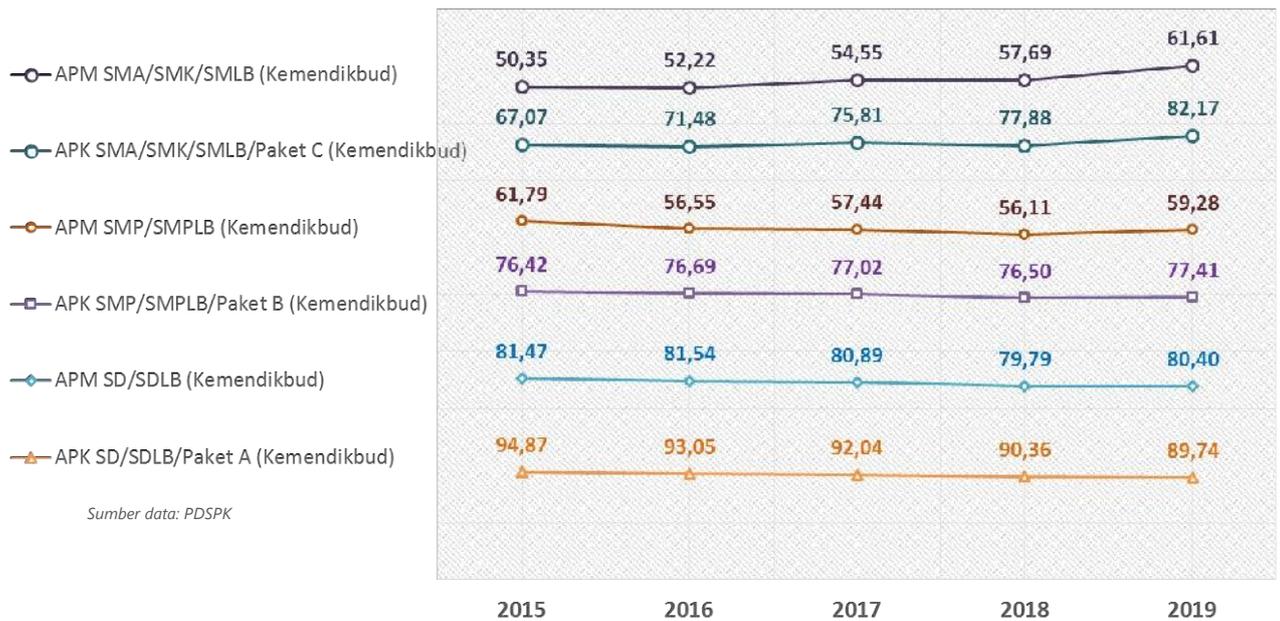
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. penyebaran petunjuk teknis melalui, dan
- b. sosialisasi melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.

SS6

Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah

Secara umum, sampai dengan tahun 2019 angka partisipasi mengalami kenaikan kecuali angka partisipasi kasar jenjang sekolah dasar yang mengalami koreksi sedikit.



ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

$$\text{Rumus : } \text{APK}_{\text{jenjang}} = (\text{Siswa jenjang} : \text{Penduduk usia jenjang}) \times 100$$

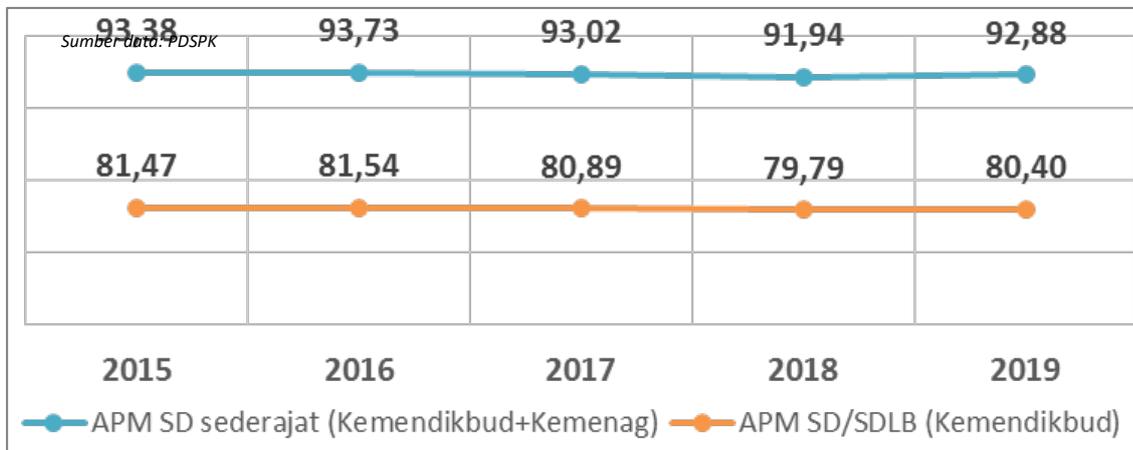
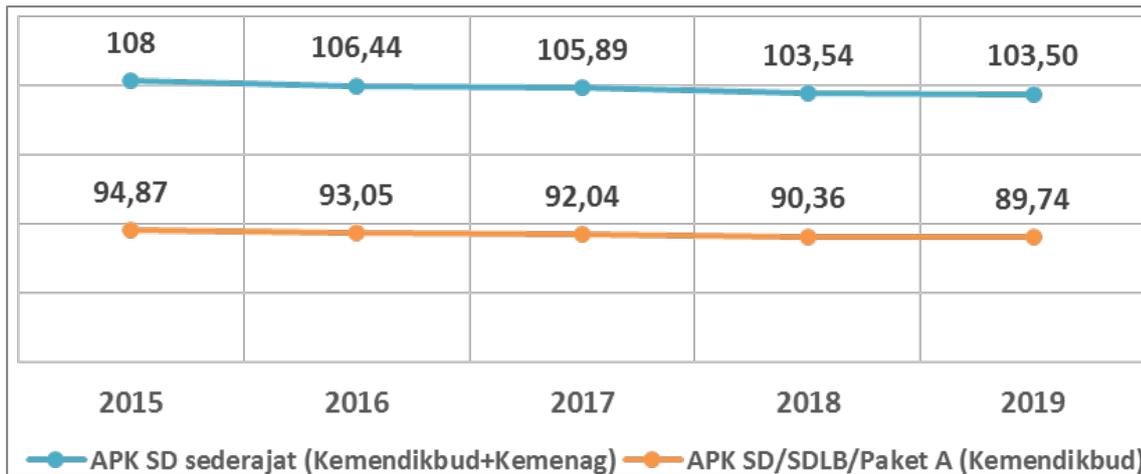
Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

$$\text{Rumus : } \text{APM}_{\text{jenjang}} = (\text{Siswa usia jenjang} : \text{Penduduk usia jenjang}) \times 100$$

Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.

IKSS	Tahun 2019			Target akhir Renstra 2019	% Capaian Terhadap Target akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
IKSS 6.1 APK SD/SDLB/Paket A	100,55%	89,74%	89.2	100,55%	89.2
IKSS 6.2 APM SD/SDLB	85,20%	80,40%	94.4	85,20%	94.4



SD	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Jumlah penduduk usia 7-12	27.381.500	27.574.800	27.843.400	28.125.600	28.339.300
Jumlah siswa SD	25.976.536	25.659.502	25.627.530	25.414.708	25.431.050
SD	25.885.019	25.618.078	25.486.506	25.240.128	25.203.371
SDLB	79.934	28.784	82.413	82.962	86.655
Paket A	11.583	12.640	58.611	91.618	141.024
APK SD/SDLB/Paket A (Kemendikbud)	94,87	93,05	92,04	90,36	89,74
Jumlah siswa usia 7-12	22.306.959	22.483.888	22.523.693	22.441.409	22.783.589
SD	22.270.189	22.475.742	22.469.533	22.436.095	22.726.421
SDLB	36.770	8.146	54.160	5.314	57.168
APM SD/SDLB (Kemendikbud)	81,47	81,54	80,89	79,79	80,40

Program bantuan yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah jenjang SD melalui DAK fisik dan nonfisik pada tahun 2019 di antaranya adalah sebagai berikut:

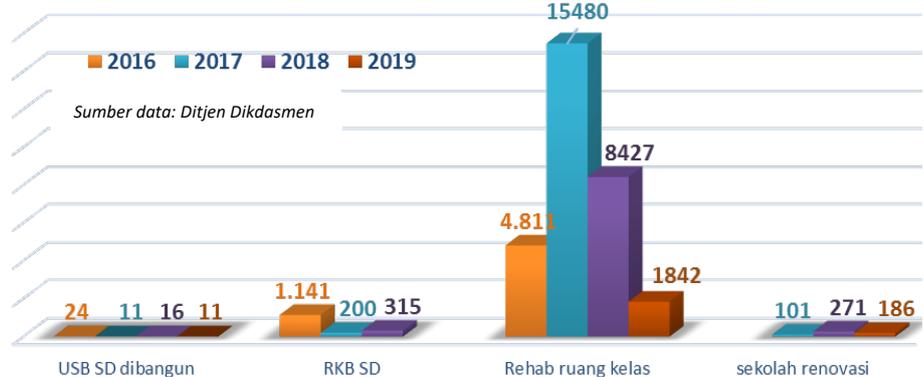
1. Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD,
2. pemberian BOS untuk siswa SD,
3. pembangunan unit sekolah baru (USB) jenjang SD,
4. rehabilitasi ruang kelas jenjang SD,
5. renovasi sekolah jenjang SD, dan
6. pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi tahun 2019 sebanyak 1800 siswa SD.

Bantuan PIP SD 2019
10.364.266 Siswa



BOS SD 2019
25.566.067 Siswa

Pembangunan Prasarana SD 2016-2019



Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD tidak menunjukkan kinerja yang rendah. Akan tetapi justru sebaliknya, penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7–12 tahun. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dalam konteks ini, anak usia 7 tahun diwajibkan diterima terlebih dahulu sebagai peserta didik SD. Berikut ini sepuluh kabupaten/kota yang memiliki nilai APK dan APM terendah di Indonesia.

10 Kabupaten/kota dengan nilai APK/APM SD terendah di Indonesia tahun 2019

No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APK	No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APM
1	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	76,49	1	Papua	Kab. Memberamo Raya	51,98
2	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	77,42	2	Papua	Kab. Yalimo	52,04
3	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	80,28	3	Papua	Kab. Deiyai	54,42
4	Papua	Kab. Tolikara	81,89	4	Papua	Kab. Asmat	56,63
5	Papua	Kab. Puncak Jaya	82,35	5	Papua	Kab. Puncak Jaya	57,43
6	Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	85,63	6	Papua	Kab. Yahukimo	57,95
7	Papua	Kab. Deiyai	85,64	7	Papua	Kab. Mappi	59,03
8	Papua	Kab. Nduga	86,03	8	Papua	Kab. Membramo Tengah	60,72
9	Papua	Kab. Keerom	86,17	9	Papua	Kab. Dogiyai	60,77
10	Papua	Kab. Supiori	86,26	10	Papua	Kab. Paniai	62,53

Permasalahan dalam peningkatan angka partisipasi antara lain

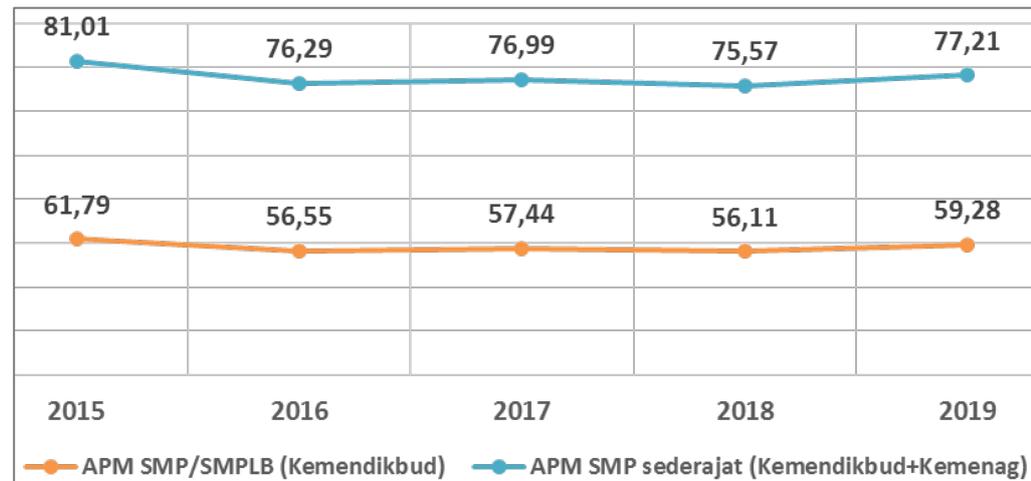
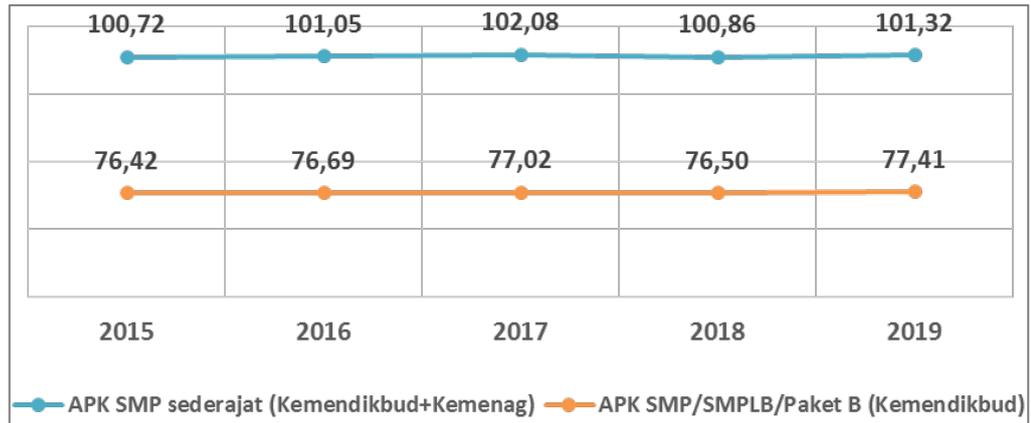
1. tren sosial terhadap pilihan sekolah oleh orang tua/wali siswa yang cenderung memilih masuk ke madrasah,
2. intervensi pembangunan ruang kelas baru yang lebih ditujukan untuk memenuhi rasio jumlah rombongan belajar: ruang kelas di tingkat satuan pendidikan,
3. implementasi PP Nomor 2/2018 dan Permendikbud Nomor 32/2018 mengenai pelaksanaan SPM guna menarik anak-anak yang belum bersekolah untuk bersekolah yang belum optimal,
4. tingkat kesejahteraan sosial siswa yang rendah yang masih menjadi kendala bagi penduduk usia sekolah untuk dapat bersekolah,
5. akses ketersediaan sarana bersekolah di daerah-daerah tertentu terutama daerah 3T yang belum mencukupi atau radius jarak yang cukup jauh, dan
6. akses untuk siswa berkebutuhan khusus yang tidak bisa dilayani pada semua sekolah reguler.

Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain

1. meningkatkan mutu dan sosialisasi sekolah umum, khususnya sekolah negeri;
2. melakukan intervensi sarana prasarana yang tepat sasaran terhadap daerah-daerah yang benar-benar membutuhkannya;
3. mengimplementasikan PP No. 2/2018 dan Permendikbud No. 32/2018 mengenai penarikan anak Indonesia usia sekolah yang tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah;
4. meningkatkan ketepatan sasaran dan penggunaan BOS dan PIP;
5. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan pendidikan lainnya; dan
6. peningkatan koordinasi antarunit di Kemendikbud atau antarkementerian pada skala yang lebih besar, terutama dalam hal penyaluran anggaran dan keabsahan data perencanaan program kegiatan yang memberikan akses seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus.

IKSS	Tahun 2019			Target akhir Renstra 2019	% Capaian Terhadap Target akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
IKSS 6.3 APK SMP/SMPLB /Paket B	83,77%	77,41%	92,4	83,77%	92,4
IKSS 6.4 APM SMP/SMPLB	73,72%	59,28%	80,4	73,72%	80,4

Angka partisipasi jenjang SMP, baik angka partisipasi kasar maupun murni, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun capaian realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra.



SMP	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Jumlah penduduk usia 13-15	13.390.600	13.425.000	13.440.400	13.485.000	13.600.400
Jumlah siswa SMP	10.233.052	10.295.168	10.352.090	10.316.090	10.527.471
SMP	10.040.277	10.145.416	10.125.724	9.982.639	10.112.022
SMPLB	23.689	26.592	29.444	76.920	35.211
Paket B	169.086	123.160	196.922	256.531	380.238
APK SMP/SMPLB/Paket B (Kemendikbud)	76,42	76,69	77,02	76,50	77,41
Jumlah siswa SMP usia 13-15	8.273.947	7.591.660	7.720.321	7.565.783	8.062.391
SMP	8.264.365	7.590.420	7.697.483	7.564.866	8.047.565
SMPLB	9.582	1.240	22.838	917	14.826
APM SMP/SMPLB (Kemendikbud)	61,79	56,55	57,44	56,11	59,28

10 Kabupaten/kota dengan nilai APK/APM SMP terendah di Indonesia tahun 2019

No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APK	No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APM
1	Papua	Kab. Yahukimo	43,75	1	Papua	Kab. Yahukimo	21,94
2	Papua	Kab. Asmat	49,75	2	Papua	Kab. Asmat	22,10
3	Papua	Kab. Intan Jaya	52,08	3	Papua	Kab. Mappi	23,47
4	Papua	Kab. Dogiyai	52,67	4	Papua	Kab. Memberamo Raya	24,22
5	Papua	Kab. Nduga	54,33	5	Papua	Kab. Membramo Tengah	26,77
6	Papua	Kab. Memberamo Raya	54,49	6	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	28,29
7	Papua	Kab. Membramo Tengah	54,71	7	Papua	Kab. Intan Jaya	30,85

No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APK	No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APM
8	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	56,10	8	Papua	Kab. Dogiyai	31,07
9	Papua	Kab. Paniai	57,95	9	Papua	Kab. Paniai	33,30
10	Papua	Kab. Waropen	60,45	10	Papua	Kab. Deiyai	35,50

Beberapa hal yang menyebabkan angka partisipasi jenjang SMP/SMPLB/Paket B belum mencapai target yang ditetapkan antara lain sebagai berikut.

1. Kurangnya daya dukung infrastruktur lain yang menunjang akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, seperti kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum (faktor geografi), dan jarak dari rumah ke SMP/setara sangat jauh
2. Kurangnya layanan pendidikan SMP yang disediakan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya di daerah 3T
3. Faktor ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bersekolah terutama di daerah-daerah tertinggal
4. Belum terbentuknya pola masyarakat pembelajar atau faktor sosial budaya (pemahaman pentingnya pendidikan)
5. Kecenderungan orang tua yang lebih memilih pesantren untuk mendidik anaknya daripada sekolah formal setelah lulus SD/MI

Pemenuhan akses pendidikan dasar (SD dan SMP) merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, Kemendikbud tetap memberikan bantuan untuk pemenuhan akses pendidikan pendidikan dasar.

Program bantuan yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah jenjang SMP baik melalui DAK fisik maupun nonfisik pada tahun 2019 di antaranya

1. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SMP,
2. pemberian BOS jenjang SMP,
3. pembangunan unit sekolah baru (USB) jenjang SMP,
4. rehabilitasi ruang kelas jenjang SMP,
5. renovasi sekolah jenjang SMP, dan
6. pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi tahun 2019 sebanyak 3.370 siswa SMP.

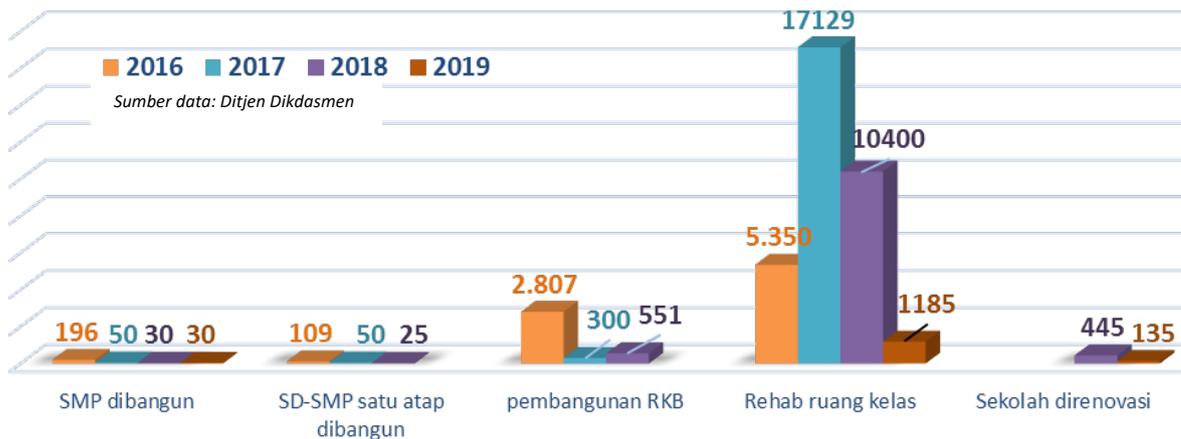
Peningkatan efektivitas pemanfaatan BOS dan pelaksanaan PIP tepat sasaran merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarginalisasi agar bersekolah kembali. Program *retrieval* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dukungan pemerintah. Pengawasan terhadap penerima KIP oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dari keluarga miskin memperoleh manfaat dari PIP.

BOS SMP 2019
10.454.733 Siswa

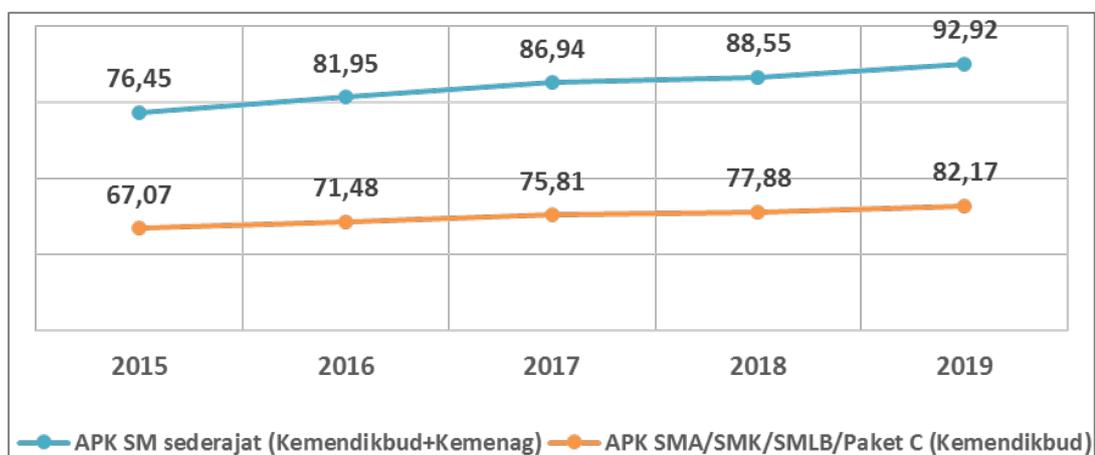
Bantuan PIP SMP 2019
4.562.347 Siswa

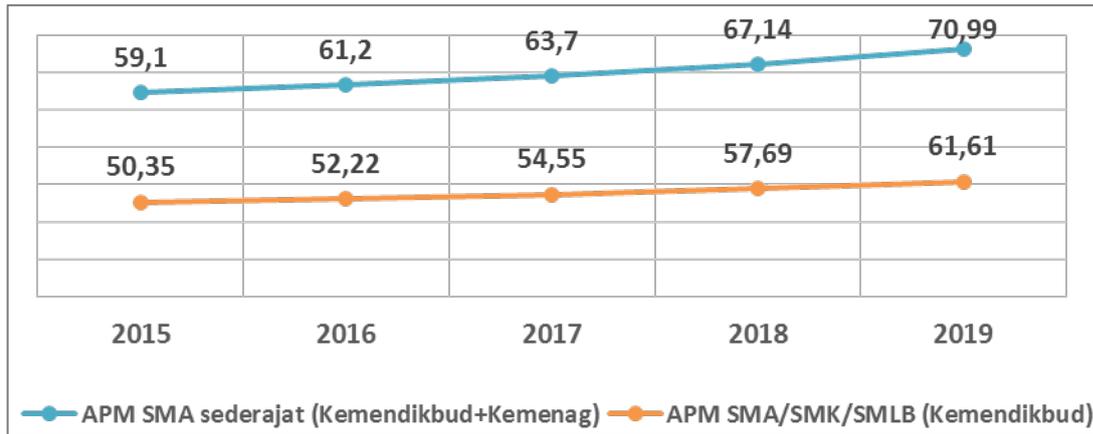


Pembangunan Prasarana SMP 2016-2019 oleh Kemendikbud



IKSS	Tahun 2019			Target akhir Renstra 2019	% Capaian Terhadap Target akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
IKSS 6.5 APK SMA/SMK/SMLB /Paket C	85,71%	82,17%	95,9	85,71%	95,9
IKSS 6.6 APM SMA/SMK /SMLB	73,05%	61,61%	84,3	73,05%	84,3





	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Jumlah penduduk usia 16-18	13.281.300	13.276.000	13.305.400	13.359.500	13.398.700
Jumlah siswa SM	8.907.573	9.489.378	10.087.247	10.404.430	11.010.000
SMA	4.312.407	4.659.261	4.783.645	4.853.487	4.976.127
SMLB	10.462	13.777	16.667	19.504	22.963
SMK	4.334.987	4.682.913	4.904.031	5.009.198	5.249.149
Paket C	249.717	133.427	382.904	522.241	761.761
APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (Kemendikbud)	67,07	71,48	75,81	77,88	82,17
Jumlah siswa SM usia 16-18	6.687.640	6.932.815	7.258.007	7.707.400	8.254.577
SMA	3.313.780	3.389.846	3.512.675	3.705.893	4.115.263
SMLB	7.068	48	14.588	1.444	9.862
SMK	3.366.792	3.542.921	3.730.744	4.000.063	4.129.452
APM SMA/SMK/SMLB (Kemendikbud)	50,35	52,22	54,55	57,69	61,61

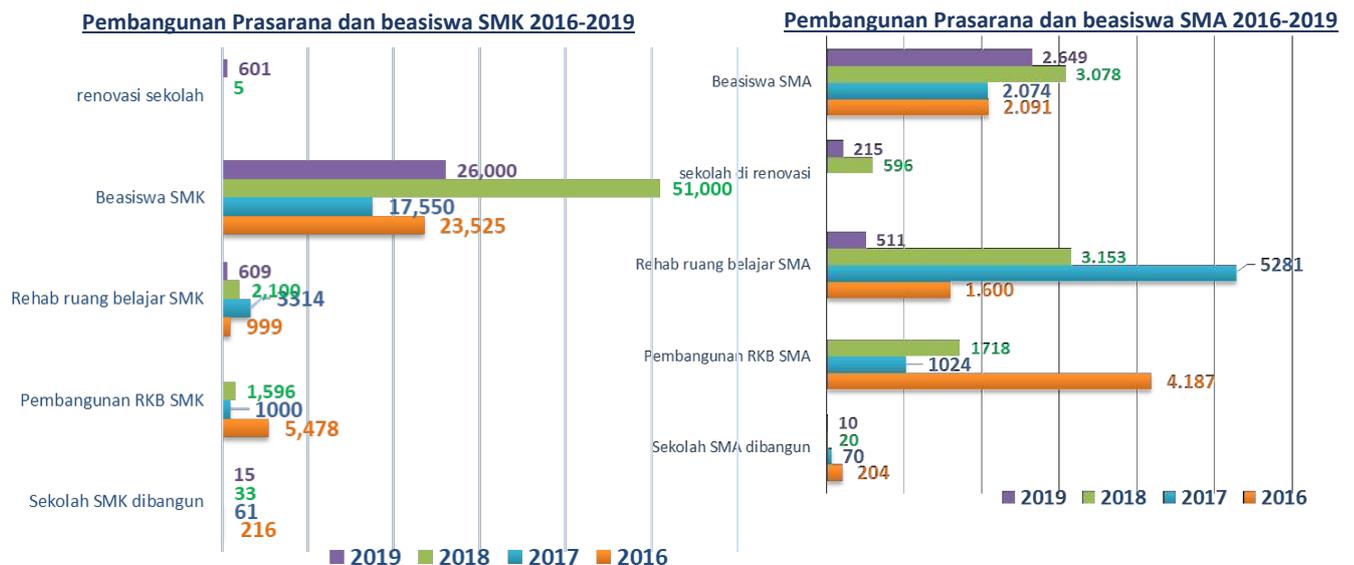
10 Kabupaten/kota dengan nilai APK/APM SM terendah di Indonesia tahun 2019

No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APK	No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APM
1	Papua	Kab. Intan Jaya	13,08	1	Papua	Kab. Intan Jaya	6,35
2	Papua	Kab. Lanny Jaya	22,39	2	Papua	Kab. Dogiyai	10,82
3	Papua	Kab. Yahukimo	23,21	3	Papua	Kab. Lanny Jaya	11,25
4	Papua	Kab. Dogiyai	24,89	4	Papua	Kab. Yahukimo	14,47
5	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	26,67	5	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	15,04
6	Papua	Kab. Tolikara	30,04	6	Papua	Kab. Asmat	15,71
7	Papua	Kab. Yalimo	34,03	7	Papua	Kab. Mappi	15,85
8	Papua	Kab. Asmat	34,76	8	Papua	Kab. Tolikara	16,38
9	Papua	Kab. Puncak Jaya	39,17	9	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	18,35
10	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	46,04	10	Papua	Kab. Paniai	19,36

Pemenuhan akses pendidikan menengah merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, Kemendikbud tetap memberikan bantuan untuk pemenuhan akses jenjang pendidikan menengah.

Program bantuan yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah jenjang sekolah menengah baik melalui DAK fisik maupun nonfisik pada tahun 2019 di antaranya

1. Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang sekolah menengah,
2. pemberian BOS untuk jenjang sekolah menengah,
3. pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk jenjang sekolah menengah,
4. rehabilitasi ruang kelas jenjang sekolah menengah, dan
5. renovasi sekolah jenjang sekolah menengah.



Beberapa permasalahan yang menyebabkan APK dan APM SMA/SMK/SMLB belum mencapai target yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:

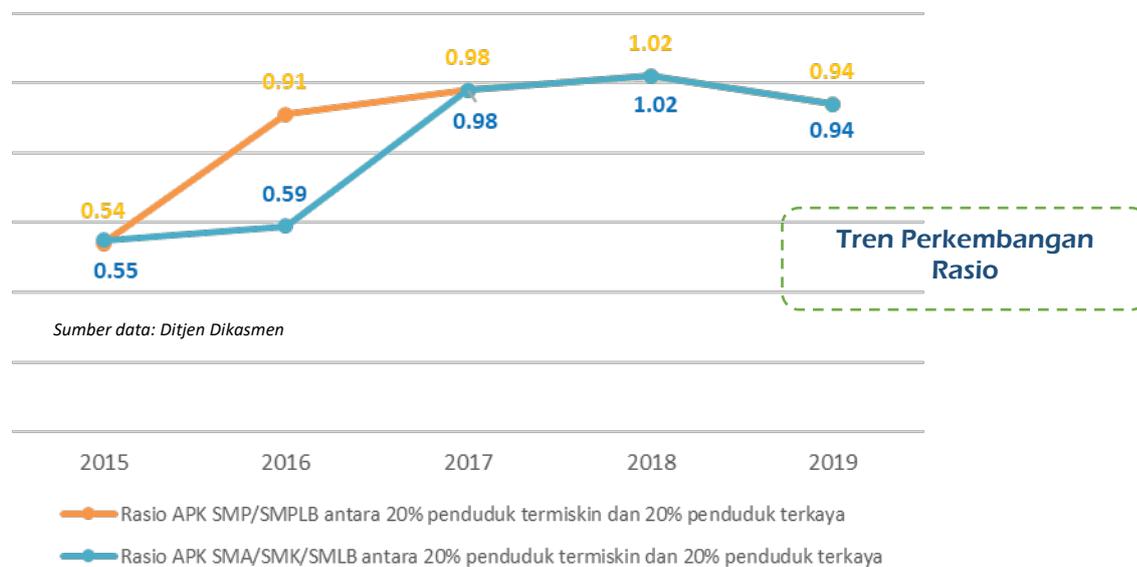
1. faktor ekonomi yang meliputi ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya pada jenjang sekolah menengah,
2. tingkat pendidikan orang tua yang rendah yang mengakibatkan munculnya rasa keraguan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah menengah,
3. faktor geografi yang meliputi kesulitan akses menuju sekolah, tidak adanya akses kendaraan umum, serta jarak dari rumah ke sekolah menengah sangat jauh,
4. kurangnya layanan pendidikan SMA/SMK yang disediakan pemerintah daerah ataupun masyarakat,

5. rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA/SMK, dan
6. kecenderungan orang tua yang memilih pesantren sebagai tempat pendidikan selain pendidikan jalur formal setelah lulus SMP.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain mendorong pemerintah provinsi untuk menambah akses sekolah tingkat SMA di daerah-daerah 3T melalui pembangunan USB atau pembangunan RKB serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan hingga tingkat SMA/SMK kepada masyarakat melalui media-media informasi yang memungkinkan dengan memberdayakan pemerintah daerah setempat.

IKSS	Tahun 2019			Target akhir Renstra 2019	% Capaian Terhadap Target akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
IKSS 6.7 Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,9	0,94	104,4	0,9	104,4
IKSS 6.8 Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,6	0,94	156,7	0,6	156,7

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebesar 266.910.000, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9,41% atau sebesar 25.116.231 jiwa serta jumlah penduduk kaya yang diasumsikan 10% atau sebesar 26.691.000 jiwa. Jumlah siswa SMP sebesar 10.147.233 orang, sedangkan Jumlah siswa SMA/SMK sebesar 10.248.239 orang.



Program yang Dijalankan

1. Pemberian BOS

BOS diberikan kepada seluruh siswa melalui sekolah. Untuk tahun 2019, BOS telah diberikan kepada 10.454.733 Siswa SMP. Sementara itu BOS SM diberikan kepada 5.041.622 siswa SMA dan 5.068.420 siswa SMK melalui sekolah. Akan tetapi bantuan tersebut belum diberikan secara penuh (100%) sehingga ada biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa.

2. Pemberian PIP

Untuk tahun 2019 ada 4.369.968 siswa SMP, 1.464.712 siswa SMA, dan 2.007.074 siswa SMK yang mendapatkan bantuan melalui PIP. PIP diberikan khusus kepada siswa yang kurang mampu.

3. Pemberian bantuan USB, renovasi ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas

4. Rehabilitasi ruang belajar SMA/ sederajat

5. Beasiswa bakat dan prestasi

Meskipun target yang ditetapkan telah tercapai, tetapi upaya peningkatan rasio masih menemui hambatan/kendala dan permasalahan. Hambatan yang dimaksud merupakan hambatan dalam pelaksanaan program PIP dan BOS. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. tingkat kesejahteraan sosial siswa yang rendah yang masih menjadi kendala bagi penduduk untuk dapat menyelesaikan jenjang SD,
2. akses ketersediaan sarana bersekolah jenjang SMP di daerah-daerah tertentu terutama daerah 3T yang belum mencukupi atau radius jarak yang cukup jauh,
3. kesadaran orang tua dan siswa akan pentingnya pendidikan yang masih kurang.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi antara lain

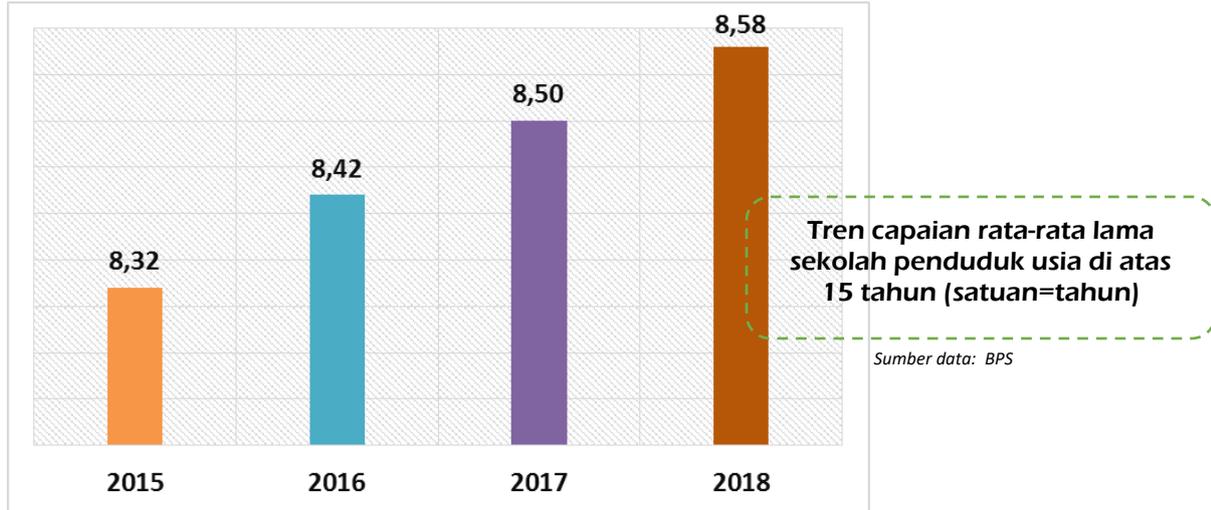
- a. terus melanjutkan pemberian BOS dan PIP;
- b. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya;
- c. memberikan alternatif program pendidikan, seperti kejar paket B dan sekolah terbuka; serta
- d. Meningkatkan sosialisasi terutama ke daerah-daerah terbelakang mengenai pentingnya pendidikan bagi individu untuk masa depan yang lebih baik.

IKSS 6.9 : Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Target 2019 = 8,8
Realisasi = 8,58
% Capaian = 97,5%

Target Akhir Renstra 2019 = 8,8
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 97,5%

**Realisasi tahun 2019 menggunakan data capaian tahun 2018, karena BPS belum mengeluarkan angka angka capaian 2019*



Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pengukurannya dilakukan oleh BPS melalui Survei Ekonomi, Sosial, Nasional (SUSENAS).

Tahun 2019, BPS belum merilis rata-rata lama sekolah tahun 2019. Capaian 8,58 merupakan pengukuran rata-rata lama sekolah tahun 2018. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan penduduk usia di atas 15 tahun semakin tinggi mengenyam sekolah.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain Harapan Lama Sekolah (HLS), angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik mencatat IPM Indonesia pada 2018 sudah menembus 70,39.

Kemendikbud berupaya meningkatkan rata-rata lama sekolah agar IPM terus meningkat melalui program

1. pemberian BOS,
2. pemberian PIP kepada siswa miskin dengan tujuan untuk meningkatkan angka partisipasi, menurunkan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan, serta
3. afirmasi pendidikan khususnya di daerah 3T, terutama bantuan untuk sarana dan prasarana.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di antaranya adalah

- a. faktor budaya setempat,
- b. faktor sosial/tingkat kemiskinan, dan
- c. faktor geografis, seperti akses pendidikan di daerah-daerah 3T.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target dapat tercapai antara lain

- a. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan;
- b. menyelenggarakan sekolah terbuka dengan waktu yang fleksibel;
- c. membangun sarana prasarana di daerah-daerah terpencil; dan
- d. memenuhi kebutuhan tenaga guru di sekolah-sekolah 3T.

SS7

Meningkatnya distribusi guru dan tenaga kependidikan

Distribusi guru sesuai kebutuhan ke satuan pendidikan mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari yang diharapkan. Perbaikan terlihat dari meningkatnya persentase satuan pendidikan yang memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai rombongan belajar dan standar kurikulum yang semula 55,10% menjadi 58,46% pada tahun 2019.

IKSS 7.1 : Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum

Realisasi 2018
=55,10%

Target 2019 =58,40%

Realisasi =58,46%

% Capaian = 100,1%

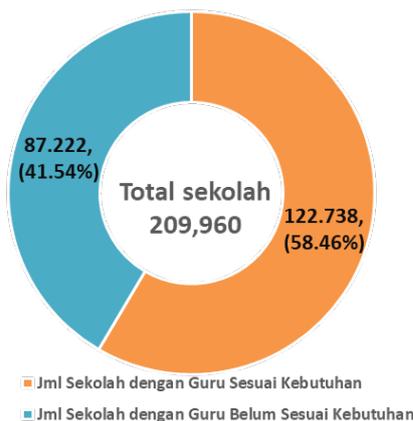
Target Akhir Renstra

2019 =58,40%

% Capaian Terhadap

Target Akhir Renstra

2019 =100,1%



Peta Sebaran Satuan Pendidikan memiliki guru sesuai kebutuhan

Jenjang	Jumlah Total Sekolah	Jumlah Sekolah Dengan Guru Sesuai Kebutuhan	%
SD	147,707	82,137	55.61
SMP	37,188	24,431	65.70
SMA	12,637	8,303	65.70
SMK	12,428	7,867	63.30
Total	209,960	122,738	58.46

Perhitungan persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan rombongan belajar dan standar kurikulum menggunakan dua variabel, yaitu jumlah rombongan belajar (rombel) dan standar kurikulum dengan rumusan yang berbeda untuk setiap jenjangnya. Pada jenjang SD, perhitungan menggunakan dua variabel tersebut dengan rumusan jumlah rombel ditambah 3 yang mewakili 1 kepala sekolah, 1 guru agama, dan 1 guru Pendidikan, Jasmani, Olahraga, Kesehatan (PJOK). Sementara itu jenjang lain menggunakan standar kurikulum K13. Untuk jenjang SMP, minimal jumlah guru sebanyak 10 sesuai dengan jumlah mata pelajaran pada jenjang SMP dan 1 kepala sekolah. Jenjang SMA dan SMK minimal jumlah guru sebanyak 15 sesuai dengan rata-rata jumlah mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah dengan 1 kepala sekolah.

Sesuai undang-undang otonomi daerah, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah, termasuk memastikan ketersediaan guru sesuai

dengan rombel dan kurikulum di sekolah. Pemenuhan guru pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemenuhan guru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Permasalahan

1. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang kurang hampir terjadi di semua daerah, terutama karena guru PNS yang memasuki usia pensiun tidak seimbang dengan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan yang disebabkan terbatasnya formasi CPNS.



2. Formasi guru CPNS pada tahun 2018 yang ditetapkan berbeda dengan rekomendasi peta kebutuhan guru yang disampaikan oleh Kemendikbud kepada KemenpanRB karena secara perundangan penentuan formasi tersebut sesuai dengan formasi yang diusulkan daerah.

Upaya perbaikan

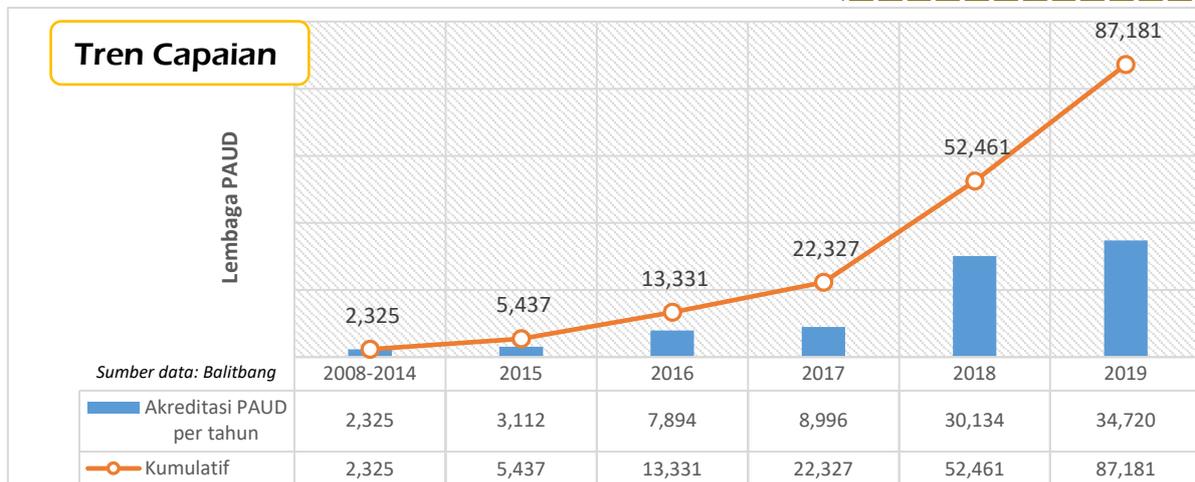
1. Memberikan rekomendasi formasi kebutuhan guru ke Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan di lapangan berdasarkan data Dapodik yang ada di Kemendikbud melalui rekon data formasi CPNS dengan melibatkan Kemendagri, Kemenpan-RB dan BKN.
2. Dalam upaya pemenuhan guru SMK mata pelajaran (mapel) kejuruan yang profesional, Kemendikbud melakukan **Program Pemenuhan Kompetensi Kerja dan Sertifikat Keahlian (PKKSK)**, yaitu pelatihan khusus bagi CPNS guru SMK mapel kejuruan untuk lebih siap mengajar mapel kejuruan yang diampu. Pelatihan ini memfasilitasi CPNS Guru SMK Kejuruan agar memiliki kompetensi kerja dan sertifikat keahlian sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. Program PKKSK meliputi pendidikan dan pelatihan, praktek kerja industri dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilaksanakan di Lembaga sertifikasi Profesi pihak kedua (LSP P2) yang ada di PPPPTK dan LPPPTK KPTK. Peserta guru CPNS yang mengikuti PKKSK masih belum massif, hanya sebanyak 298 orang. Salah satu penyebabnya adalah karena pelaksanaan PKKSK bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan Pemda.

SS8

Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan

Mutu pendidikan PAUD dan Dikmas menunjukkan peningkatan, ditunjukkan dengan **Lembaga PAUD yang terakreditasi mencapai 87.181 dan program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi mencapai 68,72% sampai tahun 2019.**

IKSS 8.1 : Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	Target 2019 = 42.926	Target Akhir Renstra 2019 = 42.926	
	Realisasi = 87.181		% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 203,1%
	% Capaian = 203,1%		



Dibandingkan dengan capaian tahun 2018, jumlah lembaga PAUD terakreditasi meningkat sebanyak 34.720 lembaga. Peningkatan capaian lembaga PAUD terakreditasi melebihi target Renstra dikarenakan lembaga PAUD menjadi prioritas satuan pendidikan yang diakreditasi melalui peningkatan kuota akreditasi dan dukungan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispna) sebagai perangkat utama layanan akreditasi.

Capaian lembaga PAUD terakreditasi sampai dengan tahun 2019 adalah 87.181 lembaga atau 43,06% dari total 202.462 lembaga. Berikut ini rincian data PAUD sampai tahun 2019.

Tahun	Peringkat Akreditasi				Jumlah
	A	B	C	Terakreditasi	
2008-2014	-	-	-	2.325	2.325
2015	298	1.514	1.127	173	3.112
2016	715	4.339	2.840	-	7.894
2017	854	4.944	3.198	-	8.996
2018	2.183	17.825	10.126	-	30.134
2019	2.973	20.323	11.424	-	34.720
Jumlah	7.023	48.945	28.715	2.498	87.181

Upaya/Program yang dilakukan

1. Pembinaan Lembaga PAUD yang sudah terakreditasi.

Untuk tahun 2019, dilakukan kepada 640 lembaga di 16 Kabupaten/kota, dengan tujuan:

- memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan implementasi model pembelajaran PAUD yang berkarakter;
- memberikan pemahaman tentang peranan penilik sebagai penjamin mutu dan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan program PAUD;
- Memberikan pemahaman tentang Gerakan PAUD Berkualitas;
- memberikan pemahaman tentang Gugus PAUD sebagai wahana peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- memberikan pemahaman tentang peningkatan satuan PAUD menuju PAUD berkualitas; 6) memberikan pemahaman tentang peningkatan program layanan PAUD menuju PAUD berkualitas.

2. Pembinaan melalui PKG

berupa bantuan kepada 3.000 PKG diharapkan lembaga PAUD lebih meningkatkan mutu layanan mereka. Melalui pertemuan gugus-gugus PAUD diharapkan dapat menjadi bengkel kerja para pendidik PAUD.

3. Pelatihan Asesor

bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan mekanisme akreditasi, kode etik Asesor, substansi dalam Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) serta meningkatkan kompetensi asesor dalam pelaksanaan akreditasi berbasis Sispena.

4. Sosialisasi Akreditasi

bertujuan agar informasi kebijakan, mekanisme akreditasi, dan Sispena sebagai aplikasi mekanisme akreditasi sampai kepada *stakeholders*.



Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan akreditasi adalah:

1. BAN PAUD dan PNF sebagai lembaga yang berwenang melakukan akreditasi, memiliki sumber daya manusia yang terbatas dibandingkan luas wilayah dan jumlah lembaga yang harus diberikan penilaian. Hal ini menyebabkan banyak lembaga membutuhkan waktu lama untuk dapat diakreditasi;
2. Terdapat lembaga yang tidak memperpanjang atau memperbaharui akreditasi setelah status akreditasinya berakhir;
3. Kurangnya pemahaman lembaga PAUD terkait penjaminan mutu melalui akreditasi lembaga PAUD;
4. Penyusunan kebijakan, mekanisme akreditasi, dan pengembangan perangkat penilaian akreditasi berbasis *performance* yang dilakukan pada tahun yang sama;
5. Keterbatasan akses transportasi dan sarana internet dalam pelaksanaan akreditasi untuk daerah 3T.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. sosialisasi manfaat akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu lembaga PAUD,
2. meningkatkan peran pembinaan dan pendampingan kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi terutama untuk mengawal kebijakan dan mekanisme akreditasi,
3. peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan paradigma penilaian akreditasi berbasis *performance*, dan
4. melakukan pengkajian metode pelaksanaan akreditasi pada daerah 3T.

IKSS 8.2 : Persentase program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi

Target 2019 = 71,38%
Realisasi = 68,72%
% Capaian = 96,3%

Target Akhir Renstra 2019 = 71,38%

% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 96,3%

Tren Capaian program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi



Angka sebesar 68,72% (12.653 LKP) diukur dengan menghitung jumlah LKP yang menerapkan KKNi dibandingkan total jumlah LKP yang ada (18.412 LKP). meliputi program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, rumah pintar, sanggar kegiatan belajar, serta organisasi kemasyarakatan

Sumber data: Paud dan Dikmas

Rincian jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI:

No	Jenis Keterampilan	Program Kursus Yang Dilaksanakan	Program Kursus Menerapkan KKNI	%	No	Jenis Keterampilan	Program Kursus Yang Dilaksanakan	Program Kursus Menerapkan KKNI	%
1	Akuntansi	173	118	68	34	Modeling	9	6	67
2	Akupunktur	20	14	70	35	Multimedia	95	65	68
3	Anak Buah Kapal	9	6	67	36	Otomotif	478	380	79
4	Animasi	22	15	68	37	Pariwisata	201	97	48
5	Asisten Perawat	93	63	68	38	Pasar Modal	10	7	70
6	Baby Sitter	52	35	67	39	Pastry & Bakery	201	137	68
7	Bahasa Belanda	28	19	68	40	Pekarya Kesehatan	165	113	68
8	Bahasa Indonesia	60	41	68	41	Pendidik PAUD	19	13	68
9	Bahasa Inggris	3856	2630	68	42	Penerbang (Pilot)	9	6	67
10	Bahasa Korea	62	42	68	43	Pengobatan Tradisional	16	11	69
11	Bahasa Mandarin	113	77	68	44	Perhotelan Bidang Housekeeping	472	322	68
12	Batik	62	42	68	45	Perikanan	9	6	67
13	Bordir	62	42	68	46	Perpajakan	15	10	67
14	Care Giver	3	3	100	47	Pertanian	11	8	73
15	Desain Grafis	987	673	68	48	Peternakan	8	5	63
16	Desain Interior	70	48	69	49	Pijat Pengobatan Refleksi	74	50	68
17	Ekspor Impor	86	59	69	50	Pramugari	8	5	63
18	Elektronika	27	18	67	51	Sablon	22	15	68
19	Fotografi	10	7	70	52	Security	27	18	67
20	Garment	109	74	68	53	Sekretaris	284	194	68
21	Hantaran	179	157	88	54	Senam	47	32	68
22	Humas / Public Relations	65	44	68	55	Seni Musik	266	181	68
23	Instruktur Bahasa Jepang	73	32	44	56	Seni Rupa	7	5	71
24	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi	2245	1531	68	57	Seni Tari	113	77	68
25	Jurnalistik	7	5	71	58	Spa	57	39	68
26	Kerajinan Tangan	155	106	68	59	Sulam	52	35	67
27	Komputer Akuntansi	552	376	68	60	Tata Kecantikan Kulit	476	425	89
28	Komputer Aplikasi Perkantoran	494	337	68	61	Tata Kecantikan Rambut	848	578	68
29	Master Of Ceremony	10	7	70	62	Tata Operasi Darat/Ground Handling	25	17	68
30	Mengemudi Kendaraan Bermotor untuk Pemula	599	409	68	63	Tata Rias Pengantin	979	668	68
31	Menjahit	2402	1638	68	64	Teknik Kendaraan Ringan	10	7	70
32	Merangkai Bunga	14	10	71	65	Teknisi HP	177	85	48
33	Meubeler	3	2	67	66	Teknisi Komputer	517	353	68
					67	Topografi	5	3	60
						TOTAL	18412	12653	68.79

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain

1. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) (*lifeskill*) yang berupa pemberian bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW),
2. pemberian bantuan beasiswa uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan, dan
3. pemberian bantuan beasiswa magang pada dunia usaha dan dunia industri bagi peserta didik kursus dan pelatihan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain sebagai berikut.

1. Masih banyak program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di daerah terpencil atau pedesaan, daerah perbatasan, dan pulau terluar yang belum mengacu kepada SKL berbasis KKNi akibat belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* di daerah.
2. Beberapa unit kompetensi yang ada di KKNi belum dapat diajarkan secara optimal oleh sebagian pendidik kursus dan pelatihan karena jenis keterampilan tersebut belum dikuasai. Untuk itu perlu dilakukan *upgrading* bagi para pendidik kursus dan pelatihan secara berkesinambungan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi 4.0 dalam penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya pendidik kursus dan pelatihan.
4. Implementasi dan fasilitasi penerapan kurikulum berbasis KKNi masih terbatas di wilayah regional karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain

1. memanfaatkan laman **kursus.kemdikbud.go.id** untuk menyebarluaskan informasi KKNi;
2. mendorong lembaga penyelenggara program bantuan pendidikan kecakapan kerja dengan tujuan untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri untuk menggunakan SKL berbasis KKNi;
3. mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerapan KKNi melalui program-program pendidikan yang dibiayai baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota; dan
4. mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh para penyelenggara kursus dan pelatihan dalam manajemen pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan.

SS9

Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah

Mutu layanan pendidikan dan dasar menengah menunjukkan peningkatan. Peningkatan terlihat dari makin banyaknya sekolah yang berakreditasi.



Sebaran akreditasi sekolah sampai dengan Tahun 2019

Jenjang	A	B	C	Tidak Terakreditasi	Total Diakreditasi	Populasi*
SD/SDLB	37.216	86.532	22.971	2.642	149.361	149.615
SMP/SMPLB	13.141	16.816	8.630	1.003	39.590	40.709
SMA/SMALB	6.236	5.193	2.219	353	14.001	14.252
SMK	3.568	6.877	3.075	432	13.952	14.303
Total	60.161	115.418	36.895	4.430	216.904	218.879

*Data Populasi Satuan Pendidikan per 26 Desember 2019 (Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>)

Siswa Indonesia memperoleh 92 medali dalam kompetisi Internasional pada tahun 2019.

No	Nama Lomba	Tempat lomba (negara)	Jenjang	Medali			Jumlah
				Emas	Perak	Prg	
1	International Mathematics and Sains Olympiade (IMO)	Vietnam	SD	0	11	11	22
2	4th Edition Of International Karate Open Of Province De Leige	Belgia	SD	3	1	1	5
3	International Robotics Olympiad 2019	Hongaria	SMP	2	2	0	4
4	Global Student Camp Science	Korea	SMP	1	0	0	1
5	International Mathematics Olympiade (IMO)	United Kingdom	SMA	1	4	1	6
6	European Physics Olympiad (EuPho)	Riga, Latvia	SMA	1	2	2	5
7	International Chemistry Olympiad (IChO)	Paris, Perancis	SMA	0	2	2	4
8	International Olympiad in Informatics (IOI)	Baku, Azerbaijan	SMA	1	2	1	4

No	Nama Lomba	Tempat lomba (negara)	Jenjang	Medali			Jumlah
				Emas	Perak	Prg	
9	International Biology Olympiad (IBO)	Szeged, Hungaria	SMA	1	2	1	4
10	International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)	Keszthely, Hungaria	SMA	0	2	3	5
11	International Economic Olympiad (IEO)	St. Petersburg, Rusia	SMA	1	3	1	5
12	International Earth Science Olympiad (IESO)	Daegu, Korea Selatan	SMA	0	2	2	4
13	International Geography Olympiad (IGEO)	Hong Kong, China	SMA	2	2	0	4
14	World Skill Competition (WSC)	Kazan, Rusia	SMK	12	2	1	15
15	The 10th Penang International Halal Expo & Conference	Penang, Malaysia	SLB	0	3	1	4
Total				25	40	27	92

IKSS 9.1 : Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B

Target 2019 =84,20%

Target Akhir Renstra 2019 =84,20%

% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 =98,23%

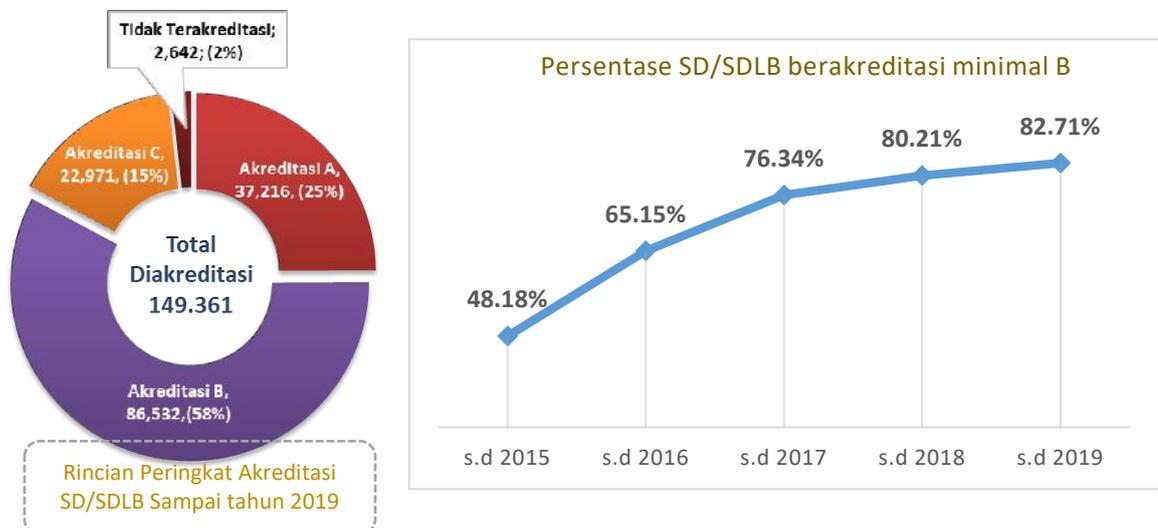
Realisasi =82,71%

% Capaian = 98,23%

Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Total Sekolah*	%
SD/SDLB	37.216	86.532	149.615	82,71

*Data Populasi Satuan Pendidikan per 26 Desember 2019 (Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>)

Walalaupun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018, capaian persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B tahun 2019 belum mencapai target Renstra, yaitu sebesar 84,20%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan masih banyak sekolah yang belum memiliki kualitas sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP, sedangkan intervensi dan pembinaan yang diberikan belum dapat mencakup seluruh sekolah yang harus ditingkatkan mutunya.

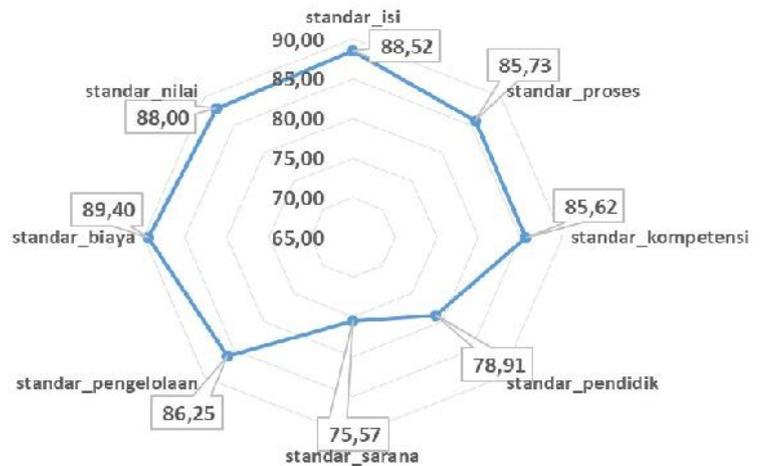


Capaian persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase SD/SDLB dengan berakreditasi minimal B sebesar 80,21%, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 82,71%. Hal ini berarti sampai dengan tahun 2019, sebanyak 123.748 satuan pendidikan SD/SDLB telah berakreditasi minimal B dari jumlah populasi SD/SDLB sebanyak 149.615 satuan pendidikan.

Berdasarkan persentase delapan standar terlihat bahwa standar sarana dan prasarana serta skor standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki skor terendah daripada 6 standar lainnya, yaitu 75,57% dan 78,91%.

Hal-hal yang menyebabkan nilai standar sarana dan prasarana rendah antara lain: sebagai berikut.

1. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan.
2. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki prasarana yang lengkap sesuai ketentuan dengan kondisi baik.
3. Masih sedikit sekolah yang memiliki ruang UKS dengan luas dan prasarana yang ditetapkan.
4. Luas lahan sekolah masih kurang dari ketentuan minimum.
5. Luas lantai bangunan sekolah masih kurang dari sesuai ketentuan.

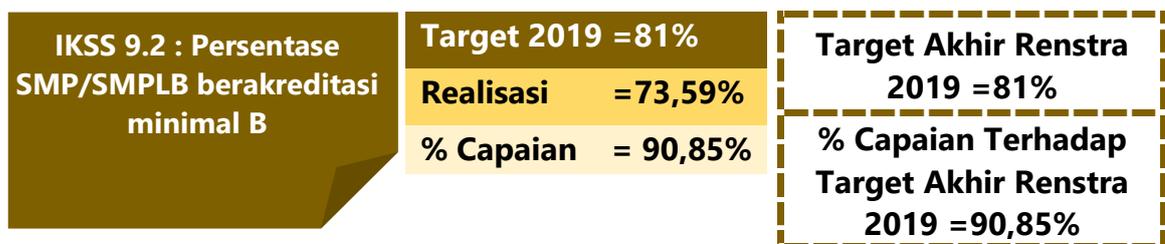
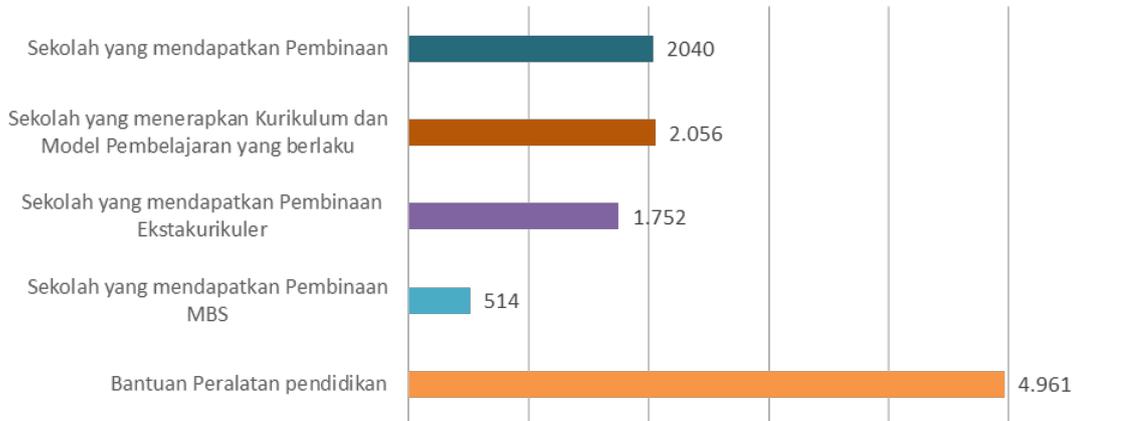


Sementara itu, yang menyebabkan rendahnya skor standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah

1. kurangnya tenaga perpustakaan dengan kualifikasi minimal pendidikan menengah dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah;
2. kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik;
3. kurangnya tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal pendidikan menengah;
4. rendahnya jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan; dan
5. sedikitnya sekolah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus yang bertanggung jawab sebagai penjaga keamanan, tukang kebun, tenaga kebersihan dan pesuruh.

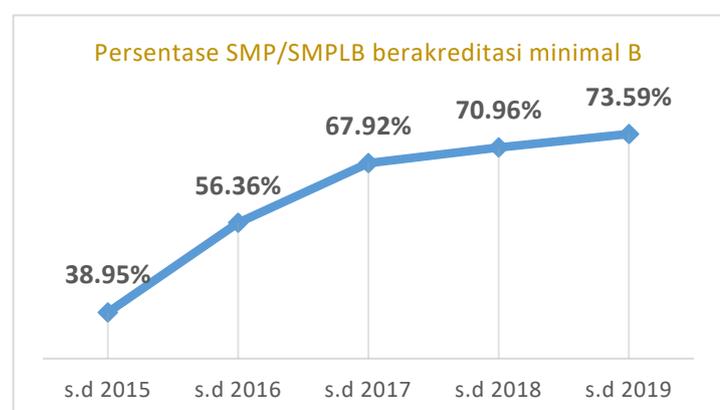
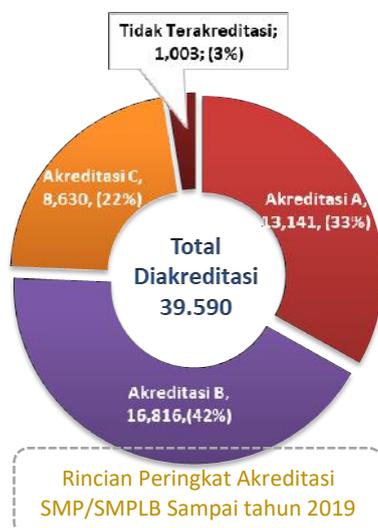
Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah baik melalui bantuan pendanaan maupun peningkatan pengelolaan satuan pendidikan dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (SNP) melalui fasilitasi dan supervisi penjaminan mutu pendidikan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah.

Untuk meningkatkan jumlah sekolah SD yang berakreditasi minimal B, pada tahun 2019 Kemendikbud melalui Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan bantuan yang berupa bantuan peralatan dan pembinaan manajemen kepada satuan pendidikan (lihat grafik).



Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Total Sekolah*	%
SMP/SMPLB	13.141	16.816	40.709	73,59

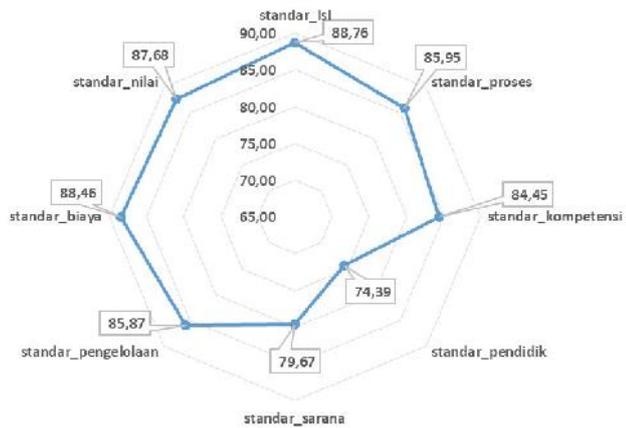
Capaian persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B tahun 2019 belum mencapai target Renstra (sebesar 81%) karena masih banyak sekolah yang belum memiliki kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana sesuai SNP, sedangkan intervensi dan pembinaan yang diberikan belum dapat mencakup seluruh sekolah yang harus ditingkatkan mutunya.



Capaian persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase SMP/SMPLB yang berakreditasi minimal B sebesar 70,96%, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 73,59%. Hal ini berarti bahwa sampai dengan tahun 2019, sebanyak 29.957 satuan pendidikan SMP/SMPLB telah berakreditasi minimal B dari jumlah populasi SMP/SMPLB sebanyak 40.709 satuan pendidikan.

Skor standar pendidik dan tenaga kependidikan SMP memiliki skor terendah yaitu 74,39 kemudian standar sarana dan prasarana dengan skor 79,67.

Rata-rata pemenuhan 8 SNP jenjang SMP/SMPLB

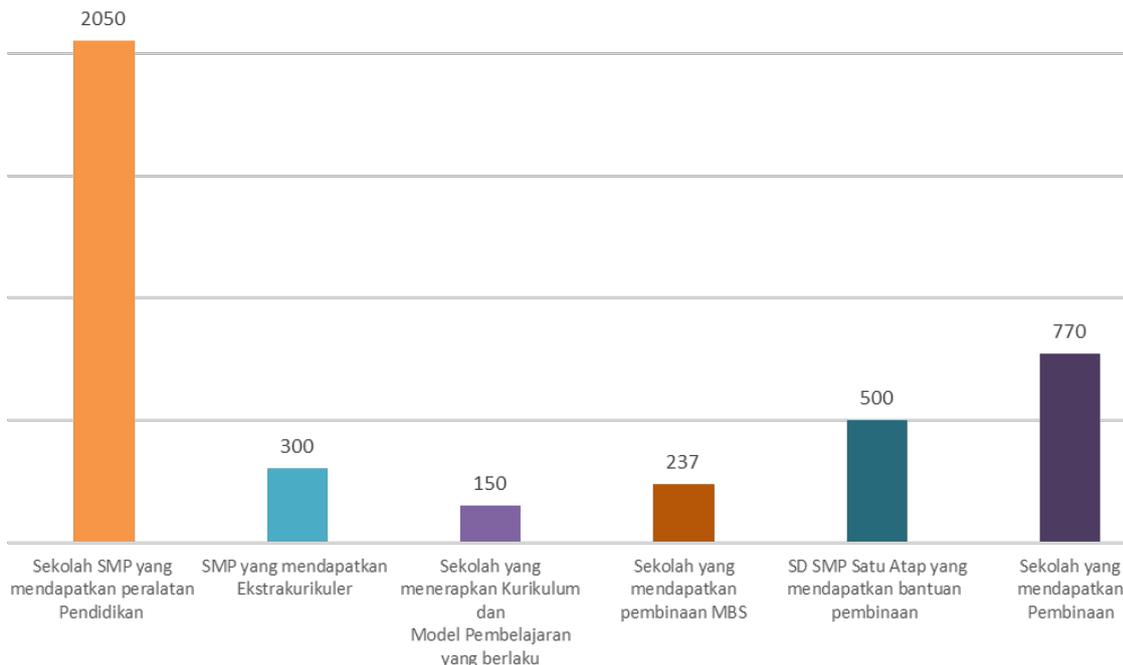


Penyebab rendahnya skor pendidik dan tenaga kependidikan antara lain

- kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik
- kurang/tidak dimilikinya tenaga kependidikan (tenaga/kepala perpustakaan, laboran, tenaga/kepala administrasi, kepala dan guru bimbingan konseling) yang memenuhi syarat yang ditetapkan baik dari segi kualifikasi dan kompetensinya;
- tingginya rasio antara guru bimbingan konseling dengan jumlah siswa.

Untuk meningkatkan jumlah sekolah SMP yang berakreditasi minimal B, pada tahun 2019 Kemendikbud melakukan :

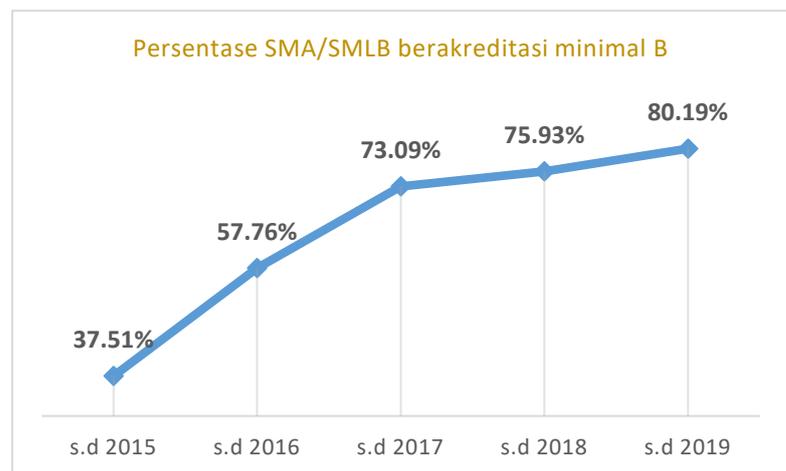
- Program Pendidikan Profesi Guru dan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan guru sesuai standar yang ditetapkan;
- Pemberian bantuan peralatan pendidikan dan pembinaan manajemen ke satuan pendidikan (lihat grafik):



IKSS 9.3 : Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	Target 2019 =85%	Target Akhir Renstra 2019 =85% % Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 =94,34%
	Realisasi =80,19%	
	% Capaian = 94,34%	

Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Total Sekolah*	%
SMA/SMALB	6.236	5.193	14.252	80,19

Capaian Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B tahun 2019 belum mencapai target Renstra sebesar 85% karena masih banyak sekolah yang belum memiliki kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana sesuai SNP, sedangkan intervensi dan pembinaan yang diberikan belum dapat mencakup seluruh sekolah yang harus ditingkatkan mutunya.

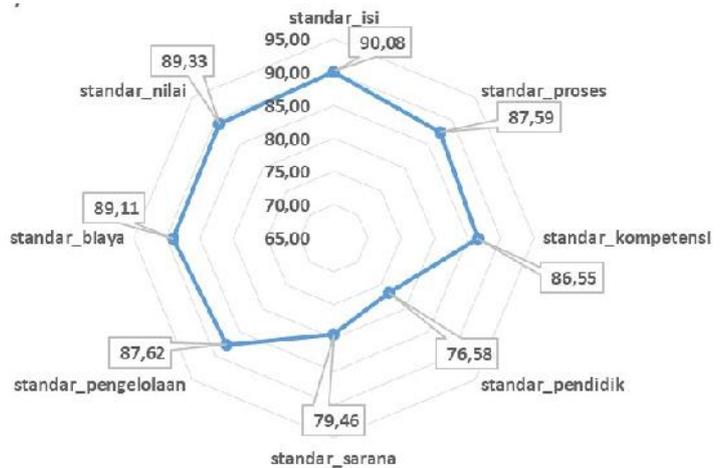


Capaian persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase SMA/SMLB dengan berakreditasi minimal B sebesar 75,93%, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 80,19%. Hal ini berarti bahwa sampai dengan tahun 2019, sebanyak 11.429 satuan pendidikan SMA/SMLB telah berakreditasi minimal B dari jumlah populasi SMA/SMLB sebanyak 14.252 satuan pendidikan. Berikut adalah tren kenaikan persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Jika dilihat dari rata-rata skor 8 standar, skor standar pendidik dan tenaga kependidikan juga yang memiliki skor terendah yaitu 76,58. Kemudian diikuti oleh standar sarana dan prasarana dengan skor 79,46.

Penyebab rendahnya skor pendidik dan tenaga kependidikan antara lain

- kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- kurang/tidak dimilikinya tenaga kependidikan (tenaga/kepala perpustakaan, laboran, tenaga/kepala administrasi, kepala dan guru bimbingan konseling) yang memenuhi syarat yang ditetapkan baik dari segi kualifikasi dan kompetensinya;
- tingginya rasio antara guru bimbingan konseling dengan jumlah siswa.



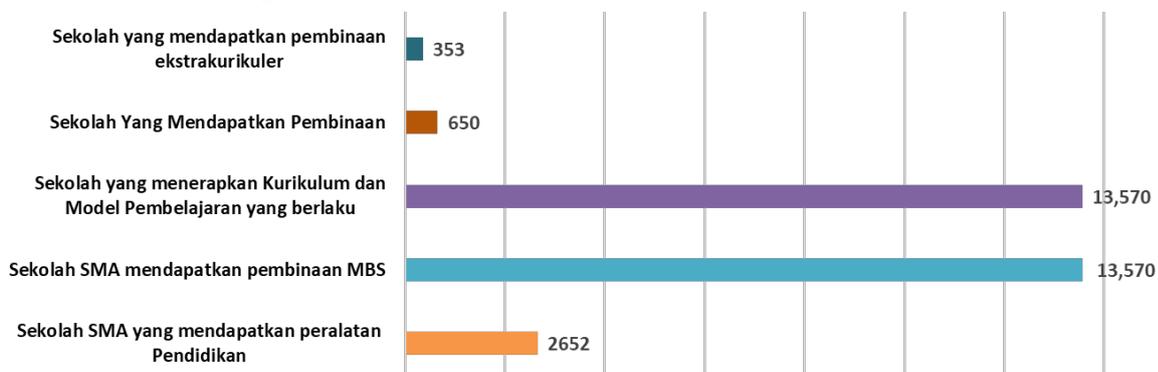
Rata-rata pemenuhan 8 SNP jenjang SMA/SMLB

Sementara itu, penyebab rendahnya skor sarana dan prasarana antara lain

- kurangnya sekolah yang memiliki ruang laboratorium bahasa sesuai ketentuan;
- banyak sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium biologi/fisika/kimia sesuai ketentuan; dan
- banyak sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan dan pelayanannya secara maksimal, kondisinya terawat dengan baik, bersih, serta nyaman.

Untuk meningkatkan jumlah sekolah SMA yang berakreditasi minimal B, pada tahun 2019 Kemendikbud melakukan :

- Program Pendidikan Profesi Guru dan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan guru sesuai standar yang ditetapkan;
- Pemberian bantuan peralatan pendidikan dan pembinaan manajemen ke satuan pendidikan (lihat grafik):

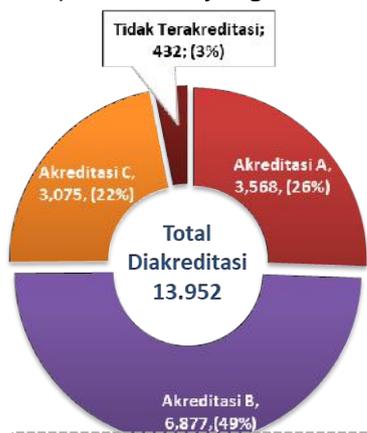


IKSS 9.4 : Persentase Satuan Pendidikan SMK berakreditasi minimal B

Target 2019 = 65%	Target Akhir Renstra 2019 = 65%
Realisasi = 73,03%	
% Capaian = 112,4%	
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 112,4%	

Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Total Sekolah*	%
SMK	3.568	6.877	14.303	73,03

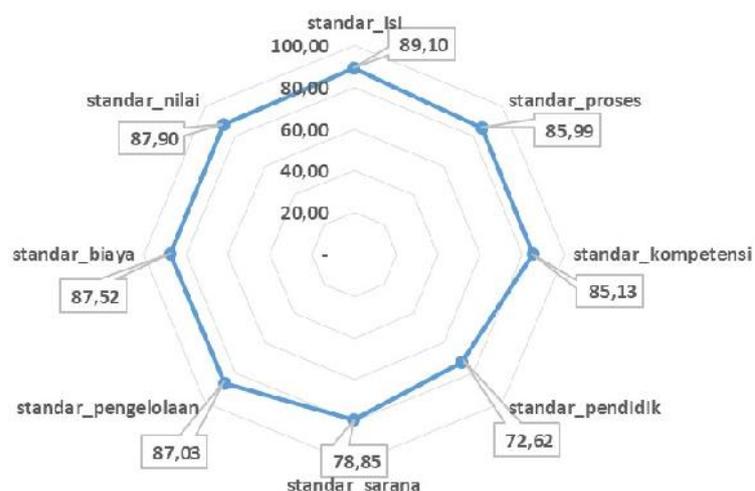
Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 10.445 satuan pendidikan SMK telah berakreditasi B dari jumlah populasi SMK sebanyak 14.303 satuan pendidikan. Capaian ini melebihi target Renstra dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Hal tersebut menyebabkan tingginya intervensi dan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu SMK



Skor standar pendidik dan tenaga kependidikan SMK memiliki skor terendah yaitu 72,62 kemudian standar sarana dan prasarana dengan skor 78,85.

Penyebab rendahnya skor pendidik dan tenaga kependidikan antara lain

- kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- kurang/tidak dimilikinya tenaga kependidikan (tenaga/kepala perpustakaan, laboran, tenaga/kepala administrasi, kepala dan guru



Rata-rata pemenuhan 8 SNP jenjang SMK

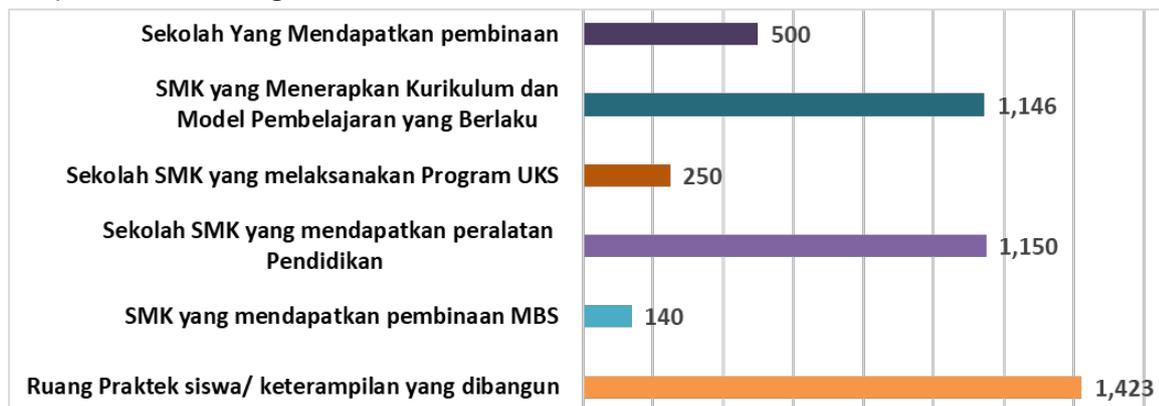
- bimbingan konseling) yang memenuhi syarat yang ditetapkan baik dari segi kualifikasi dan kompetensinya;
- c. kurangnya guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang diakui.
- d. kurangnya program keahlian yang memiliki laboran dengan kualifikasi akademik minimum sesuai standar tenaga laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan rendahnya skor sarana dan prasarana rendah disebabkan oleh

- a. kurangnya sekolah yang memiliki Ruang Pembelajaran Umum (RPU) sesuai dengan program keahlian;
- b. kurangnya sekolah yang memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan;
- c. kurangnya sekolah yang memiliki unit produksi/*business center* sebagai wahana kewirausahaan, yang memiliki: (1) ruang produksi/jasa, (2) sistem usaha sendiri, (3) pembukuan yang tertib dan transparan, (4) Sumber Daya Manusia, (5) profit; serta
- d. sekolah tidak memiliki luas lantai bangunan sesuai ketentuan.

Untuk meningkatkan jumlah sekolah SMK yang berakreditasi minimal B, pada tahun 2019 Kemendikbud melakukan :

1. Program Pendidikan Profesi Guru dan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
2. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan guru sesuai standar yang ditetapkan;
3. Pemberian bantuan peralatan pendidikan dan pembinaan manajemen ke satuan pendidikan (lihat grafik):



Hambatan/kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan proses akreditasi sekolah adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman penjaminan mutu melalui akreditasi khususnya untuk jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian satuan pendidikan yang tidak bersedia atau enggan mengisi data isian akreditasi (DIA) sebagai syarat awal untuk dilakukan akreditasi.
2. Akses terhadap Sispena mengalami kendala di banyak satuan pendidikan di daerah terpencil akibat jaringan internet, sarana, dan sumber daya yang terbatas.

3. Belum ada data akreditasi yang akurat berkenaan dengan satuan pendidikan di beberapa provinsi sehingga mengakibatkan perubahan data sasaran pada saat proses akreditasi berlangsung.
4. Asesor di beberapa provinsi masih kurang sehingga berakibat pada distribusi penugasan asesor yang tidak merata.
5. Sebagian besar asesor tidak memiliki kemampuan bahasa yang baik dan juga kemampuan menyusun rekomendasi yang tepat (bersifat operasional) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akreditasi dan POS Pelaksanaan Akreditasi.

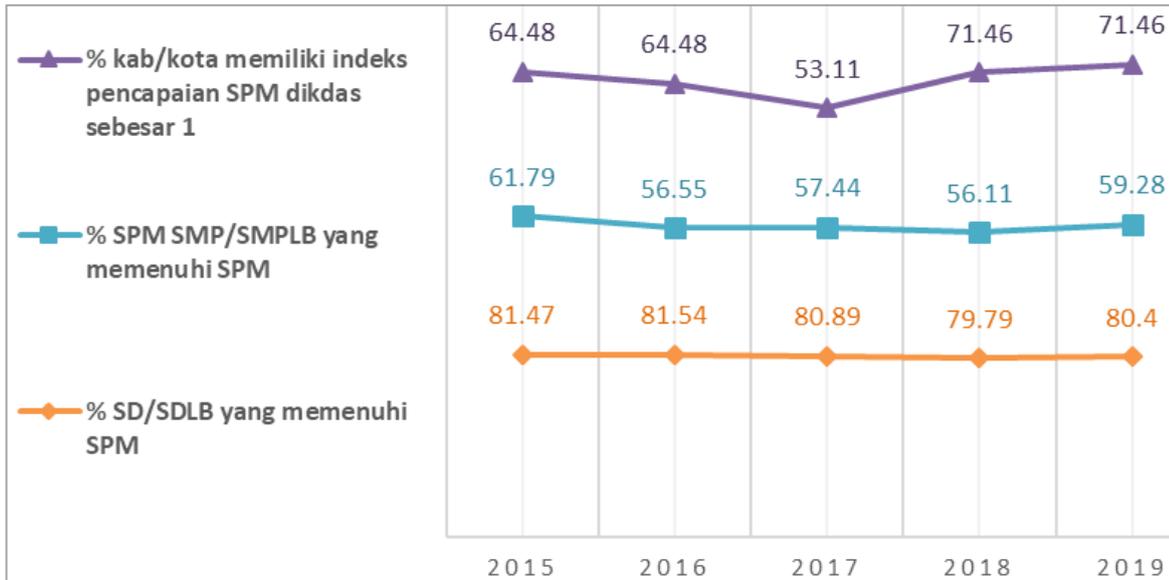
Solusi dan langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi akreditasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait mengetahui manfaat akreditasi sebagai bagian penting dalam proses penjaminan mutu pendidikan;
2. melakukan penguatan implementasi Sispna secara optimal, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun penguatan sumber daya manusia;
3. melakukan koordinasi terkait pendataan satuan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
4. Untuk pelaksanaan akreditasi di provinsi/daerah terpencil, perlu mempertimbangkan mekanisme akreditasi melalui penugasan asesor lintas provinsi atau kebijakan khusus lainnya; dan
5. melakukan penguatan kapasitas asesor khususnya dalam penyusunan rekomendasi yang lebih operasional sehingga dapat menjadi acuan dalam intervensi kebijakan oleh pihak-pihak terkait.

IKSS	Tahun 2019			Target akhir Renstra 2019	% Capaian Terhadap Target akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
IKSS 9.5 Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,49%	80,40%*	130,75	61.49%	130,75%
IKSS 9.6 Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,37%	59,28%*	78,65	75.37%	78,65%
IKSS 9.7 Persentase Kabupaten dan Kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	68%	71,46**	105,1	68%	105,1%

*pengukuran tahun 2019 berdasarkan Permendikbud 32 tahun 2018 dengan mengacu pada angka APM 2018/2019

**realisasi tahun 2018, pengukuran mengacu pada Permendikbud sebelum Permendikbud 32 tahun 2018



Sejak tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemendikbud sendiri menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Permendikbud tersebut menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013. SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota meliputi PAUD, dikdas, dan pendidikan kesetaraan, sedangkan pemerintah provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, pelaksanaan pemenuhan SPM pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan juga masyarakat penyelenggara pendidikan. Pemenuhan pelayanan dasar jenjang PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sedangkan jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Penerima layanan dasar pendidikan dasar adalah anak berusia 7—15 tahun, sedangkan penerima pendidikan menengah adalah anak berusia 16—18 tahun.

Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan dasar SPM pendidikan yang mencakup 1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Standar yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Beberapa program telah dijalankan Kemendikbud untuk membantu pemenuhan SPM pendidikan dasar baik melalui DAK fisik dan DAK non fisik di daerah antara lain:

- a. pembangunan fasilitas penunjang sarana prasarana;
- b. ruang Kelas Baru;
- c. rehabilitasi Ruang belajar;
- d. renovasi Sekolah;
- e. Bantuan Operasional Sekolah kepada 25.566.067 siswa SD dan 10.454.733 siswa SMP.



Hambatan dan kendala yang dijumpai antara lain:

1. adanya perubahan kebijakan terhadap implementasi SPM sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang implementasi Peraturan tentang SPM tersebut berorientasi pada layanan dasar pendidikan yang bertujuan untuk menjamin seluruh penduduk usia sekolah terlayani dengan baik;
2. ketimpangan kualitas pendidikan di daerah;
3. kuantitas dan kualitas sekolah belum merata baik sarana dan prasarana maupun guru;
4. diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses layanan pendidikan.

Langkah antisipasi yang diambil antara lain:

1. melakukan penyesuaian-penyesuaian indikator keberhasilan pencapaian SPM;
2. memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah baik sarana prasarana maupun kualitas guru;
3. menghilangkan label sekolah favorit;
4. memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. melakukan perubahan indikator keberhasilan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. kebijakan zonasi pendidikan.

IKSS 9.8 : Rata-rata Nilai Ujian sekolah SD/SDLB	Target 2019 =7,5	Target Akhir Renstra 2019 =7,5
	Realisasi =6,87	
	% Capaian =92%	
		% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 =92%

Catatan: Realisasi didapatkan dari Nilai UN SD/SDLB yang dikonversi ke dalam skala 1-10

Jika dibandingkan dengan capaian 2018, rata-rata nilai ujian sekolah jenjang SD mengalami kenaikan meskipun kenaikannya sangat kecil yaitu 0,68 poin. Ada tiga mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah nasional jenjang SD yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berikut rata-rata nilai dari ketiga mata pelajaran tersebut.

Pencapaian Nilai US/M SD Nasional Tiga Mapel Tahun Pelajaran 2017/2018 dan 2018/2019

No	Pencapaian Nilai (skala 1-100)	Tahun Pelajaran (Rata-Rata 3 Mapel)		Bahasa Indonesia		Matematika		IPA	
		2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
1	Rata-Rata	68,03	68,71	70,34	70,86	63,46	65,60	70,29	69,66
2	Nilai Terendah	41,03	37,82	43,7	41,76	37,56	23,69	41,82	40,11
3	Nilai Tertinggi	86,06	94,17	83,97	98,34	87,39	94,19	88,04	93,25
4	Rentang Nilai	45,03	56,35	40,27	56,58	49,83	70,50	46,22	53,14
5	Median	68,76	68,65	70,84	71,00	63,6	65,42	71,1	70,03

Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi. Salah satu kegunaan hasil ujian sekolah/madrasah adalah untuk pemetaan mutu satuan/program pendidikan sebagai dasar pembinaan peningkatan mutu pendidikan. Dengan pelaksanaan USBN, peran guru dikembalikan dalam proses evaluasi belajar pada satuan pendidikan. USBN juga diharapkan akan meningkatkan kompetensi guru dan capaian kompetensi lulusan.

Faktor utama yang menyebabkan nilai rata-rata USBN mengalami koreksi dari tahun sebelumnya adalah penerapan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), terutama untuk mata pelajaran Matematika.

IKSS 9.9 : Rata-rata Nilai Ujian nasional SMP/SMPLB	Target 2019 = 7,5	Target Akhir Renstra 2019 = 7,5 % Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 70,4%
	Realisasi = 5,28	
	% Capaian = 70,4%	

Catatan: Realisasi didapatkan dari Nilai UN SMP/SMPLB yang dikonversi ke dalam skala 1-10

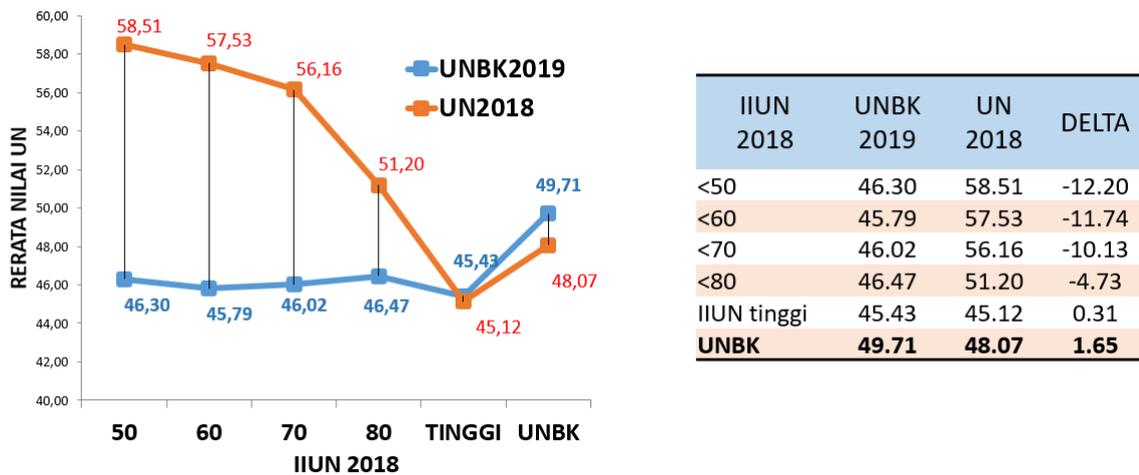
Rata-rata NILAI UN SMP/SMPLB



Capaian rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB pada tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian tersebut adalah karena adanya peralihan dari moda UNKP ke UNBK sehingga terjadi koreksi nilai

UN dan memunculkan nilai UN murni.

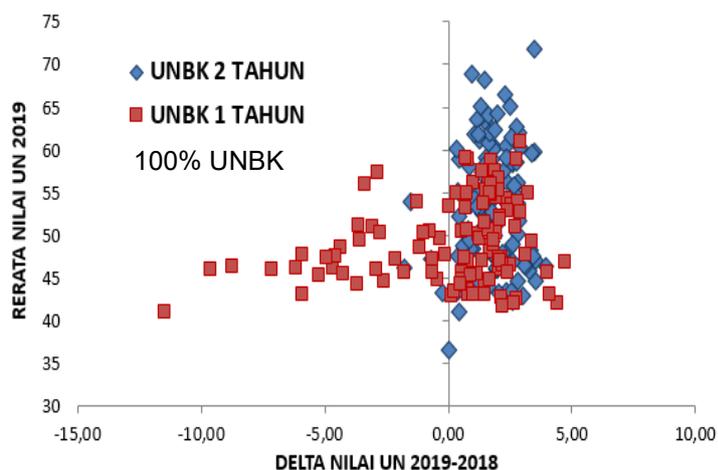
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, Capaian rata-rata nilai UN SMP/SMPLB tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 rata-rata UN SMP/SMPLB hanya 51,84 (dikonversi menjadi 5,18) sedangkan rata-rata UN SMP/SMPLB tahun 2019 meningkat menjadi 52,82 (dikonversi menjadi 5,28). Peningkatan rata-rata UN SMP/SMPLB ini sejalan dengan peningkatan IIUN SMP/SMPLB selama dua tahun terakhir. Berikut gambaran rata-rata nilai UN dan IIUN jenjang SMP/SMPLB.



Rerata Nilai 2 Tahun – Sekolah Penyelenggara UNBK 2019 jenjang SMP

Secara umum untuk SMP yang melaksanakan UNBK tahun 2019, capaian murni nilai UN mengalami kenaikan sebesar 1,65 poin. Koreksi nilai terjadi pada sekolah yang beralih dari UNKP ke UNBK.

Selanjutnya jika dilihat dari tren Capaian Kabupaten/Kota Penyelenggara UNBK Tahun 2019, nilainya adalah sebagai berikut.



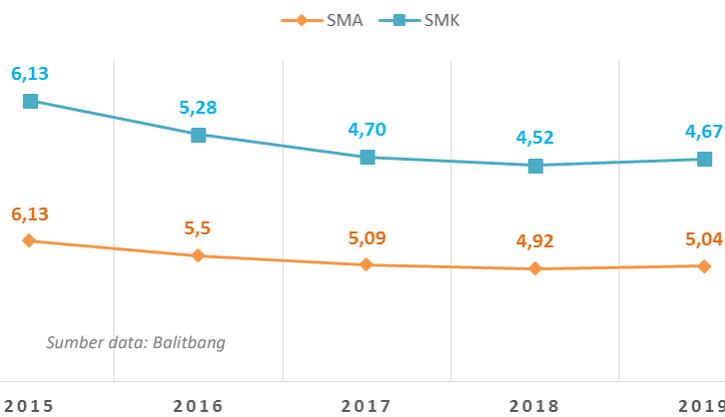
Trend Capaian Kabupaten/Kota-Penyelenggara UNBK Tahun 2019

Jika dilihat dari grafik di atas, koreksi capaian terjadi pada kabupaten/kota yang beralih ke pelaksanaan UNBK seluruhnya. Wilayah yang sudah 100% UNBK selama 2 tahun mengalami kenaikan rata-rata nilai UN.

IKSS 9.10 : Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA dan UN SMK	Target 2019 = 7,5	Target Akhir Renstra 2019 = 7,5 % Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 64,8%
	Realisasi = 4,85	
	% Capaian = 64,8%	

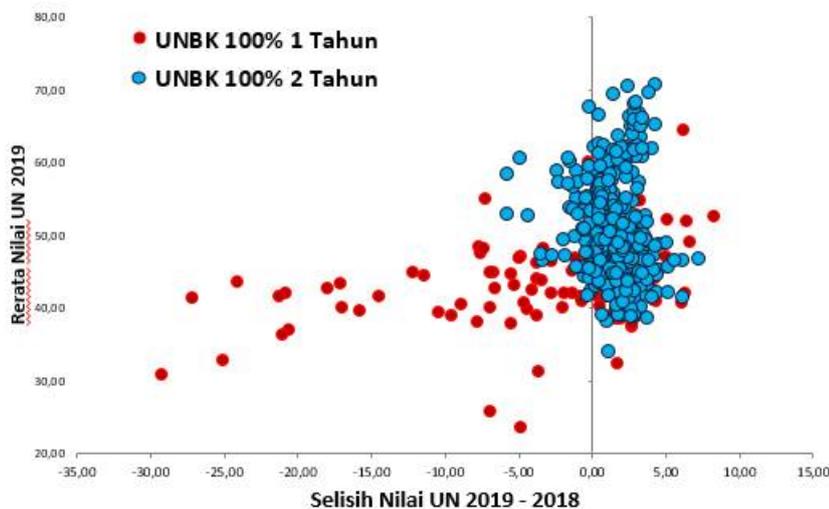
Catatan: Realisasi didapatkan dari Nilai UN SMA dan SMK yang dikonversi ke dalam skala 1-10

RATA-RATA NILAI UN SMA DAN SMK



Capaian rata-rata nilai ujian nasional SMA dan SMK pada tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian tersebut adalah karena adanya peralihan dari moda UNKP ke UNBK sehingga terjadi koreksi nilai UN dan memunculkan nilai UN murni.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, Capaian rata-rata nilai UN SMA dan SMK tahun 2019 mengalami peningkatan. Rata-rata nilai ujian nasional SMA mengalami kenaikan dari 49,20 (dikonversi menjadi 4,92) pada tahun 2018 menjadi 50,42 (dikonversi menjadi 5,04) pada tahun 2019. Selain itu, rata-rata nilai ujian nasional SMK juga mengalami kenaikan dari 45,21 (dikonversi menjadi 4,52) pada tahun 2018 menjadi 46,72 (dikonversi menjadi 4,67) pada tahun 2019. Sebagaimana halnya dengan jenjang SMP, kenaikan rata-rata UN SMA/SMK ini sejalan dengan kenaikan IIUN SMA/SMK selama 2 tahun terakhir.



Trend Capaian Kabupaten/kota-Penyelenggara UNBK 100% SMA Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa beberapa kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK 100%, wilayah yang SMA-nya beralih dari UNKP ke UNBK pada tahun 2019 mengalami koreksi rata-rata nilai hingga 30 poin.

Hasil UN tahun 2019 jenjang SMA dan SMK belum mencapai target yang diharapkan. Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Ketidaksiapan peserta didik untuk menjawab soal-soal yang mengukur level berfikir lebih tinggi.
2. Keseriusan dan motivasi siswa terutama di jenjang SMA dan SMK dalam menghadapi UN menurun.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi secara maksimal aplikasi Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) sekolah yang dapat digunakan sebagai pelatihan bagi siswa untuk menjawab soal yang mengukur level berpikir lebih tinggi.
2. Peningkatan pemanfaatan hasil UN untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan kompetensi pembuatan soal yang mengukur level berpikir lebih tinggi.

IKSS 9.11 : Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu

Target 2019	=80%
Realisasi	=83,05%
% Capaian	= 103,8%

Target Akhir Renstra 2019	=80%
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019	=103,8%

Hasil Penelitian dan Pengembangan	Target 80%	Realisasi	% Capaian
1. Penelitian dan pengembangan kurikulum, model pembelajaran dan perbukuan	209	209	80.00%
2. Pengembangan soal dan penelitian di bidang penilaian	151,830	162,472	85.61%
3. Penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan	45	45	80.00%
4. penelitian arkeologi	83	93	89.64%
5. Pengembangan standar nasional pendidikan	6	6	80.00%
Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu			83.05%

Capaian indikator melebihi target Renstra disebabkan oleh berbagai inovasi yang dilakukan, salah satunya inovasi dalam penulisan soal dengan menggunakan Sistem Inovatif Aplikasi Penilaian (SIAP) yang berbasis online. Hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi guru (penulis soal) di berbagai wilayah Indonesia serta efisiensi waktu dalam penulisan soal.



Berikut hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan.

a. Penelitian dan pengembangan kurikulum, model pembelajaran dan perbukuan

Hasil berupa riset, kajian, dan evaluasi dari proses pengembangan atau implementasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan, dijadikan acuan, inspirasi, atau referensi oleh satuan pendidikan dan daerah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

- 1) 10 model kurikulum dan pembelajaran muatan khusus (muatan antinarkotika, antikorupsi, antiradikalisme, serta muatan konteks daerah papua);
- 2) 80 model rintisan implementasi kurikulum dan pembelajaran;

No	Muatan	Kabupaten/kota	Jenjang					Jumlah
			PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan, Pemikiran, Sikap, dan Tindakan Radikalisme dan Terorisme • Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila 	Kota Banda Aceh		2	1	1	1	5
		Kab. Bogor		2	3	1	1	7
		Kota Bandar Lampung		2	1		1	4
2.	Penguatan Pendidikan Karakter	Kota Cirebon		2	2	1	1	6
		Kab. Bekasi		2	2	1	1	6
3.	Pendidikan Bela Negara	Kab. Anambas		2	1	1	1	5
		Kab. Nunukan		2	1	1	1	5
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Kemaritiman • Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 	Kota Tegal	1	2	1	1	1	6
		Kab. Kep. Seribu	1	2	1	1	1	6
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Literasi Dasar • Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 	Kab. Boyolali		2	1	1	1	5
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Vokasi di Dikdasmen • Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana 	Kab. Pandeglang		2	2	2		6
		Kab. Malang		2	2	2		6
7.	• Layanan Kurikulum 2013 di Tanah Papua	Kab. Manokwari		1	1	1	1	4
		Kab. Merauke		1	1	1	1	4
8.	• Implementasi Mata Pelajaran/Muatan Informatika	Kab. Lombok Tengah		1	2	2		5
Jumlah Total							80	

- 3) 64 Buku teks pelajaran, terdiri dari 44 buku siswa dan guru untuk kelas X jenjang SMK/MAK dan 20 buku siswa dan guru untuk kelas X jenjang SMA/MA;
- 4) 18 Judul buku elektronik interaktif;
- 5) 5 Judul buku audio;
- 6) 31 naskah kajian kurikulum; dan
- 7) Pedoman implementasi TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

b. Pengembangan soal dan penelitian di bidang penilaian

Pengembangan soal dan penelitian di bidang penilaian dilakukan untuk menghasilkan instrumen evaluasi pendidikan yang valid, reliabel, terstandar, dan berkualitas dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional.

Soal yang dikembangkan 2019	Jumlah
Pengembangan soal non akademik	7.902
Pengembangan soal akademik	105.970
Pengukuran kompetensi	48.600
Total	162.472

c. Penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan

Pada tahun 2019 dihasilkan 45 rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang difokuskan pada tujuh topik penelitian. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian digunakan ataupun dirujuk untuk penyusunan Naskah akademik (UU, PP, Permendikbud), Keputusan/Peraturan Eselon I (Pedoman), digunakan pada skala nasional (Raker, RDP, Rembuknas), kutipan pada juknis minimal Eselon II, serta bahan informasi dan publikasi resmi Kementerian.

TOPIK	
	Pembelajaran dan Pengajaran
	Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan
	Tata Kelola Layanan Pendidikan
	Pendanaan Pendidikan
	Pendidikan Vokasi
	Pendidikan Karakter
	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Berikut adalah 45 judul penelitian dan kajian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Topik	No.	Judul Penelitian/Kajian
Pembelajaran dan Pengajaran	1.	Strategi Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Guru dalam Wadah MGMP terhadap Materi Bermuatan HOTS dalam K-13
	2.	Kajian Model Penyusunan Indeks Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai Instrumen Pemetaan
	3.	Kajian Faktor Determinan Efektivitas Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Meningkatkan Literasi Dasar pada Siswa
	4.	Kajian Faktor-faktor Determinan Hasil Belajar Siswa
	5.	Analisis Faktor Kondisi Sekolah Dasar di Indonesia
	6.	Digitalisasi dan Pembelajaran Berkualitas yang Inklusif: Pemanfaatan Platform Pembelajaran Digital oleh Guru dan Siswa
	7.	Peran MGMP dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA
	8.	Kajian Umpan Balik Guru terhadap Proses dan Hasil Pembelajaran Siswa
	9.	Kajian Mengulang Kelas dan Putus Sekolah di Sekolah Dasar
	10.	Kajian Penguatan Ranah Psikomotorik Siswa Sekolah Dasar
	11.	Kajian Praktik Baik Peningkatan Kemampuan Literasi Dasar Siswa SD di Kelas Awal
	12.	Kajian Capaian Implementasi Kurikulum 2013
	13.	Kajian Kesesuaian Buku Teks Pelajaran Sekolah Dasar (SD) dengan Kurikulum IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia

Topik	No.	Judul Penelitian/Kajian
Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan	14.	Pengembangan Instrumen Pengukuran Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar (SD)
	15.	Analisis Keberadaan Guru Tidak Tetap pada Jenjang Pendidikan Dasar
	16.	Kajian Model Klinik Pendampingan untuk Mendukung Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru
	17.	Kajian Model Magang Guru untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran di SMK
	18.	Kajian Ketersediaan Guru SMK dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran
Pendanaan Pendidikan	19.	Kajian Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Optimalisasi Kinerja Guru
	20.	Kajian Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	21.	Kajian Efektivitas Pengelolaan Dana BOS terhadap Kinerja Sekolah
	22.	Kajian Perhitungan Unit Cost dan Strategi Timeline PIP
	23.	Kajian Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah
Pengelolaan Layanan Pendidikan	24.	Kajian Manajemen Sekolah Aman dan Menyenangkan dalam Mendukung Kualitas Pembelajaran
	25.	Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pendidikan
	26.	Kajian Optimalisasi Pengelolaan Penelitian Kebijakan
	27.	Evaluasi Pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
	28.	Analisis Hubungan Rombongan Belajar dan Siswa Per Rombongan Belajar (Rombel) dengan Mutu Lulusan
	29.	Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional
	30.	Kajian Sinkronisasi Peraturan terkait Sistem Zonasi Pendidikan: Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan
	31.	Afirmasi Pendidikan di Wilayah Bencana: Strategi Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik Korban Bencana Alam
	32.	Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit
	33.	Kajian Keberadaan UN Masa Mendatang
Pendidikan Vokasi	34.	Kajian Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Kepariwisata
	35.	Kajian Kesesuaian Kurikulum SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian Tata Boga dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja
	36.	Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SMK Swasta
Pendidikan Karakter	37.	Kajian Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur
	38.	Pengembangan Model dan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Produk Bernilai Kearifan Lokal untuk Penguatan Pendidikan Karakter
	39.	Kajian Toleransi Beragama di Satuan Pendidikan Formal
	40.	Kajian Penguatan Pendidikan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	41.	Pengaruh Pendaftaran Tiga Genre Tari Bali dalam Daftar ICH UNESCO bagi Komunitas Budaya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi
	42.	Strategi Pengembangan Kota Kreatif di Indonesia: Perspektif Pemajuan Kebudayaan
	43.	Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia
	44.	Tata Kelola Kebudayaan dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan
	45.	Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan

d. Penelitian arkeologi;

Pada tahun 2019, dihasilkan 93 kawasan dan situs yang menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan sebagai pemanfaatan destinasi maupun penelitian lanjutan. Rincian rekomendasi kebijakan arkeologi sebagai berikut.

No	Instansi	No	Situs Rekomendasi	Tipe		Keterangan	
				Kawasan	Situs	Destinasi	Penelitian Lanjut
1	Puslit Arkenas	1	Gambar Cadas Figur Manusia Lemagute		✓	✓	
		2	Gambar Cadas Liang Pu'en		✓	✓	
		3	Gambar Cadas Motif Perahu Desa Dolulolong		✓	✓	
		4	Situs Lewoleba		✓	✓	
		5	Balok		✓	✓	
		6	Boto Tumpang		✓		✓
		7	Candi Trisobo		✓		✓
		8	Gua Lawa		✓	✓	
		9	Situs Grogol		✓		✓
		10	Situs-Situs di Pantai Lamreh, Aceh Besar		✓	✓	
2	Balar Bali	11	Kawasan Kabupaten Buleleng	✓		✓	
		12	Doro Bata		✓	✓	
		13	Kawasan Kab. Gianyar khusus DAS Pakerisan-Petanu	✓		✓	

No	Instansi	No	Situs Rekomendasi	Tipe		Keterangan	
				Kawasan	Situs	Destinasi	Penelitian Lanjut
3	Balar Jawa Barat	14	Meriam dan Benteng Adonara		√	√	
		15	Situs Pura Gelang Agung		√		√
		16	Cirendang		√		√
		17	Situs Gunung Lingga		√		√
		18	Situs Mangunjaya		√		√
		19	Astana Gede Kawali		√	√	
		20	Komplek Gudang Pelabuhan		√	√	
		21	Perkebunan Bukittinggul - Sukawana	√		√	
		22	Perkebunan Kertamanah	√		√	
		23	Gua Pawon		√	√	
		24	Bojong Tales (Keramat Wali Unang)		√	√	
		25	Kawasan Bukit Cagar Alam Pananjung Pangandaran	√		√	
		26	Kherkof Kota Sukabumi		√	√	
		27	Dalem Agung Pakungwati		√	√	
4	Balar Jogja	28	Umbul Tupa, Betung, dan Tanjungan		√	√	
		29	Rumah tinggal bangunan Indies		√	√	
		30	Rumah pompa Jabon		√	√	
		31	Candi Sirih		√	√	
5	Balar Kalimantan Selatan	32	Kawasan Keraton Matan-Tanjungpura	√		√	
		33	Kawasan Bukit Mahang dan Bukit Tahapun, di Cekungan Kapuas	√		√	
		34	Situs Sungai Meledang		√		√
		35	Kawasan Water Treatman Sanga sanga	√		√	
		36	Bangunan Kantor Pos Sanga sanga		√	√	
		37	Dataran Fluvial di sepanjang Sungai Krayan		√		√
		38	Situs Kuta Bataguh		√	√	
		39	Situs Gua Cililin 1		√		√
		40	Situs Gua Jauharlin 1		√		√
		41	Buren Jaga		√	√	
		42	Situs Sapundu dan Sandung Desa Kinipan		√	√	
6	Balar Maluku	43	Situs Tiang Pantar Desa Merambang		√	√	
		44	Kei Lein		√	√	
		45	Pulau Kisar		√	√	
		46	Situs Blue Beach		√	√	
		47	Mamuya		√	√	
7	Balar Papua	48	Gua Andarewa		√	√	
		49	Gua Abidon 2		√		√
		50	Gunung Srobu		√	√	
		51	Gua Togece		√	√	
		52	Yomokho		√	√	
		53	Koning U Nibe		√	√	
		54	Ambesibui 1		√	√	
		55	Bunker Saba 1 S/d 5 (komleks Bunker yang di cor)	√			√
		56	Bunker sorido 1 (Bunker besi)		√	√	
		57	Gua Beanembala Naguhi 2		√	√	
		58	Gua Yenberen 2		√		√
8	Balar Sulawesi Selatan	59	Benteng Tindoi		√	√	
		60	Benteng Mandati Tonga		√	√	
		61	Benteng Liya		√	√	
		62	Benteng Ponto Langi		√	√	
		63	Kompleks Mercusuar Wangi Wangi		√	√	
		64	Benteng Katiama		√		√
		65	Benteng Togo Molengo		√	√	
		66	Benteng Baluara		√	√	
		67	Kawasan Mallawa Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	√		√	
		68	Situs Buntu Lebani		√	√	
		69	Situs Kompleks Makam Sikapaya		√	√	
		70	Situs Kompleks Makam Kampala		√	√	
		71	Situs Kompleks Makam Kerajaan Simbang		√	√	
9	Balar Sulawesi Utara	72	Situs Makakilu		√	√	
		73	Situs Tatonaha 1		√	√	
		74	Situs Sumuhi		√	√	

No	Instansi	No	Situs Rekomendasi	Tipe		Keterangan	
				Kawasan	Situs	Destinasi	Penelitian Lanjut
		75	Situs Maruút		√	√	
		76	Gua Mbokita		√		√
		77	Benteng Nassau		√	√	
		78	Benteng Maas		√	√	
10	Balar Sumatera Selatan	79	Kawasan Kars Bukit Bulan	√		√	
		80	Lesung Batu		√	√	
		81	Pasemah	√			√
11	Balar Sumatera Utara	82	Hilimbatuoma		√	√	
		83	Sianjur Mula-Mula	√		√	
		84	Loyang Mendale		√	√	
		85	Loyang Muslimin		√	√	
		86	Loyang Putri Pukes		√	√	
		87	Biara Sangkilon, dan Biara Pembakaran		√	√	
		88	Situs Gua Beringin Dan Gua Carano		√	√	
		89	Situs Bawah Air Pengudang		√	√	
		90	Situs Pengudang		√	√	
		91	Situs Shipwreck Senggiling		√	√	
		92	Kompleks Makam Kuno Sutan Nasinok Harahap	√			√
		93	Gua Mabitce		√	√	

e. Pengembangan standar nasional pendidikan.

Berikut hasil pengembangan Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Berikut ini adalah pengembangan Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan tahun 2019.

1. Penilaian Karya Sastra
2. Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Penyempurnaan SNP SD/MI
4. Penyempurnaan SNP SMP/MTs
5. Penyempurnaan SNP SMA/MA
6. Pengembangan Arah Kompetensi 2045

Hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam menjalankan berbagai tugas tertentu baik sumber daya internal maupun eksternal/mitra kerja sehingga dapat berdampak pada mutu hasil pekerjaan
- b. Beberapa kegiatan pelaksanaan kontrol/pengendalian, percepatan, dan penajaman prioritas belum bisa dilaksanakan maksimal karena penyelesaian setiap tahapan pekerjaan tidak tepat waktu, terdapat perubahan fokus/sasaran/penajaman kegiatan, dan sebab lainnya.
- c. Implementasi sistem kontrak (SBKU) pada penelitian masih mengalami beberapa kendala, terutama penelitian oleh peneliti internal.
- d. Anggaran Bank Soal terbatas sehingga tidak bisa menjangkau penulis soal di seluruh wilayah Indonesia serta pola *review* penulisan soal berbasis kertas secara manual memerlukan waktu yang lama, boros kertas, dan biaya SDM yang tinggi

- e. Kesulitan dalam mendapatkan penulis soal yang sesuai dengan standar untuk soal akademik dan nonakademik.

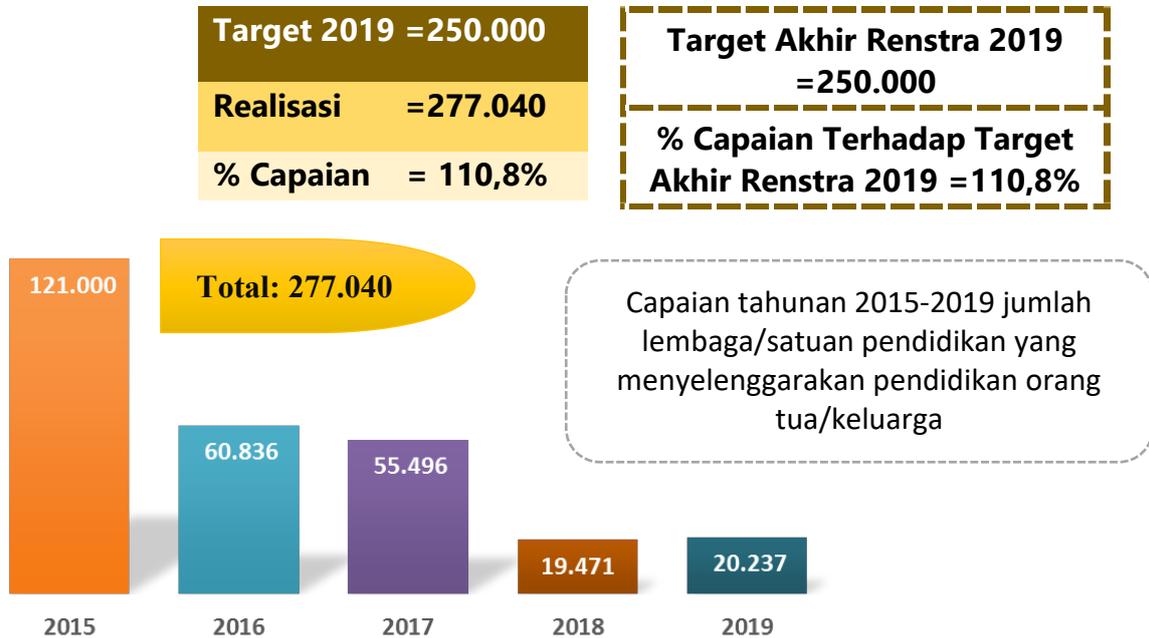
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi adalah

- melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi yang relevan, praktisi, guru profesional dan berpengalaman, serta mitra kerja lainnya;
- meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja, seperti dinas pendidikan, satuan pendidikan, perguruan tinggi, penerbit dan percetakan, dan asosiasi pendidikan baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan;
- mengontrol, mempercepat, dan memprioritaskan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prasyarat bagi pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan agar tidak terganggu dan tidak tertunda penyelesaiannya serta melakukan persiapan dan pengelolaan waktu secara efektif untuk mencapai sasaran dan target kinerja secara maksimal dan berkualitas;
- melakukan revisi anggaran untuk pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti internal dengan menggunakan sistem swakelola;
- menulis soal dengan memanfaatkan aplikasi SIAP yang berbasis daring (*online*) sehingga dapat dilakukan efisiensi waktu dan waktu yang tersisa dapat dioptimalkan untuk proses *review* memperbaiki butir soal yang kualitasnya kurang;
- melakukan seleksi penulis soal yang sesuai standar untuk menghasilkan SDM penulis soal yang mampu menyusun soal-soal akademik dan nonakademik berkualitas baik serta melakukan pelatihan penyusunan instrumen penilaian yang baik untuk peningkatan kapasitas SDM dalam menulis butir soal.

SS10 Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga



IKSS 10.1 : Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga



Capaian tahunan dari 2015 sampai dengan 2019 cenderung turun karena hal-hal berikut.

- Pada tahun 2015 kabupaten/kota yang menjadi sasaran sebanyak 100 kabupaten/kota menurun menjadi 60 kabupaten/kota pada 2016, 80 kabupaten/kota pada 2017, 70 kabupaten/kota pada 2018—2019;
- Pada tahun 2015 intervensi banyak dilakukan di kabupaten/kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Semakin banyak penduduk semakin tinggi kesadaran untuk menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga. Adapun pada tahun-tahun setelahnya intervensi dilakukan di kabupaten/kota pelosok atau 3T yang kepadatan penduduknya rendah.
- Pada tahun 2017—2018 terdapat tambahan tugas untuk *stunting* sehingga fokus anggaran terbagi.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga adalah

1. bantuan bimbingan teknis pendidikan keluarga kepada 19 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Jumlah total peserta adalah 4.990 lembaga yang terdiri atas
 - a. 19 dinas pendidikan provinsi dengan 10 lembaga/satuan pendidikan (SMA, SMK, SLB, pengawas, dan komite sekolah) di tiap kabupaten/kota yang hasilnya sejumlah 1.490 lembaga memahami dan mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan keluarga; dan
 - b. 70 kabupaten/kota, masing-masing 50 kepala satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF, penilik, pengawas, IGKTI, forum PKBM, dan dewan pendidikan, dan dinas

- pendidikan), yang hasilnya sejumlah 3.500 lembaga dapat memahami dan mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan keluarga;
2. sosialisasi penguatan pelaku pendidikan keluarga kepada 70 dinas pendidikan kabupaten/kota rintisan tahun 2019 yang diikuti 15.214 lembaga/satuan pendidikan;
 3. bantuan rintisan pendidikan keluarga untuk pengembangan kompetensi sosial anak dan remaja untuk 12 lembaga/satuan pendidikan terpilih;
 4. bimbingan teknis rintisan pendidikan keluarga untuk pengembangan kompetensi sosial anak dan remaja untuk 1 lembaga/satuan pendidikan terpilih;
 5. sosialisasi dan pendampingan pencegahan HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan tindak kekerasan untuk 10 lembaga/satuan pendidikan terpilih; dan
 6. bimbingan teknis aktualisasi minat dan festival anak dan remaja yang dilaksanakan oleh 10 lembaga/satuan pendidikan terpilih.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator ini adalah

- a. peran fasilitator daerah dalam melakukan pendampingan program pendidikan keluarga ke satuan pendidikan tidak maksimal karena tugas fasilitator bukan pekerjaan utama;
- b. pergantian pengelola/kepala sekolah yang sudah memperoleh bimbingan teknis pendidikan keluarga cukup tinggi sehingga menghambat keberlanjutan program; dan
- c. implementasi pendidikan keluarga tidak diperkuat dengan regulasi di tingkat daerah.

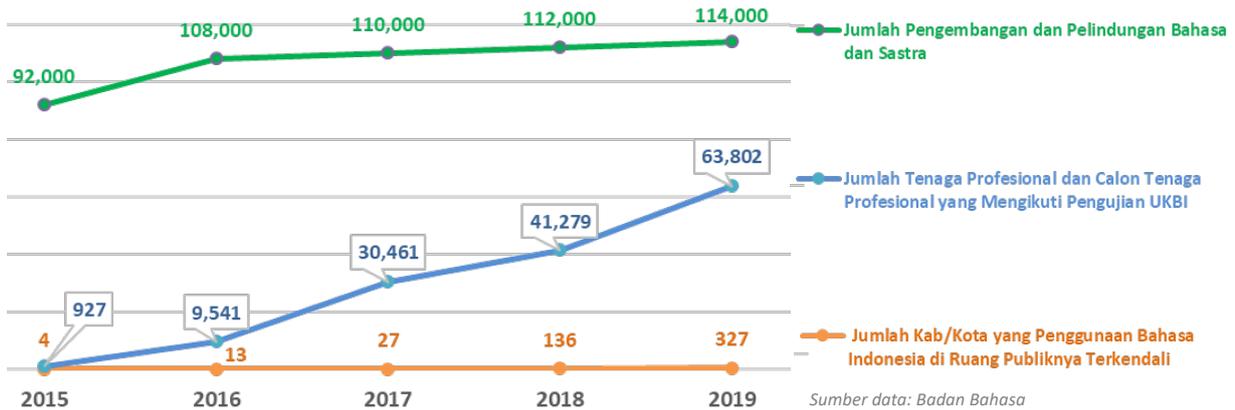
Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah

- a. memperkuat peran, tugas, dan fungsi fasilitator daerah melalui ketetapan kepala daerah/kepala dinas pendidikan;
- b. sosialisasi kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat satuan pendidikan tentang program pendidikan keluarga; dan
- c. memperkuat program pendidikan keluarga dengan mengeluarkan peraturan daerah yang mengacu pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

SS11

Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penkuat daya saing Indonesia

Mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya semakin menunjukkan peningkatan perbaikan. Peningkatan terlihat dari makin banyaknya pengembangan (tata bahasa, ejaan dan kosakata) bahasa Indonesia, makin banyaknya kabupaten/kota yang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik terkendali, dan semakin banyak tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti UKBI



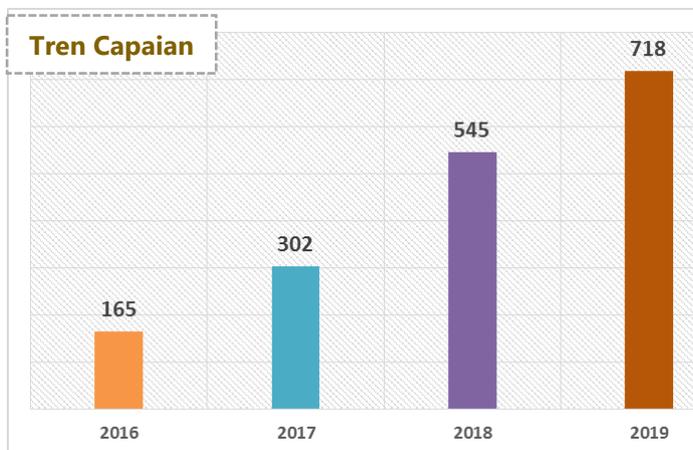
Sasaran strategis tersebut dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut.

1. Penguatan regulasi dalam pengelolaan bahasa dan sastra
2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan dengan fokus pada pelibatan publik dan pemanfaatan media baru
3. Peningkatan mutu berbahasa melalui inovasi pembelajaran bahasa pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal
4. Penguatan jejaring dan kerja sama kebahasaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional
5. Peningkatan promosi kebahasaan untuk peluasan wilayah penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri

IKSS 11.1 : Jumlah pemer kaya minat baca

Target 2019 = 200
Realisasi = 173
% Capaian = 86,5%

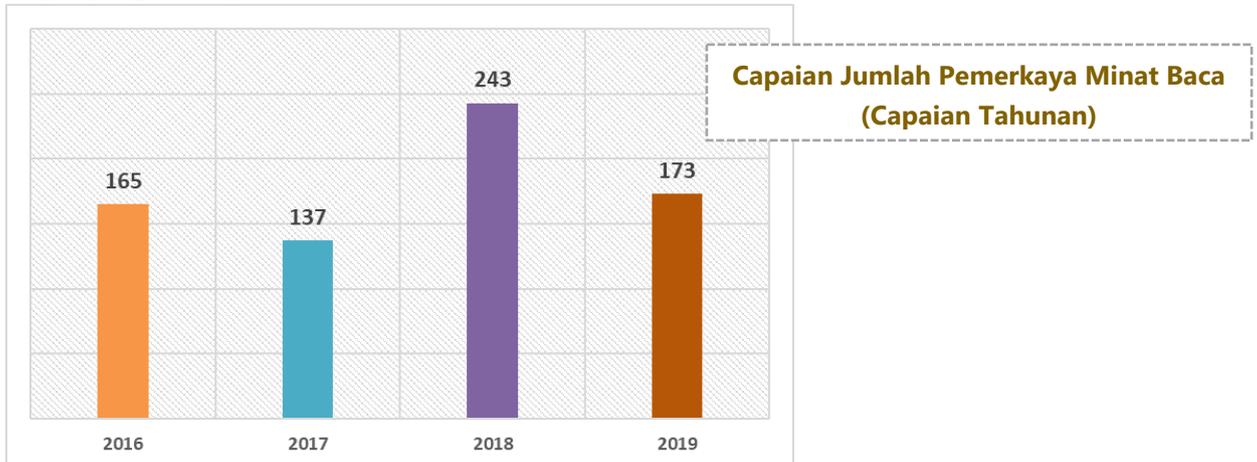
Target Akhir Renstra 2019 = 600
Realisasi Target Renstra 2019 = 718
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 119,7%



Sumber data: Badan Bahasa



Pada tahun 2019, capaian indikator ini belum tercapai, hanya 86,5% atau tercapai 173 dari 200 judul buku yang ditargetkan. Capaian 173 judul buku tersebut adalah buku yang dinyatakan lolos penilaian melalui seleksi penulis yang dilakukan oleh seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaiannya melebihi target yang ditetapkan.



Pada tahun 2019, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan pencetakan dan pengiriman 2.402.320 eksemplar buku dari 60 judul bahan bacaan literasi ke 2.258.560 sekolah di berbagai jenjang, 658 taman bacaan masyarakat (TBM), serta 40 perpustakaan yang berada di daerah 3T yang tersebar di 27 provinsi. Buku-buku tersebut mengandung konten yang mampu menumbuhkan budi pekerti siswa, seperti buku cerita anak atau dongeng lokal, buku biografi inspiratif tentang tokoh lokal atau anak bangsa yang berprestasi, dan buku sejarah yang menebalkan rasa cinta tanah air. Sejumlah 60 judul buku yang didistribusikan merupakan bacaan literasi nonteks pelajaran yang difokuskan untuk jenjang SD (30 judul); SMP (20 judul); dan SMA (10 judul). Buku-buku yang telah terpilih untuk didistribusikan tersebut telah lulus seleksi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Daftar Judul buku tahun 2019.

No.	Judul Buku	Penulis	No.	Judul Buku	Penulis
1	Beras Tabanan: Perjalanan dari Lumpur hingga Dapur	I Gusti Made Dwi Guna	31	Jejak Rasa dari Yogyakarta	Agustina Dwi Rahayu
2	Deli dan Teteruga Kampung Bahari	Imam Arifudin	32	Anak Guo	Desti Natalia
3	Obet Si Anak Bahari Petualangan Anak-Anak dari Kampung Biga Raja Ampat	Ikhsan Nugraha	33	Seruling Peninggalan Abah	Ridwan
4	Jangan Ambil Rumah Kami	Erminawati	34	Tokoh Indonesia yang Gemar Membaca Buku	Eri Sumarwan
5	Bung Sultan Raja Pejuang Republik Indonesia	Yayan Rika Harari	35	Randu	Tria Ayu K.
6	Belajar dari Makanan Tradisional Jawa	Dawud Achroni	36	Ramang Legenda Bola Indonesia	Fitrawan Umar
7	Kakek Bali Memasak	Ni Kadek Heny Sayukti	37	Cerita dari Lembah Baliem	Dzikri El Han
8	Pecel Rengkek Jombang	Kiki Ratnaning	38	Tokoh Seni Idolaku	Norratrri
9	Perjuangan Cemplon	Fahrudin	39	Mengenal Arsitektur Tradisional Indonesia	Arifin Suryo Nugroho

No.	Judul Buku	Penulis	No.	Judul Buku	Penulis
10	Kue Kejujuran dan Cerita Cerita Kuliner Lainnya	Esti Asmalia	40	Mari Mengetahui Bahan Makanan Pokok Pengganti dari Nusantara	Redy Kuswanto
11	Terjebak di Negeri Jajan	Suyitman	41	Kawa Daun	Zulfitra
12	Cerpen dan Dongeng Minuman Nusantara	Suyitman	42	Asal Usul Tanjung Penyusuk Cerita Rakyat dari Bangka Belitung	Dwi Oktarina
13	Jajanan Tradisional Asli Indonesia	Paskalina Oktavianawati	43	Legenda Batu Babi dan Anjing Cerita Rakyat dari Kalteng	Noor Hadi
14	Nyoman Nuarta Pematung Internasional yang Pantang Menyerah	I Gusti Made Dwi Guna	44	Lipi Poleng Tana Lot Cerita Rakyat dari Bali	I Nyoman Argawa
15	Si Saloi yang Cerdik Cerita Rakyat dari Kalbar	Syarifah Lubna	45	Legenda Condet Cerita Rakyat dari DKI	Azhar
16	Mengenal Rancang Bangun Rumah Adat di Indonesia	Faris Al Faisal	46	Legenda Naya Sentika Cerita Rakyat dari Jawa Tengah	Umi Farida
17	Luki dari Ujung Negeri	Imam Arifudin	47	Indrasakti Cerita Rakyat dari Sumatra Utara	Sahril
18	Lanskap Negeri Saman	Rismawati	48	Burung Kekekow dan Gadis Miskin Sulawesi Utara	Sri Diharti
19	Kuliner Yogyakarta Cerita di Balik Nikmatnya	Rifqa Army	49	Karang Melenguh Cerita Rakyat dari Sumatra Barat	Eva Krisna
20	Koki Kumis dan 5 Cerita Kuliner	Mustajab	50	Sapan Didiah Cerita Rakyat dari Sumbang	Joni Syahputra
21	Permainan Tradisional Anak Nusantara	Rizky Yulita	51	Habis Galau Terbitlah Gemilang	Ratih Ayu Apsari
22	Pijar dan Wangi Jajanan Sehat	Laxmi Mustika Cakrawati Fatyana Rachma Saputri, Ni Kadek Heny Sayukti	52	Perempuan Pengibar Sang Saka	Lilik Handoko
23	Rumah Adat Nusantara	Intania Poerwaningtyas dan Nindya K Suwanto	53	Mengenal Kecerdasan Ruang	Muhaimin
24	Kisah Dewi Samboja Cerita Rakyat dari Jawa Barat	Nia Kurnia	54	Putri Serindu Hati dan Perbimbang Cerita Rakyat dari Bengkulu	M. Yusuf
25	Sumur Keramat Jati Herang Cerita Rakyat dari Banten	Widowati Sumardi	55	Arsitektur Rumah Tradisional Aceh	Herman R. N.
26	Siriway Warry Cerita Rakyat dari Papua	Esther Embram	56	Kain Songket Mak Engket	Wylvera Windayana
27	Kisah Si Pego Cerita Rakyat dari Kalimantan Timur	Dwi Hariyanto	57	K.H. Mustofa Kamil Sang Pendekar dari Kota Intan	Budi Suhardiman
28	Si Dayang Rindu Cerita Rakyat dari Lampung	Dian Anggraini	58	Aku Ingin Sekolah Kisah Anak Suku Sakai	Fatmawati Adnan
29	Vuyul Punsu Negugun Cerita Rakyat dari Sulteng	Siti Rahmah	59	Bakti Muda untuk Negara	Agustin Anggriani
30	Pangeran Purbaya dan Raksasa Jin Sepanjang Cerita Rakyat dari DIY	Herry Mardiyanto	60	Jejak Penjaga Zaman Cerita Para Tokoh dalam Berbagai Peristiwa dalam Mengalahkan Kegagalan	Yulianti Kaspul

Tema buku bacaan literasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus berkembang. Tema yang semula hanya menggali kekayaan daerah melalui cerita rakyat berkembang menjadi tema-tema lanskap dan perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kekayaan

bahasa daerah, pelajaran penting dari tokoh Indonesia, kuliner Indonesia, dan arsitektur tradisional Indonesia, serta tema cerita tentang anak Indonesia.

Ketercapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari penjaminan mutu buku bacaan literasi yang dilakukan melalui peningkatan jejaring kerja sama dengan instansi terkait dan pelibatan penulis dari komunitas di daerah. Meskipun capaian kinerja pada indikator ini telah tercapai, BPP Bahasa masih menemukan hambatan dan permasalahan, antara lain

1. penyusunan buku belum memenuhi standar penilaian oleh Pusat Perbukuan, yaitu substansi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan;
2. perencanaan penyusunan buku bacaan literasi belum sinkron dengan jadwal penilaian di Pusat Perbukuan; dan
3. penyediaan buku bacaan literasi belum merata di seluruh Indonesia.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan itu adalah

1. melakukan standardisasi buku literasi melalui penerapan pedoman GLN yang sudah dibuat dan beberapa pedoman literasi yang telah dibuat oleh Pusat Perbukuan;
2. menyesuaikan jadwal penilaian buku bacaan literasi sesuai dengan jadwal yang ada di Pusat Perbukuan; dan
3. memfokuskan pendistribusian buku bacaan ke daerah 3T dengan sasaran SD, SMP, SMA, TBM, dan perpustakaan.

IKSS 11.2 : Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI

Target 2019 = 20.000

Realisasi = 22.523

% Capaian = 112,6%

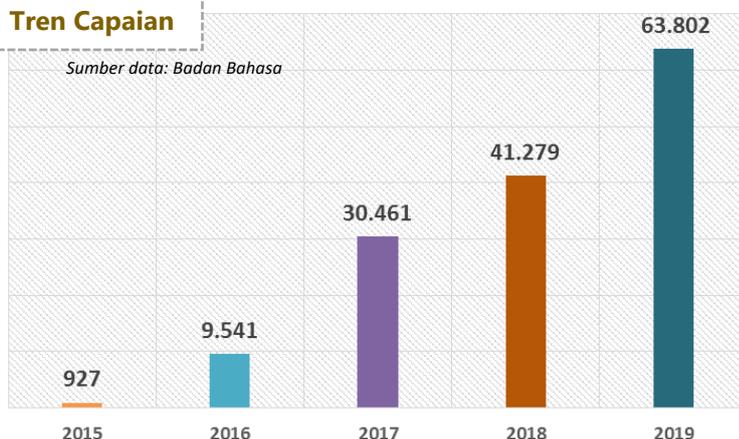
**Target Akhir Renstra
2019 = 60.539**

**Realisasi Target
Renstra 2019
= 63.802**

**% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
2019 = 105,4%**

Tren Capaian

Sumber data: Badan Bahasa



Peserta dari luar negeri sedang melakukan Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI)

No.	Tenaga dan Calon Tenaga Profesi/Profesional	Jumlah Peserta UKBI (Orang)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penulis Konten	-	21	-	-	2	23
2	Dosen	-	86	561	178	160	985
3	Duta Bahasa	60	46	295	283	181	865
4	Guru Bahasa Indonesia	817	2.657	4.500	1.603	1743	11320
5	Guru Umum	-	643	6.384	2.970	4.993	14990
6	Mahasiswa	-	4.877	8.508	5.508	9.069	27962
7	Pegawai Negeri Sipil	-	237	346	139	2089	2811
8	Penerjemah	-	1	41	16	49	107
9	Penyuluh Bahasa	-	44	-	4	-	48
10	Wartawan	-	2	249	47	-	298
11	Kepala Sekolah	-	-	8	57	279	344
12	Konsultan Pendidikan	-	-	8	-	-	8
13	Pengajar BIPA	50	-	18	10	74	152
14	Widyaiswara	-	-	2	-	3	5
15	Peneliti	-	-	-	2	1	3
16	Pengacara	-	-	-	1	-	1
17	Ahli Geologi	-	-	-	-	1	1
18	Bankir	-	-	-	-	4	4
19	CPNS	-	-	-	-	7	7
20	Editor	-	-	-	-	10	10
21	Pekerja Lepas	-	-	-	-	1	1
22	Karyawan Swasta	-	-	-	-	16	16
23	Manajer	-	-	-	-	2	2
24	Pelajar	-	-	-	-	2231	2231
25	Polisi	-	-	-	-	112	112
26	Pustakawan	-	-	-	-	1	1
27	Seniman	-	-	-	-	1	1
28	Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	39	39
29	TNI	-	-	-	-	1444	1444
30	Wakil Kepala Sekolah	-	-	-	-	8	8
31	Wiraswasta	-	-	-	-	3	3
Jumlah (Tahunan)		927	8.614	20.920	10.818	22.523	63.802

Aktivitas pelayanan UKBI terdiri atas dua pelayanan: sosialisasi tes UKBI dan pengujian. Layanan sosialisasi UKBI dibiayai oleh APBN. Sasaran calon peuji dan peuji terdiri atas calon tenaga profesional dan tenaga profesional. Upaya sosialisasi yang dilakukan berdampak pada meningkatnya minat berbagai lembaga untuk melakukan kemitraan. Beberapa lembaga yang sudah melakukan kemitraan dengan Badan Bahasa antara lain adalah sekolah, universitas, bank, dan lembaga layanan bahasa.

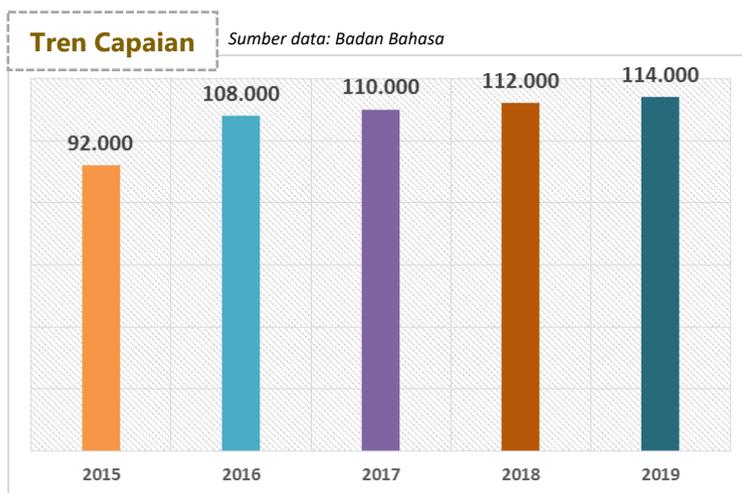
Selain kemitraan dengan berbagai lembaga, BPP Bahasa juga melaksanakan penjajakan pendirian tempat uji kemahiran (TUK) yang dilakukan di luar negeri. Untuk penjajakan pendirian TUK luar negeri dilakukan di dua negara, yakni Thailand dan Prancis. Hasil pendirian TUK di luar negeri akan berpengaruh terhadap peningkatan kemahiran berbahasa bagi calon tenaga profesional dan tenaga profesional di luar negeri. UKBI bagi warga negara asing khususnya bagi tenaga profesional sangat penting guna menunjang kelancaran dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Salah satu negara yang sudah menjadi tempat uji kemahiran (TUK) adalah Australia. Australia merupakan negara yang aktif melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di beberapa universitas dan sekolah di beberapa kota.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah regulasi yang belum mendukung dalam upaya peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.

Langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak tentang kebermanfaatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

IKSS 11.3 : Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra					
Target 2019 = 2000	<table border="1"> <tr> <td>Target Akhir Renstra 2019 = 114.000</td> <td>Realisasi Target Renstra 2019 = 114.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 100%</td> </tr> </table>	Target Akhir Renstra 2019 = 114.000	Realisasi Target Renstra 2019 = 114.000	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 100%	
Target Akhir Renstra 2019 = 114.000		Realisasi Target Renstra 2019 = 114.000			
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 100%					
Realisasi = 2000					
% Capaian = 100%					



Capaian kinerja pada tahun 2019, telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Target tambahan kosakata pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.000 kosakata. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berhasil terealisasi sebanyak 2.000 kosakata (100%). Capaian ini sama dengan capaian kinerja

tahun 2018, yaitu mencapai 2.000 kosakata. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019, yaitu 114.000 kosakata, capaian pada tahun 2019 tersebut telah mencapai 100%.

Ketercapaian indikator kinerja dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

- Inventarisasi kosakata;
- Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- Sidang Komisi Istilah.

Perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat dari perkembangan tata bahasa, ejaan, dan leksikon atau kosakatanya. Perkembangan leksikon bahasa Indonesia tergambar dari pertumbuhan jumlah kosakata dan maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Saat ini KBBI telah terbit dengan tiga media, yaitu KBBI cetak, KBBI Daring, dan KBBI Luring.



KBBI Cetak

KBBI Daring

KBBI Luring

Inventarisasi kosakata pada tahun 2019 telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara dengan berfokus pada inventarisasi kosakata maritim.

Selain inventarisasi kosakata, BPP Bahasa juga menerima usulan kosakata dari masyarakat melalui cara urun daya (*crowdsourcing*). Proses urun daya itu dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan kosakata dan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam menentukan dan mengusulkan kosakata yang dinilai perlu masuk ke KBBI. Masyarakat dapat mengusulkan kosakata untuk masuk ke KBBI Daring dengan menjadi pengguna terdaftar sekaligus mengusulkan revisi jika ada hal yang perlu disempurnakan. Pengguna terdaftar dalam KBBI Daring hingga bulan November 2019 telah berjumlah 44.180 pendaftar dan akan terus bertambah. Dengan cara urun daya ini, masyarakat dapat mengusulkan kosakata dari daerah asalnya untuk masuk ke dalam KBBI. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam proses perlindungan bahasa daerah karena kosakata dari bahasa daerah itu dapat terdokumentasikan dalam KBBI.

Sebagai bahan rujukan, KBBI digunakan oleh akademisi, seperti guru, siswa, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan referensi kosakata dalam penyusunan makalah, referensi pengerjaan soal ujian, peningkatan pemahaman wacana, dan sebagainya. Selain itu, KBBI juga kerap dimanfaatkan berbagai unsur masyarakat, seperti peneliti, penggiat bahasa, jurnalis, dan pemelajar BIPA. Jumlah kunjungan masyarakat dalam KBBI Daring per November 2019 tercatat sebanyak 54.996.492. Adapun rata-rata kunjungan per hari adalah 49.811 kali.

Dalam laman kemdikbud.go.id (laman peringkat 36 di Indonesia versi alexa.com), kata "KBBI" menempati urutan pertama sebagai kata kunci yang paling banyak dicari. Hal ini menunjukkan tingginya apresiasi dan minat masyarakat terhadap KBBI.

Untuk menjamin ketersediaan rujukan kebahasaan bagi semua kalangan, BPP Bahasa juga telah melakukan usaha diversifikasi produk sesuai dengan sasaran pengguna yang khusus, misalnya KBBI Disnetra. KBBI Disnetra adalah KBBI yang khusus dibuat untuk penyandang disabilitas netra dengan fitur audio sebagai andalannya.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah sebagai berikut.

- a. Sumber daya manusia (SDM) masih membutuhkan pelatihan leksikografi dan terminologi yang cukup, terutama SDM di balai/kantor bahasa. Selain itu, jumlah SDM dari

balai/kantor bahasa yang minim mengakibatkan tim redaksi balai/kantor bahasa berganti-ganti karena harus mengampu kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya kualitas usulan hasil inventarisasi kosakata yang diusulkan di KBBI Daring oleh balai/kantor bahasa.

- b. Sulit mencari pakar bidang ilmu/praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dan dapat mengikuti Sidang Komisi Istilah hingga selesai.
- c. Belum ada SDM bidang teknologi, informatika, dan komunikasi (TIK) yang memiliki kemampuan mengolah pangkalan data, membuat aplikasi, membangun laman yang interaktif, dan menjaga keamanan data.
- d. Ada keterbatasan fasilitas pendukung dalam mendukung kegiatan pengembangan kosakata, seperti komputer, keterbatasan peladen (*server*), pencetak, pemindai, dan buku rujukan untuk pengayaan kosakata.

Beberapa langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul adalah

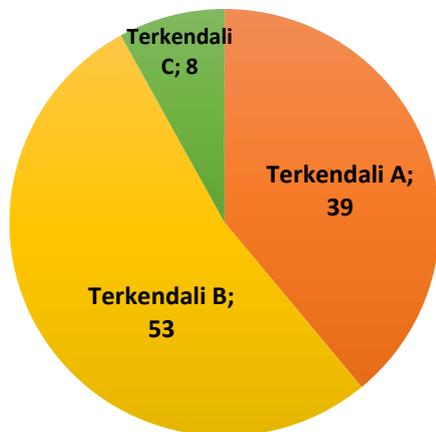
- a. merekrut tenaga teknis yang berkualifikasi dalam bidang linguistik, terutama leksikografi dan terminologi;
- b. merekrut tenaga teknis untuk mengelola TIK, termasuk mencari pengembang lepas yang memiliki kemampuan pembuatan pangkalan data dan sistem aplikasi;
- c. melakukan pemantauan dan pelatihan cara inventarisasi kosakata bahasa daerah untuk meningkatkan pemahaman para editor di balai dan kantor bahasa terhadap inventarisasi dan pengusulan kosakata ke KBBI Daring;
- d. melakukan inventarisasi kosakata dari berbagai media untuk mendokumentasikan kata berfrekuensi tinggi atau kata yang terkait dengan bidang ilmu tertentu;
- e. menyediakan bahan rujukan, seperti kamus, jurnal, majalah, dan buku teknis, baik digital maupun cetak, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kosakata;
- f. melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi para pekamus melalui bengkel, keikutsertaan dalam pelatihan di dalam dan luar negeri, serta keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan leksikografi dan terminologi tingkat nasional dan internasional;
- g. menggerakkan masyarakat melalui organisasi profesi yang berfokus pada kegiatan leksikografi dan leksikologi;
- h. mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kamus dan istilah serta membina ekosistem leksikologi dan leksikografi yang telah terjalin dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Asialex (organisasi leksikografi se-Asia), dan instansi lainnya;
- i. melakukan ekstensifikasi produk kamus, seperti Kamus Disnetra untuk pengguna tunanetra; dan
- j. membuat petunjuk teknis KBBI Daring yang berfungsi untuk mempermudah pengusulan hasil inventarisasi kosakata ke KBBI Daring.

IKSS 11.4 : Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Terkendali

Target 2019 = 150
Realisasi = 191
% Capaian = 127,3%

Target Akhir Renstra 2019 = 300	Realisasi Target Renstra 2019 = 327
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 109%	

Peta Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Kabupaten/kota Tahun 2019, Total 191 Kabupaten/kota (satuan Kabupaten/kota)



Kabupaten/kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik terkendali



Pada tahun 2019 ada 191 kabupaten/kota yang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publiknya terkendali. Dari 100 kabupaten/kota yang sudah selesai tervalidasi, diperoleh hasil capaian (1) Kategori A sebanyak 39, (2) Kategori B sebanyak 53, dan (3) Kategori C sebanyak 8, sedangkan sebanyak 91 kabupaten/kota belum tervalidasi sesuai dengan juknis yang telah disampaikan kepada petugas.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh beberapa aktivitas antara lain

- 1) Verifikasi dan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara pada Ruang Publik di DKI Jakarta;
- 2) Verifikasi dan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara pada Ruang Publik di Daerah;
- 3) Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara bagi Kepala Daerah dalam Rangka Penghargaan Adibahasa;
- 4) Aksi Pengutamaan Bahasa Negara pada Lembaga Pendidikan di DKI Jakarta;
- 5) Seminar dan Lokakarya Penegakan Hukum Pengutamaan Bahasa Negara;
- 6) Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara dengan Pemangku Kepentingan (Lembaga/Badan Publik); dan
- 7) Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemangku Kepentingan.



Terkendali A	Terkendali B	Terkendali C	Terkendali D
Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing yang melemahkan; hampir sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing yang melemahkan; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing yang melemahkan; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat kurang terkendali: secara fisik sangat didominasi bahasa asing yang melemahkan; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang kurang baik.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah

- ketersebaran kabupaten/kota di Indonesia yang sangat luas yang memerlukan biaya dan energi untuk menjangkau dan melakukan pendataan penggunaan bahasanya;
- keterbatasan jumlah ahli bahasa di lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- instrumen yang belum dapat mengakomodasi keterbatasan data di daerah;
- perbedaan persepsi antara pelaksana pusat dan UPT (pemahaman terhadap petunjuk teknis kegiatan);
- perbedaan dukungan pemerintah daerah terhadap program pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Beberapa langkah antisipasi diambil dalam upaya pencapaian target indikator kinerja antara lain

- memprioritaskan kabupaten/kota yang lebih dekat dengan ibu kota provinsi dan meluas sampai daerah terpinggir;
- meningkatkan pengetahuan dan wawasan ahli bahasa melalui program pendampingan;
- melaksanakan bimbingan teknis tenaga pengawas dan pengendali bahasa;

- d) melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan di pusat dan daerah (UPT);
- e) melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pemerintah daerah dalam upaya pengutamaan bahasa negara di ruang publik; dan
- f) penetapan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan percontohan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti program pengutamaan bahasa negara yang mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Administrasi Jawa Timur.

SS12 Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean

Bahasa Indonesia menunjukkan peningkatan peran sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean. Hal itu terlihat dengan makin banyaknya penutur asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia dan banyaknya negara Asean yang mengajarkan bahasa Indonesia

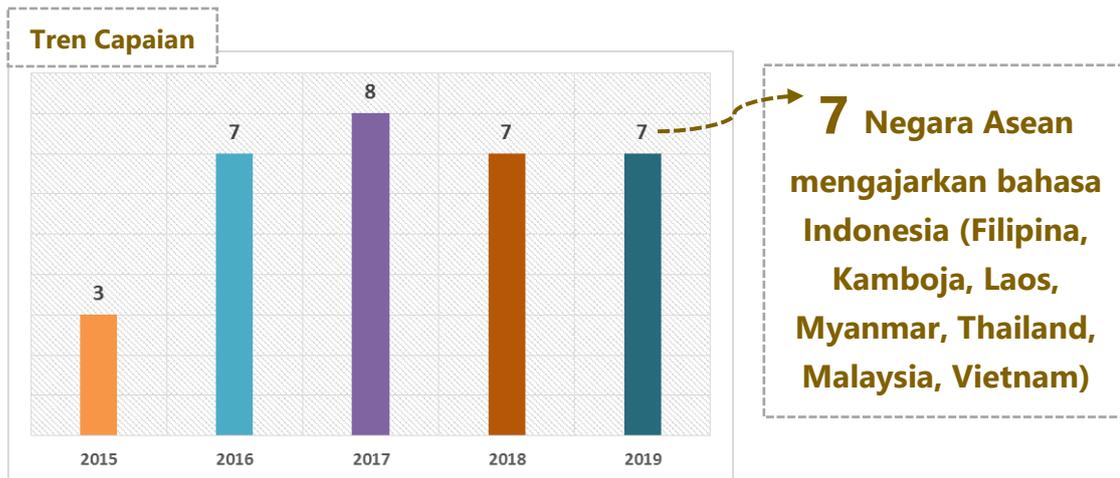
Jumlah penutur asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia



IKSS 12.1 : Jumlah negara Asean yang mengajarkan bahasa Indonesia

Target 2019	= 6
Realisasi	= 7
% Capaian	= 116,67%

Target Akhir Renstra 2019	= 6	Realisasi Target Renstra 2019	= 7
% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 110%			



Salah satu perwujudan IKSS ini adalah melalui Pengiriman Pengajar ke Luar Negeri. Selain pengiriman Pengajar BIPA yang dikirimkan dari tanah air, pengiriman pengajar juga melibatkan pengajar lokal yang berada di negara sasaran. Pengajar lokal tersebut merupakan WNI yang telah lama bermukim di negara ASEAN dan warga lokal yang pernah bermukim lama di Indonesia dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik.

Dalam mendukung pengajaran bahasa Indonesia oleh pengajar BIPA, BPP Bahasa menyediakan beragam bahan ajar BIPA berbasis acuan dan pengayaan sekaligus instrumen tes hasil belajarnya. Kedua bahan ini disusun dengan mengacu kepada standar minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh pemelajar dalam pembelajaran BIPA atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) BIPA yang tercantum di Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017.



Pengajar bahasa Indonesia sedang memberikan pengajaran di luar negeri

Pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor.

1. Peran aktif BPP Bahasa di lingkup Asean dalam forum kerja sama yang melibatkan negara-negara anggota, seperti Forum Mabim, Mastera, SEA Write Award, bersama Seameo Language.
2. Peran aktif Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI dalam mempromosikan dan menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing kepada lembaga pendidikan di luar negeri dan menginisiasasi pembukaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di kantor KBRI.
3. Peran aktif BPP Bahasa dan Atdikbud dalam menjembatani kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan, seperti forum ilmiah ke-BIPA-an, seminar regional Asean, dan bimbingan teknis pengajaran.

Belum tercapainya target BPP Bahasa dalam upaya peningkatan jumlah negara di Asean yang mengajarkan bahasa Indonesia disebabkan faktor-faktor berikut.

1. Prosedur pengurusan administrasi dan perizinan di perwakilan negara Asean yang ada di Indonesia masih berbelit, misalnya pengurusan perizinan di kedutaan Thailand.
2. Jadwal pembelajaran di beberapa negara Asean yang bersifat *multi years* tidak sinkron dengan kalender tahun anggaran di Indonesia.
3. Usulan Standar Biaya Khusus (SBK) belum disahkan oleh Kemenkeu.

Untuk pelaksanaan masa yang akan datang, beberapa langkah perlu dilakukan antara lain

1. komitmen dan partisipasi aktif dari Perwakilan RI di Asean untuk mendukung kepentingan Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di regional Asean;
2. BPP Bahasa beserta Perwakilan RI di Asean lebih fokus memprioritaskan wilayah Asean sebagai sasaran utama guna mewujudkan penginternasionalan bahasa Indonesia di wilayah Asean; dan
3. Disahkannya usulan SBK dalam waktu segera.

IKSS 12.2 : Jumlah penutur asing yang pemelajar bahasa Indonesia

Target 2019 = 2.500

Realisasi = 3.081

% Capaian = 123,2%

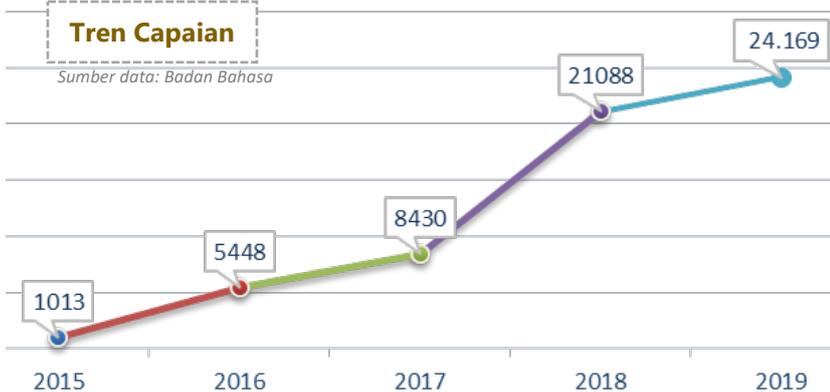
**Target Akhir Renstra
2019 = 2.500**

**Realisasi Target
Renstra 2019 = 3.081**

**% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
2019 = 123,2%**

Tren Capaian

Sumber data: Badan Bahasa



Indikator Jumlah Penutur Asing yang menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia sepanjang kurun waktu tahun 2015—2019 mencapai 24.169 orang pemelajar. Capaian ini dihasilkan dari 205 penugasan Pengajar BIPA lembaga/institusi

penyelenggara BIPA yang tersebar di Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, di tahun 2015—2019.

Persebaran penutur Bahasa Indonesia di negara ASEAN terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Negara	3 Negara (Singapura, Thailand Vietnam)	7 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam)	7 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, , Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam)	6 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam)	7 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, , Thailand, Malaysia, Vietnam)
Jumlah Pemelajar	1.037 orang	8.081 orang	10.580 orang	2.726 orang	2.894 orang

Tercapainya target jumlah penutur asing yang pemelajar bahasa Indonesia disebabkan adanya dukungan program/kegiatan sebagai berikut.

- Pengiriman tenaga pengajar BIPA atas kerja sama dengan berbagai pihak
- Penyusunan bahan ajar BIPA dan bahan tes BIPA cetak dan daring
- Bimbingan teknis bagi pengajar BIPA
- Bimbingan teknis pengajaran BIPA (TOT) di luar negeri
- Pengembangan portal BIPA Daring

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah penutur asing yang pemelajar bahasa Indonesia adalah

- kurang memadainya jumlah pengajar BIPA yang profesional jika dibandingkan dengan kebutuhan; dan
- belum maksimalnya dukungan penginternasionalan bahasa Indonesia dari perwakilan pemerintah RI di beberapa negara dalam pengajaran bahasa Indonesia.

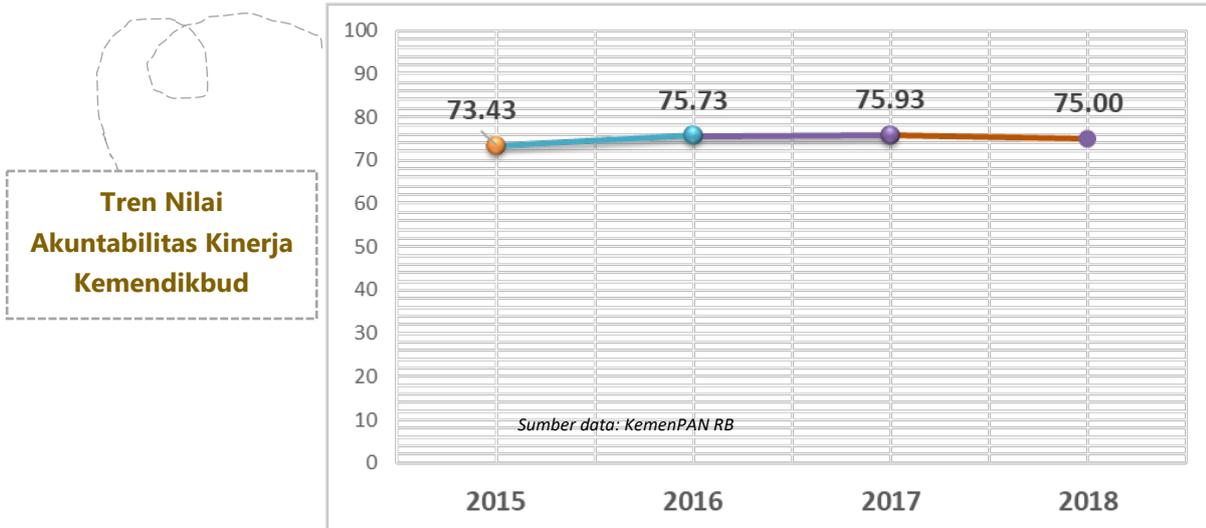
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan ke depan agar jumlah penutur asing yang pemelajar bahasa Indonesia meningkat adalah

- peningkatan jumlah dan mutu pengajar BIPA di dalam dan di luar negeri;
- pengembangan program dan/atau pusat pembelajaran BIPA di luar negeri;
- peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak secara kelembagaan ataupun individu di luar negeri;
- pengembangan jejaring dengan sumber daya yang potensial di luar negeri, seperti diaspora serta pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri; dan
- peningkatan penguatan dukungan kepada mitra dan sahabat Indonesia di luar negeri sebagai aset diplomasi lunak guna kepentingan Indonesia.

SS13

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendikbud

Akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud untuk tahun 2019 belum diketahui sejauhmana tingkat penerapannya, dikarenakan KemenPAN dan RB belum mengeluarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk tingkat Kementerian/Lembaga. Data terakhir tahun 2018 akuntabilitas kinerja berada pada predikat BB dengan nilai 75,00.



IKSS13.1: Skor SAKIP

Target 2019 = 81

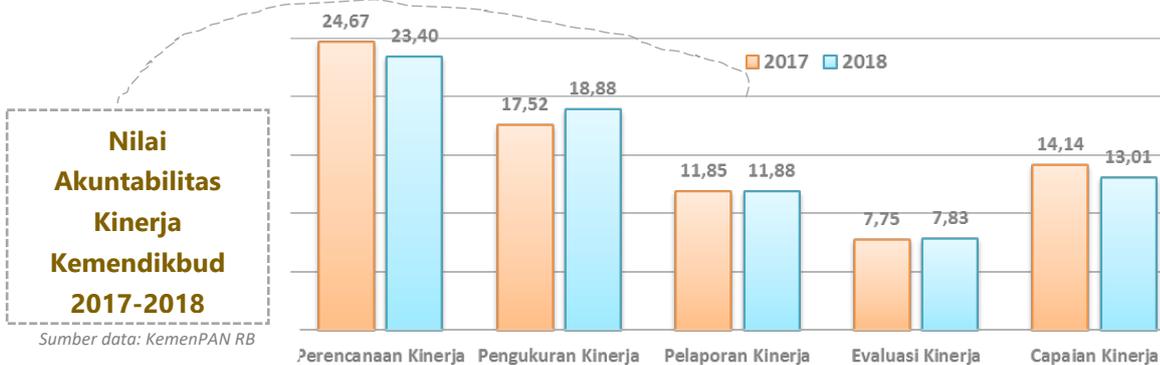
Realisasi = 75 (2018)

% Capaian = 92,59%

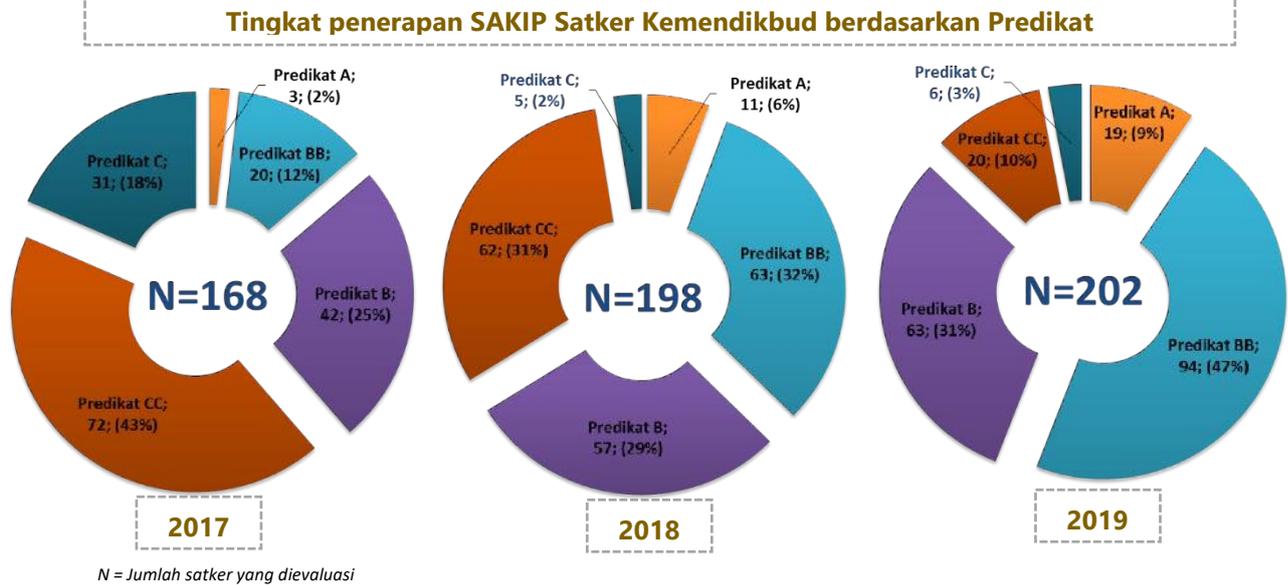
Target Akhir Renstra
2019 = 81

% Capaian Terhadap
Target Akhir Renstra
2019 = 92,59%

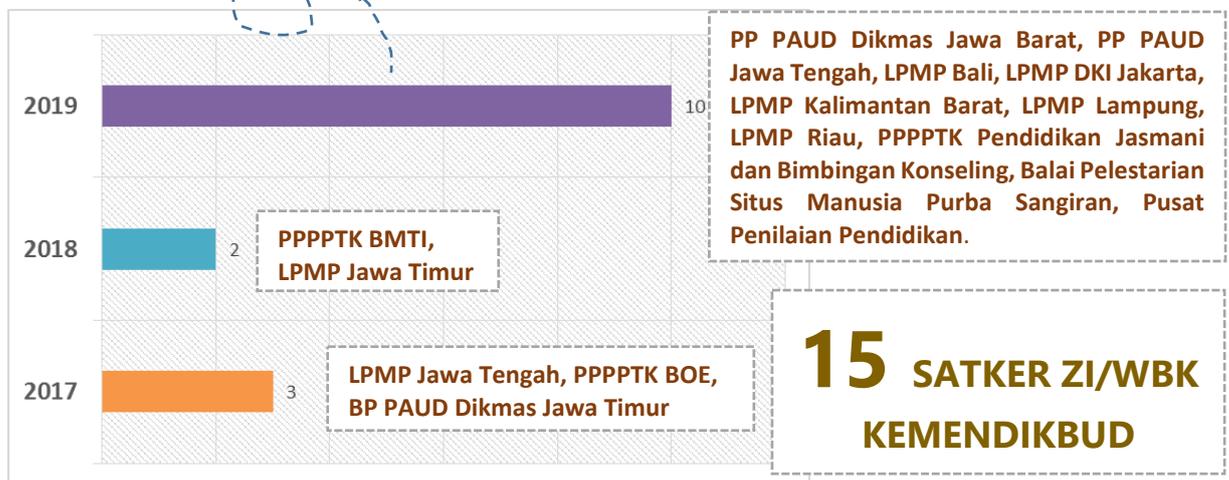
Skor SAKIP Kemendikbud untuk tahun 2018 mengalami penurunan 0,93 poin dari tahun sebelumnya. Tercatat Skor SAKIP tahun 2017 sebesar 75,93. Meskipun turun namun masih masuk predikat "BB", predikat BB menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kemendikbud menunjukkan hasil yang baik. Berikut rincian nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud.



Sesuai hasil evaluasi internal, secara umum penerapan akuntabilitas kinerja Satker di lingkungan Kemendikbud untuk tahun 2019 mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut terlihat dari peningkatan rata-rata nilai dan peningkatan jumlah satker yang memperoleh predikat A, BB, dan B. (lihat grafik)



Peningkatan akuntabilitas kinerja juga terlihat dari meningkatnya jumlah Satker yang mendapatkan Predikat Satker menuju ZI/WBK (Zona Integritas/Wilayah Bebas dari Korupsi). (lihat grafik)



Sesuai evaluasi KemenPAN dan RB, kelemahan/permasalahan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud tahun 2018 yang menyebabkan penurunan nilai adalah

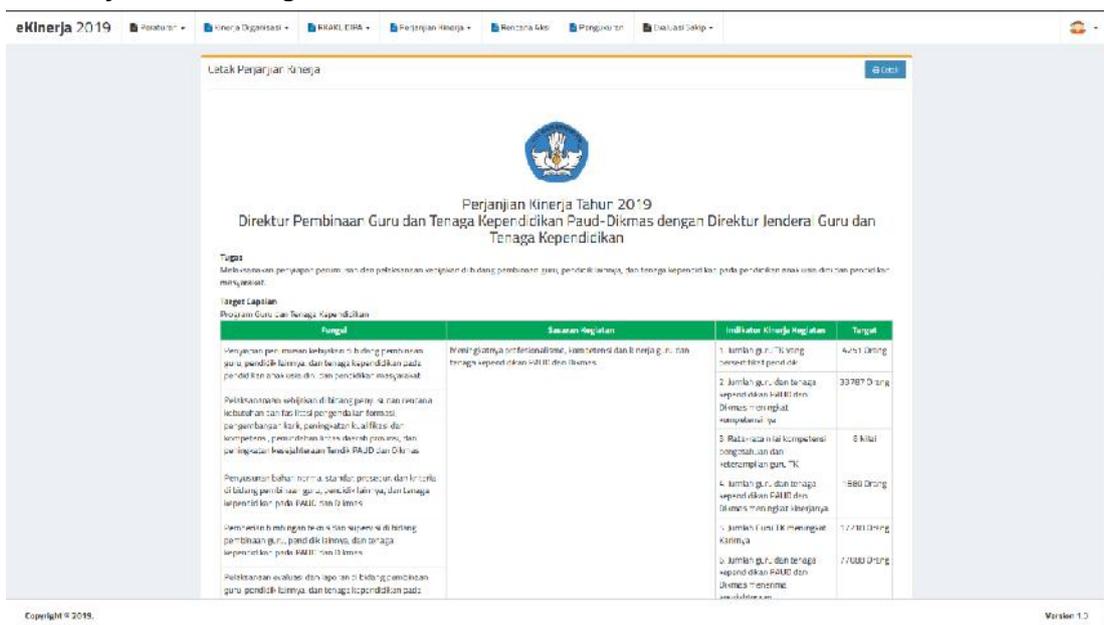
1. penerapan manajemen kinerja di tingkat satuan kerja masih bersifat formalitas semata dan belum menggambarkan kinerja yang diharapkan;
2. sebagian Unit kerja dan Satker belum menerapkan SAKIP dengan baik;
3. definisi kinerja pada satuan kerja tidak selaras dengan kinerja pada tingkat kementerian;

4. perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada satuan kerja belum menggambarkan manfaat atau hasil yang menjadi mandat keberadaan organisasi;
5. perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada Satker tidak sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran;
6. perencanaan dan penganggaran pada eselon II teknis tidak selalu menggambarkan proses bisnis serta tugas dan fungsi serta peran yang ditetapkan;
7. aplikasi *eperformance.kemdikbud.go.id* belum dimanfaatkan dalam pengelolaan kinerja unit kerja dan satuan kerja;
8. evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan belum mampu memicu perbaikan manajemen kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja, antara lain

1. memperbaiki rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada seluruh Satker agar lebih menggambarkan hasil yang akan dicapai;
2. melakukan bimbingan teknis/asistensi dan fasilitasi penerapan SAKIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud;
3. penyusunan pedoman penyusunan Renstra, Laporan Kinerja dan penerapan SAKIP;
4. pendampingan penyusunan laporan kinerja pada UPT yang kualitas laporan kerjanya masih rendah;
5. melakukan pengembangan aplikasi *eperformance* menjadi *e-kinerja.kemdikbud.go.id* Aplikasi e-Kinerja ini merupakan sistem yang dibangun untuk memantau capaian kepala satuan kerja dan UPT sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem lain seperti MoLK Kemdikbud dan aplikasi Krisna dari Bappenas;

Tampilan Aplikasi e-Kinerja
e-kinerja.kemdikbud.go.id



Pembuatan lembar Perjanjian Kinerja menggunakan Aplikasi e-Kinerja sebagai langkah awal pemantauan capaian kinerja satuan kerja dan UPT sampai dengan proses evaluasi

eKinerja 2019

Realisasi/Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kode	Regulasi / Dasar Regulasi / Indikator Kinerja Utama / Kegiatan	Satuan	Target Satuan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Capaian
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	4000	Pembacaan/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	21.980	4874	4852	5615	5615	47202	47202	52.180	52151	100%
1.1	5000.001	Guru/TK/PAUD yang Menerima Materi dan Materi	orang	1209	0	121	13	121	2315	1209	2657	1209	100%
1.2	5000.002	Guru/TK/PAUD yang Menerima Tarjangan Kelas	orang	1098	0	0	0	0	0	1981	1098	1098	100%
1.3	5000.003	Guru/TK/PAUD yang Menerima TK yang Menerima Materi dan Materi	orang	84	0	1	0	0	13	10	15	15	100%
1.4	5000.004	Berikan/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	470	0	100	100	100	3168	391	1703	3169	100%
1.5	5000.005	Guru/TK/PAUD yang Menerima Materi dan Materi	orang	200	0	0	0	0	0	0	1980	200	100%
1.6	5000.006	Materi dan Materi kependidikan dan/atau Timor	orang	200	201	0	200	100	2610	2274	2000	2274	100%
1.7	5000.007	Guru/TK/PAUD yang Menerima Materi dan Materi	orang	1209	0	60	11710	1209	479	1920	1209	1209	100%
1.8	5000.008	Guru/TK/PAUD yang Menerima Materi dan Materi	orang	130	0	0	0	32	1301	10	1277	1300	100%
1.9	5000.009	Layanan/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	1	0	0	0	0	1	0	1	1	100%
1.10	5000.010	Layanan/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	1	0	0	0	0	1	0	1	1	100%

REALISASI/CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Kode	Regulasi / Dasar Regulasi / Indikator Kinerja Utama / Kegiatan	Satuan	Target Satuan	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Capaian
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	5000.011	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	21723	4251	0	525	525	1405	2400	4251	2425	100%
1.1	5000.011.1	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	19127	31753	251	122	1200	1200	12720	12720	12720	100%
1.2	5000.011.2	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	80	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.3	5000.011.3	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	1516	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.4	5000.011.4	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	1516	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.5	5000.011.5	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	1000	1410	0	0	0	1100	1410	1410	1410	100%
1.6	5000.011.6	Menerima/Amatir Telega kependidikan dan/atau Timor	orang	1000	4904	4904	0	0	0	0	0	0	100%

Menampilkan Target dan Capaian Indikator Kinerja per Triwulan

6. pemberian penghargaan kepada satuan kerja dengan penerapan SAKIP terbaik;
7. melakukan pendampingan dan pembinaan akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Kemendikbud;
8. melakukan pengawasan rutin dalam rangka menjaga akuntabilitas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satker di lingkungan kemendikbud; dan
9. Revisi Permendikbud tentang SAKIP di lingkungan Kemendikbud.
10. Memindahkan fungsi Akuntabilitas Kinerja yang semula di Biro Keuangan ke Biro Perencanaan



(Jakarta, Feb.2019) Deputi
KemenPAN dan RB didampingi
Sekretaris Jenderal Kemendikbud
memberikan penghargaan kepada
Satker dengan nilai SAKIP terbaik di
lingkungan Kemendikbud

SS14

Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kemendikbud berhasil mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya dari BPK Selama enam tahun berturut-turut.

6X WTP (2013,2014,2015,2016,2017, 2018)

IKSS14:

**Laporan Keuangan
Kemendikbud**

Target 2019 =WTP

Realisasi =WTP (2018)

**Target Akhir
Renstra 2019
=WTP**

Opini Laporan Keuangan Kemendikbud untuk tahun 2019 belum diketahui tingkat capaiannya. Badan Pemeriksa Keuangan belum mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2019. BPK baru akan mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan anggaran tahun 2019 sekitar bulan Mei tahun 2020.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Untuk memperoleh opini WTP BPK, suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya

1. disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai;
2. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. pengungkapan yang memadai; dan
5. tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.

Permasalahan

Meskipun telah berhasil mempertahankan opini WTP, ada beberapa catatan/temuan permasalahan yang masih muncul sesuai hasil pemeriksaan BPK sebagai berikut.

1. Pengelolaan atas realisasi tunjangan guru bukan PNS belum memadai.
2. Pengelolaan BMN dan aset berwujud belum tertib.
3. Pembayaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan (lebih/kurang bayar, *unit cost* tidak ada di SBM, dll).
4. Pengelolaan PNPB belum sesuai dengan ketentuan (belum ada dasar hukum, kurang setor, digunakan langsung).
5. Ada kelebihan pembayaran belanja (tidak sesuai dengan spesifikasi).

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi temuan BPK-RI adalah

1. pemantauan dan tindak lanjut ke satuan kerja;
2. rekonsiliasi temuan dengan BPK-RI;
3. rakor tindak lanjut temuan dengan BPK-RI dan satuan kerja;
4. penguatan sistem pengendalian internal;
5. pengendalian internal pelaporan keuangan; dan
6. pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbud.

Diperolehnya opini WTP tidak terlepas dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, Kemendikbud melakukan langkah-langkah strategis berikut.

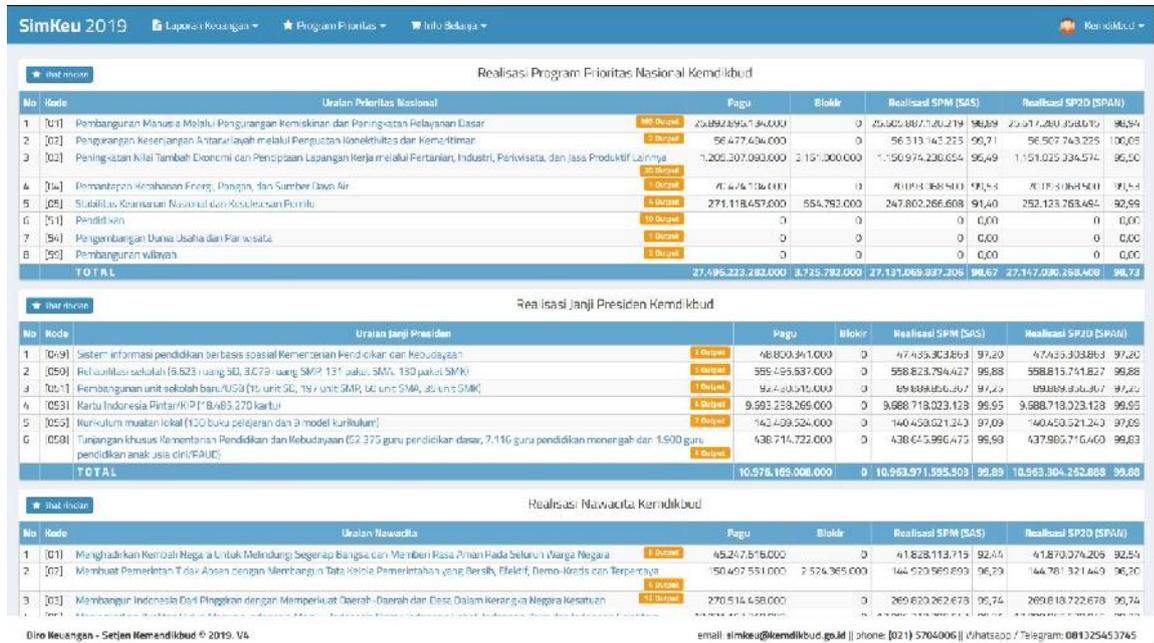
Strategi mempertahankan opini "WTP"

- melaksanakan anggaran secara akuntabel dan didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
- mengoptimalkan pelaksanaan Satuan Pengawasan Intenal (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerja;
- memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti yang sah dan lengkap;
- membuat laporan keuangan yang didukung oleh proses akuntansi yang lazim, baik manual maupun melalui aplikasi;
- melakukan telaah terhadap laporan keuangan (akun dan komponen LK);
- memastikan telah melakukan rekonsiliasi secara tertib, baik internal maupun eksternal;
- mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas semua temuan audit BPK;
- meningkatkan integritas, kapasitas, dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
- melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan, baik di pusat maupun daerah;
- melakukan pengungkapan yang memadai dalam CaLK;
- memastikan penyampaian laporan keuangan tepat waktu;
- meriviu laporan keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal; dan
- mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Monitoring Laporan Keuangan (MoLK) SIMkeu yang telah dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal yang dapat membantu para pimpinan eselon I dan pimpinan satker dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan daya serap secara *online* dan *real time*, serta memudahkan untuk mengetahui satker yang daya serapnya masih rendah dan belum melaksanakan kegiatan.

Tampilan Aplikasi MoLK Kemendikbud mol.kemdikbud.go.id



Aplikasi ini terkoneksi dengan Aplikasi SAS yang digunakan satuan kerja, terkoneksi juga dengan aplikasi SPAN Kemenkeu, sehingga dapat menampilkan data realtime tanpa harus di input secara manual



Menampilkan data Pagu dan Realisasi Anggaran secara cepat dan akurat secara otomatis

SS15

Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan

Pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan menunjukkan perbaikan. Ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebagaimana tergambar dalam grafik disamping.

Tren Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan



IKSS 15 : Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud

Target 2019 = 77

Realisasi = 81,62

% Capaian = 106%

Target Akhir Renstra 2019 = 77

% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2019 = 106%

Sesuai PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, Indeks sebesar 81,62 masuk dalam interpretasi **sangat memuaskan/sangat baik**. Capaian tersebut meningkat 0.69 poin dari tahun sebelumnya.

No.	Indeks (%)	Kategori	CSI	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan Sekali	Istimewa
2.	> 80 - 90	A	Sangat Memuaskan	Sangat Baik
3.	> 70 - 80	BB	Memuaskan	Baik
4.	> 60 - 70	B	Cukup Memuaskan	Cukup Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	> 50 - 60	CC	Kurang Memuaskan	Agak baik, perlu perbaikan yang tidak mendasar
6.	> 30 - 50	C	Tidak Memuaskan	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
7.	> 0 - 30	C	Sangat Tidak Memuaskan	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Jumlah responden dalam survei sebanyak 12.501 dari target 12.000 responden, dengan *sampling error* sebesar +/- 1,03%, pada interval kepercayaan 95,0%. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan masing-masing provinsi diwakili oleh 1 kota dan 1 kabupaten.

Pengukuran indeks kepuasan Kemendikbud tahun 2019 merupakan nilai rata-rata dari tiga bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan Unit Layanan Terpadu (ULT). Dengan capaian tergambar pada grafik.



Peningkatan nilai indeks

kepuasan Kemendikbud tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 dipengaruhi oleh peningkatan layanan/program di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan ULT.

Dalam bidang Pendidikan terjadi peningkatan program diantaranya adalah Program Indonesia Pintar, Kurikulum, UN/USBN, buku teks pelajaran, sarana dan prasarana, Pendidikan vokasi, Pendidikan kecakapan kerja, Pendidikan kecakapan wirausaha, peningkatan dan pengembangan kapasitas pendidik, sertifikasi guru, pengembangan karir dan kepangkatan guru, akreditasi satuan Pendidikan, Bantuan Operasional sekolah (BOS), Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI), Penyuluhan Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Dalam bidang Kebudayaan terjadi peningkatan pada program Revitalisasi desa adat, fasilitasi kegiatan kesenian, fasilitasi kegiatan anggoro kasih, revitalisasi cagar budaya dan permuseuman, revitalisasi taman budaya, dan fasilitasi sejarah. Peningkatan layanan ULT dengan meningkatkan sarana dan prasarana ULT melalui renovasi ruang pelayanan ULT, membina ULT di setiap provinsi, dan layanan melalui daring.

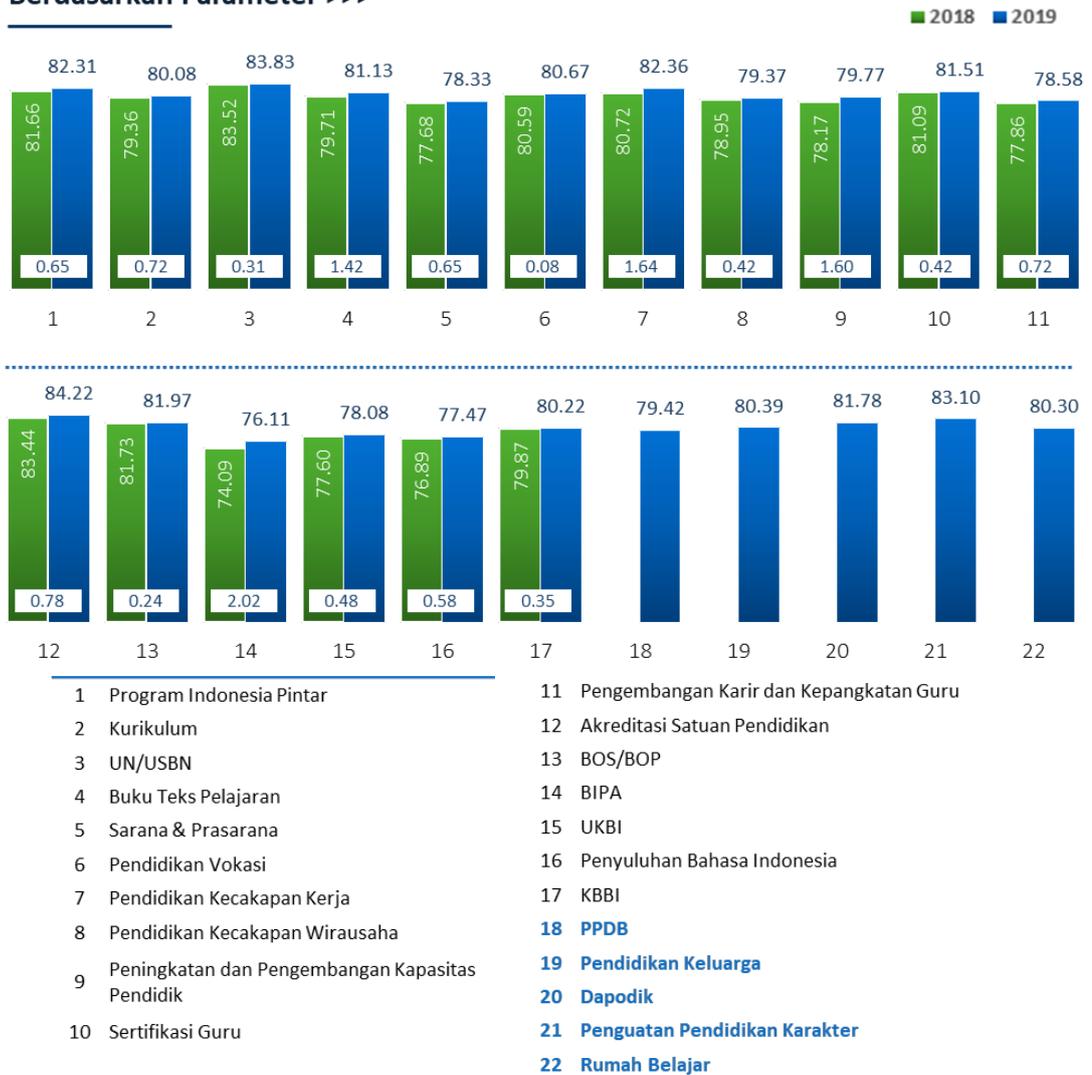
1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan

Indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan sebesar 80,50 atau masuk kategori Sangat Tinggi/Memuaskan. Indeksnya meningkat 0,70 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan indeks kepuasan didorong oleh peningkatan kepuasan semua pemangku kepentingan terutama Pendidik dan tenaga Kependidikan.



Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan Berdasarkan 22 Parameter. Sebagian besar parameter bidang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan parameter yang ada, indeks akreditasi satuan pendidikan memiliki indeks tertinggi yaitu 84,22, sedangkan indeks penyuluhan Bahasa Indonesia memiliki nilai terendah yaitu 77,47.

Berdasarkan Parameter >>>



- | | |
|---|--|
| 1 Program Indonesia Pintar | 11 Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru |
| 2 Kurikulum | 12 Akreditasi Satuan Pendidikan |
| 3 UN/USBN | 13 BOS/BOP |
| 4 Buku Teks Pelajaran | 14 BIPA |
| 5 Sarana & Prasarana | 15 UKBI |
| 6 Pendidikan Vokasi | 16 Penyuluhan Bahasa Indonesia |
| 7 Pendidikan Kecakapan Kerja | 17 KBBI |
| 8 Pendidikan Kecakapan Wirausaha | 18 PPDB |
| 9 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik | 19 Pendidikan Keluarga |
| 10 Sertifikasi Guru | 20 Dapodik |
| | 21 Penguatan Pendidikan Karakter |
| | 22 Rumah Belajar |

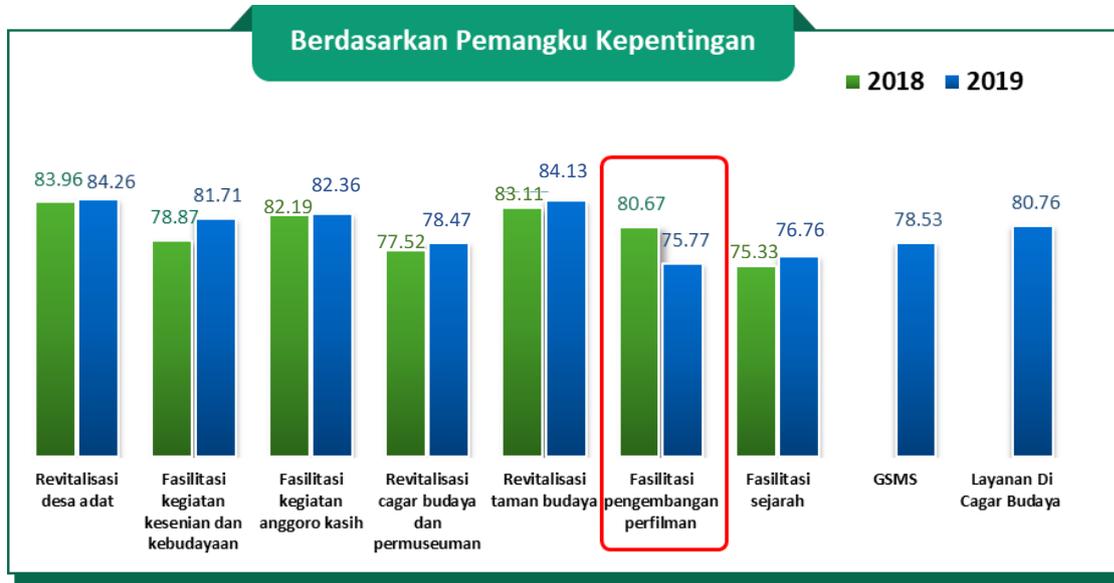
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan

Indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan mengalami peningkatan dari 79,43 menjadi 80,31 dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi/Memuaskan.

Berdasarkan parameter pengukuran indeks kepuasan bidang kebudayaan, Indikator yang turun dibandingkan tahun sebelumnya adalah fasilitasi pengembangan perfilman. Fasilitasi pengembangan

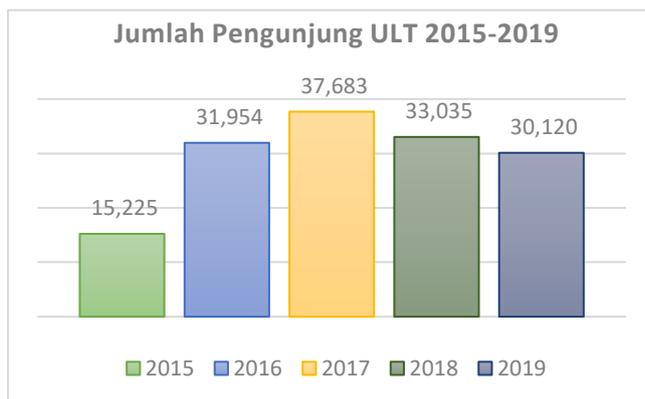


perfilman tahun 2019 memiliki nilai 75,77 menurun jika dibandingkan nilai tahun 2018 yang sebesar 80,67. Indikator Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan layanan di cagar budaya baru dilakukan pengukuran pada survei tahun 2019, sehingga tidak dapat dibandingkan nilainya terhadap tahun 2018.



3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Layanan ULT

Indeks kepuasan layanan ULT di Kemendikbud sebesar 84,05 masuk kategori "Sangat Memuaskan" meningkat 0,50 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,55, walaupun terjadi penurunan jumlah pengunjung ULT. Penurunan dikarenakan ULT sudah ada di UPT Kemendikbud di setiap provinsi.



Permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.

1. Bidang pendidikan terdapat kendala seperti pemenuhan sarana prasarana serta pengembangan karir dan kapasitas guru.

2. Bidang kebudayaan terdapat kendala seperti revitalisasi cagar budaya dan permuseuman serta fasilitasi pengembangan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. meningkatkan sarana prasarana melalui kecukupan satuan pendidikan, meningkatkan kondisi sarana prasana pada satuan pendidikan, dan kelengkapan fasilitas di satuan pendidikan;
2. meningkatkan layanan pengembangan karir dan kapasitas guru melalui kejelasan persyaratan program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, kemudahan prosedur mengikuti program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, pilihan jenis program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, kesesuaian program peningkatan kapasitas dengan tuntutan pekerjaan guru dan tenaga kependidikan, kecukupan frekuensi program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, dan manfaat program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan; dan
3. merevitalisasi cagar budaya dan permuseuman yang perlu ditingkatkan kelengkapan fasilitas, keramahan petugas, kenyamanan di obyek budaya, dan kelengkapan informasi di objek budaya.



REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kemendikbud tahun 2019 sebesar Rp37.393.540.578.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian lima belas sasaran strategis dengan 45 indikator kerjanya yang terdistribusi ke delapan program pendidikan dan kebudayaan (lihat grafik).

KEMENDIKBUD	PAGU 2019	REALISASI 2019	97,60%
	37.393.540.578.000	36.494.689.999.332	

Realisasi anggaran delapan program Kemendikbud



Efisiensi anggaran

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, seluruh kementerian/lembaga diharapkan melakukan penghematan penggunaan anggaran khususnya belanja barang. Anggaran hasil efisiensi dialokasikan untuk membiayai program prioritas seperti Program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter, peningkatan profesionalisme guru, program vokasi, pemberian bantuan siswa miskin, rehabilitasi ruang kelas rusak, dan pembangunan sekolah dan kelas baru terutama di daerah 3T.

Pada tahun 2019, ada sisa anggaran sebesar 2,4% atau Rp898.850.578.668 yang tidak digunakan. Anggaran tersebut merupakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan di tahun 2019 dan tidak dapat dioptimalisasikan kembali disebabkan terbatasnya waktu. Sumber penghematan anggaran terutama berasal dari efisiensi belanja barang meliputi pengembalian belanja, perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non-operasional lainnya.



Capaian

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Indonesia Pintar

Salah satu isi nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Untuk merealisasikan janji tersebut, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 menugaskan Kemendikbud untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Menindaklanjuti tugas tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Program PIP merupakan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6—21 tahun. Secara umum, PIP yang dijalankan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6—21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun;
2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
3. menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan kembali untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

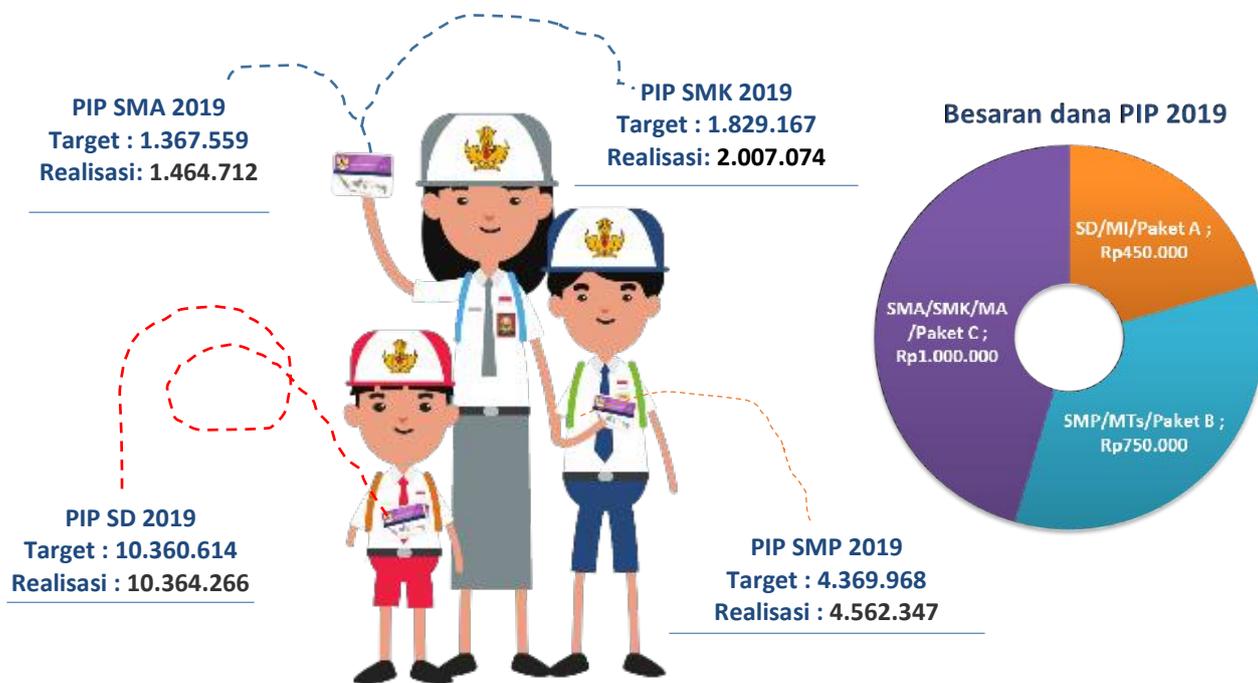
PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6—21 tahun dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP),
2. Peserta dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus:
 - a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH),
 - b. Peserta didik dari keluarga pemegang KKS,
 - c. Peserta didik berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti asuhan/panti sosial,
 - d. Peserta didik terkena dampak bencana alam,
 - e. Peserta didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah,
 - f. Peserta didik mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah, dan
 - g. Peserta pada lembaga kursus dan satuan pendidikan nonformal.
3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

KIP diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Kartu ini memberikan jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, dan biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.



Capaian PIP tahun 2019



Total PIP
Target : 17.927.308 // Realisasi : 18.398.471 (102,63%)

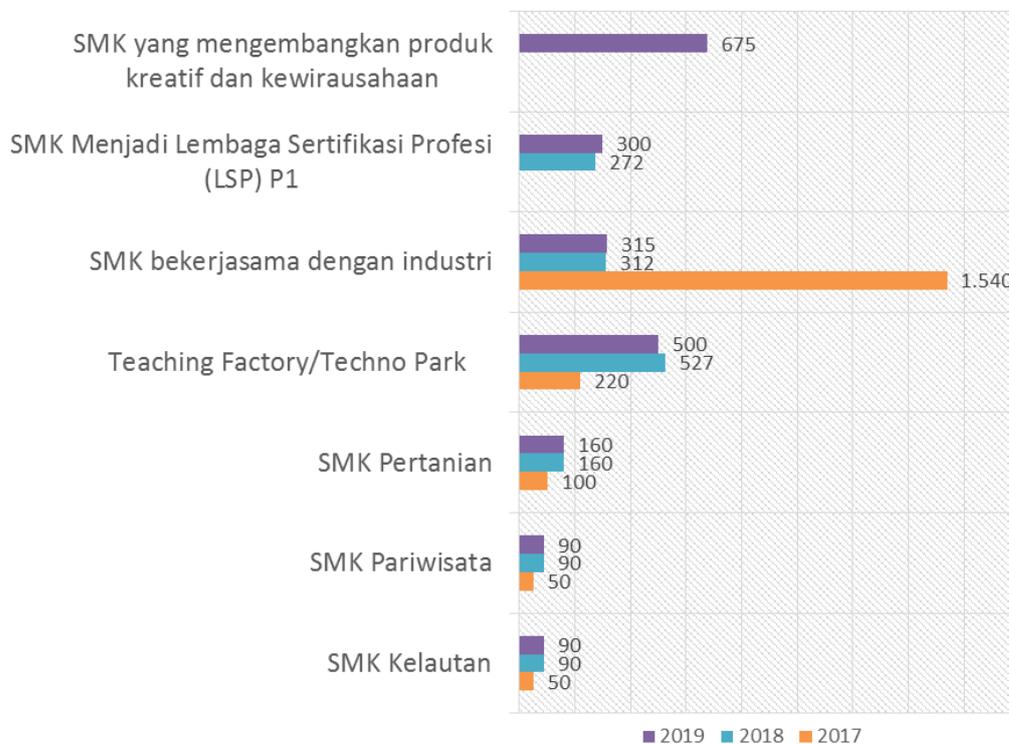
Jenjang	Alokasi Anggaran (ribuan)	Realisasi Anggaran (ribuan)	%
SD	4.232.342.895.000	4.229.386.677.072	99,93%
SMP	2.729.338.144.000	2.729.308.228.800	99,99%
SMA	1.193.037.909.000	1.190.867.722.298	99,82%
SMK	1.538.519.321.000	1.537.976.849.355	99,96%
Total	9.693.238.269.000	9.687.539.477.525	99,94%

2. Program Pendidikan Vokasi

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan mengintruksikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan revitalisasi pendidikan SMK. Revitalisasi SMK diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan regional dan global, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kemendikbud menjadikan program vokasi sebagai program unggulan. Berbagai persiapan baik infrastruktur, kurikulum, dan tenaga pengajar disiapkan Kemendikbud

Untuk tahun 2019, Kemendikbud melakukan penguatan vokasi kepada SMK bidang kelautan, pariwisata, pertanian. Selain itu, penguatan dilakukan melalui *teaching Factory*, *Teckno park*, penguatan kerjasama dengan industridan penyelarasan kejuruan.



Capaian Dukungan Program Vokasi 2019

Revitalisasi pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemendikbud melakukan revitalisasi sebanyak 1000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga tahun 2019. Revitalisasi SMK dilakukan melalui berbagai hal, seperti penajaman kurikulum berbasis kebutuhan pasar, penataan bidang keahlian/program studi, penyusunan modul, dan pemenuhan kebutuhan guru produktif. Upaya lain yang dilakukan antara lain peningkatan sarana dan prasarana, pembentukan *teaching factory*, akreditasi-sertifikasi, dan sistem perbaikan kerja lapangan. Pemagangan serta kemitraan dengan industri juga dilakukan oleh Pemerintah.

3. Program Penguatan Karakter

Nawacita Presiden Joko Widodo salah satu diantaranya adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemendikbud melakukan penguatan karakter siswa melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olahraga. PPK bertujuan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak. PPK memfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu *religius*, *nasionalis*, *gotong royong*, *mandiri*, dan *integritas*. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

PPK diimplementasikan baik di lingkungan sekolah maupun di keluarga/lingkungan. Pada lingkungan sekolah, PPK dilakukan melalui kegiatan pembiasaan (memulai hari dengan upacara/apel, menyanyikan lagu nasional/daerah, doa bersama, membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran), kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka PPK pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Jenjang SD

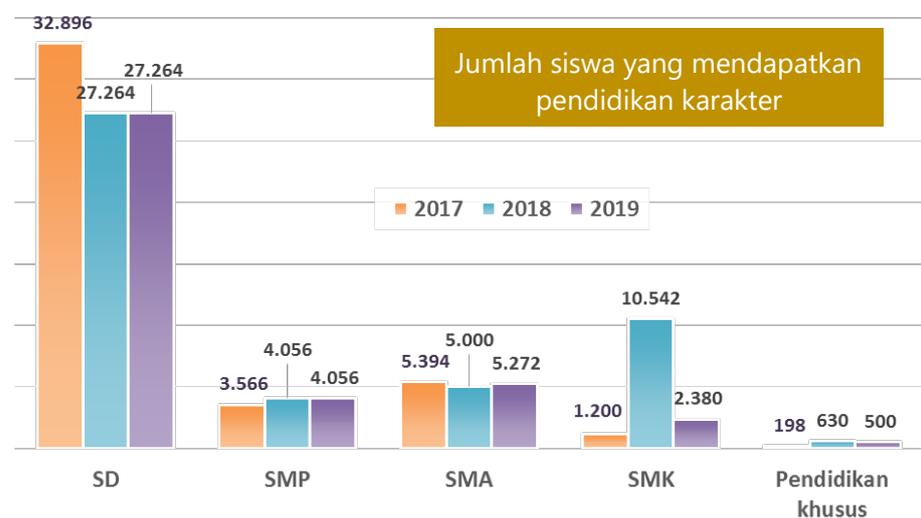
- Lomba gudep unggul dan penggalang ceria: diikuti 27.264 siswa
- kuis Siap-Siap Aku Bisa (SSAB)

2) Jenjang SMP

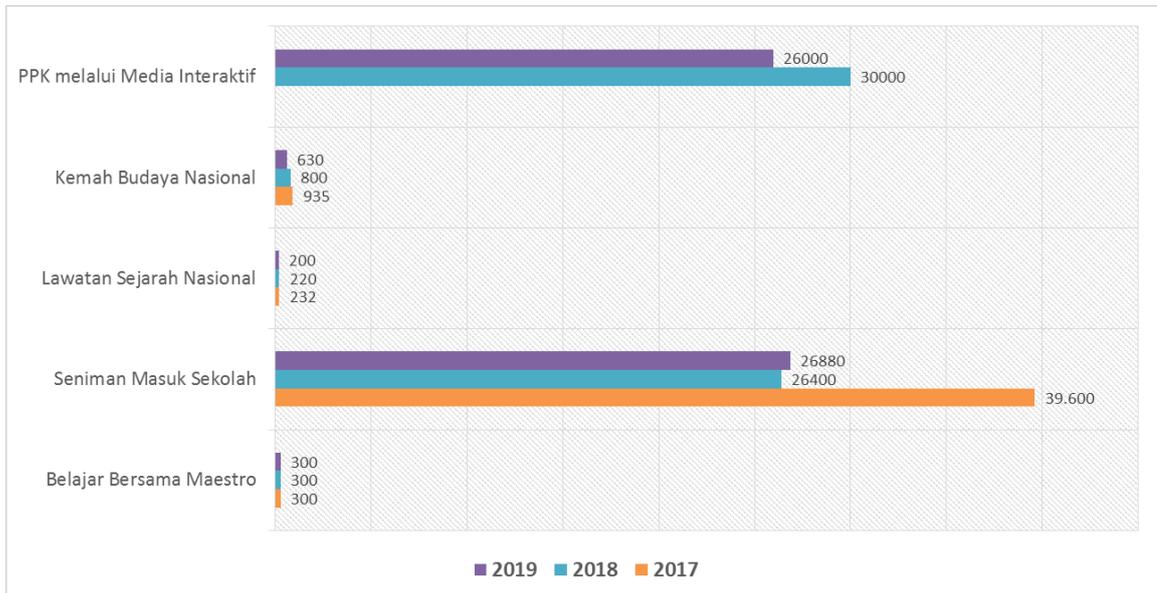
- Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP): diikuti 1200 siswa dan guru pendamping
- Pancasila dan Bela Negara dilaksanakan di Pontianak
- Penanggulangan radikalisme di Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat

3) Jenjang SMA

- Kawah Kepemimpinan Pelajar: dengan peserta 5.000 siswa
- Pramuka Tingkat Provinsi
- Pramuka Tingkat Nasional



Selain melalui jalur pendidikan, penguatan pendidikan karakter siswa juga dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Capaian PPK melalui pendekatan kebudayaan tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:





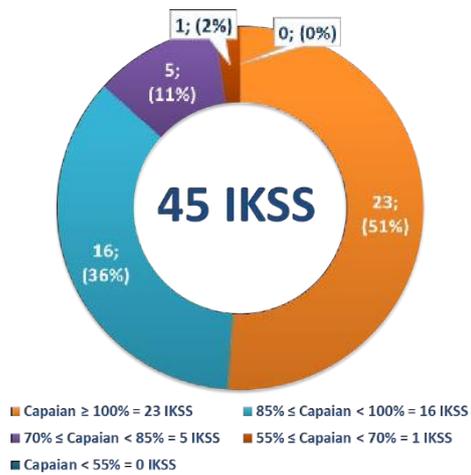
BAB IV

PENUTUP

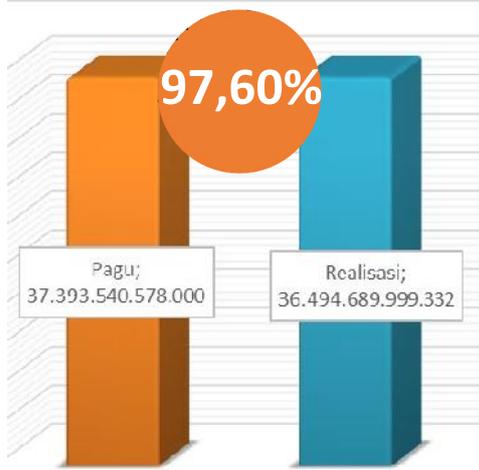


Sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, secara umum target yang ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan rincian sebagai berikut.

Ringkasan Capaian IKSS



Kinerja Keuangan 2019



PERMASALAHAN/TANTANGA

1. Penurunan APM dan APK khususnya jenjang pendidikan dasar (masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah)
2. Kondisi infrastruktur sekolah yang belum sepenuhnya baik karena masih terdapat sekolah yang mengalami kerusakan berat
3. Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional di daerah
4. Peningkatan mutu pendidikan (hasil belajar siswa seperti ditunjukkan PISA, TIMMS, UN dan AKSI masih kurang dan tidak ada peningkatan signifikan)
5. Belum maksimalnya lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar nasional
6. Pelestarian bahasa Indonesia di ruang publik;



PERBAIKAN KE DEPAN

1. Melakukan percepatan wajib belajar 12 tahun
2. Mendorong pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan untuk memenuhi SPM pendidikan
3. Mengoptimalkan fasilitasi dan supervisi SNP pada satuan pendidikan
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
5. Mengoptimalkan pengembangan profesionalisme guru dan penempatan guru
6. Mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk memenuhi standar nasional
7. Mengoptimalkan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dan Daerah
8. Melakukan perubahan Struktur organisasi Kemendikbud untuk mendukung Capaian Renstra 2020 – 2024 dengan memindahkan fungsi Akuntabilitas Kinerja dari Biro Keuangan ke Biro Perencanaan



LAMPIRAN

PK Kemendikbud 2019 // Pengukuran Kinerja 2019
// Pernyataan telah direviu



Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A. TUGAS

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

B. FUNGSI DAN TARGET KINERJA

NO	FUNGSI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik
			2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	77 dan 78
			3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik
2		Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	4.425.000
3	Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	77,20%
4	Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Kebudayaan dalam Mewujudkan dan Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan	159
			2. Indeks pembangunan kebudayaan nasional	54,6
5		Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	78,70%
			2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	70%
			3. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi)	7,8/1
			4. Angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun	97,51%
			5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	15,60%
6		Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	100,55%
			2. APM SD/SDLB	85,20%
			3. APK SMP/SMPLB/Paket B	83,77%
			4. APM SMP/SMPLB	73,72%
			5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	85,71%

NO	FUNGSI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
			6. APM SMA/SMK/SMLB	73,05%
			7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
			8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60
			9. Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 tahun
7	Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;	Meningkatnya Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	58,40%
8	Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	42.926
			2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKN	71,38%
9	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	84,20%
			2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	81%
			3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	85%
			4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	65%
			5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,49%
			6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,37%
			7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	68%
			8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	7,5
			9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	7,5
			10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	7,5
			11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	80%
10		Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/ keluarga	250.000
11	a. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; b. Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;	Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Jumlah pemerikaya minat baca	200
			2. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	20.000
			3. Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	2.000
			4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali	150

NO	FUNGSI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
12		Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia 2. Jumlah penutur asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia	6 2500
13	a. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP	81
14	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
15	b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; e. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan.	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	77

PROGRAM	ANGGARAN
1. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;	Rp1.813.256.980.000
2. Pendidikan Dasar dan Menengah;	Rp18.241.917.758.000
3. Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan;	Rp10.383.047.766.000
4. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra;	Rp581.986.879.000
5. Penelitian dan Pengembangan;	Rp1.188.578.297.000
6. Pelestarian Budaya;	Rp1.795.283.807.000
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	Rp1.800.491.734.000
8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur;	Rp188.524.713.000

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP



Pengukuran Kinerja Kemendikbud 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	1. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD	Baik	Baik	Tercapai
		2. Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	77 dan 78	94,22 dan 99,36	122 dan 127
		3. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM	Baik	Baik	Tercapai
2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	4.425.000	4.103.954	92,7
3	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	77,2	54,56	70,7
4	Meningkatnya Mutu Tata Kelola Kebudayaan dalam Mewujudkan dan Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan	159	175	110
		2. Indeks pembangunan kebudayaan nasional	56,6	53,74	95
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	78,70%	78,00%	99,1
		2. kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	70%	91,49%	130,7
		3. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi)	7.871	6.725	85,4
		4. Angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun	97,51%	98,12%	100,6
		5. kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	15,60%	26,26%	168,3
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	1. APK SD/SDLB/Paket A	100,55%	89,74%	89,2
		2. APM SD/SDLB	85,20%	80,40%	94,4
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	83,77%	77,41%	92,4
		4. APM SMP/SMPLB	73,72%	59,28%	80,4
		5. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	85,71%	82,17%	95,9
		6. APM SMA/SMK/SMLB	73,05%	61,61%	84,3
		7. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,9	0,94	104,4
		8. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,6	0,94	156,7
		9. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8	8,58	97,5
7	Meningkatnya Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan dan standar kurikulum	58,40%	58,46%	100,1
8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi	42.926	87.181	203,1
		2. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKN	71,38%	68,72%	96,3
9	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	1. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	84,20%	82,71%	98,2
		2. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	81%	73,59%	90,85
		3. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B	85%	80,19%	94,34
		4. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	65%	73,03%	112,4
		5. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	61,49%	79,99%	130,1
		6. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	75,37%	56,11%	74,4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
		7. kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	68%	71,46%	105,1
		8. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	7,5	6,87	92
		9. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	7,5	5,28	70,4
		10. Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	7,5	4,85	64,8
		11. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	80%	83,05%	103,8
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga	250.000	277.040	110,8
11	Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	1. Jumlah pemer kaya minat baca	200	173	86,5
		2. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	20.000	22.523	112,6
		3. Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	2.000	2.000	100,0
		4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali	150	191	127,3
12	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean	1. Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia	6	7	116,7
		2. Jumlah penutur asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia	2.500	3.081	123,2
13	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP	81	75	92,59
14	Dipertahankannya Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	Tercapai
15	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	77	81,62	106

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Jakarta, 25 Februari 2020
Inspektur Jenderal



Muchlis Rantoni Luddin
Muchlis Rantoni Luddin
NIP 196005071984031001

